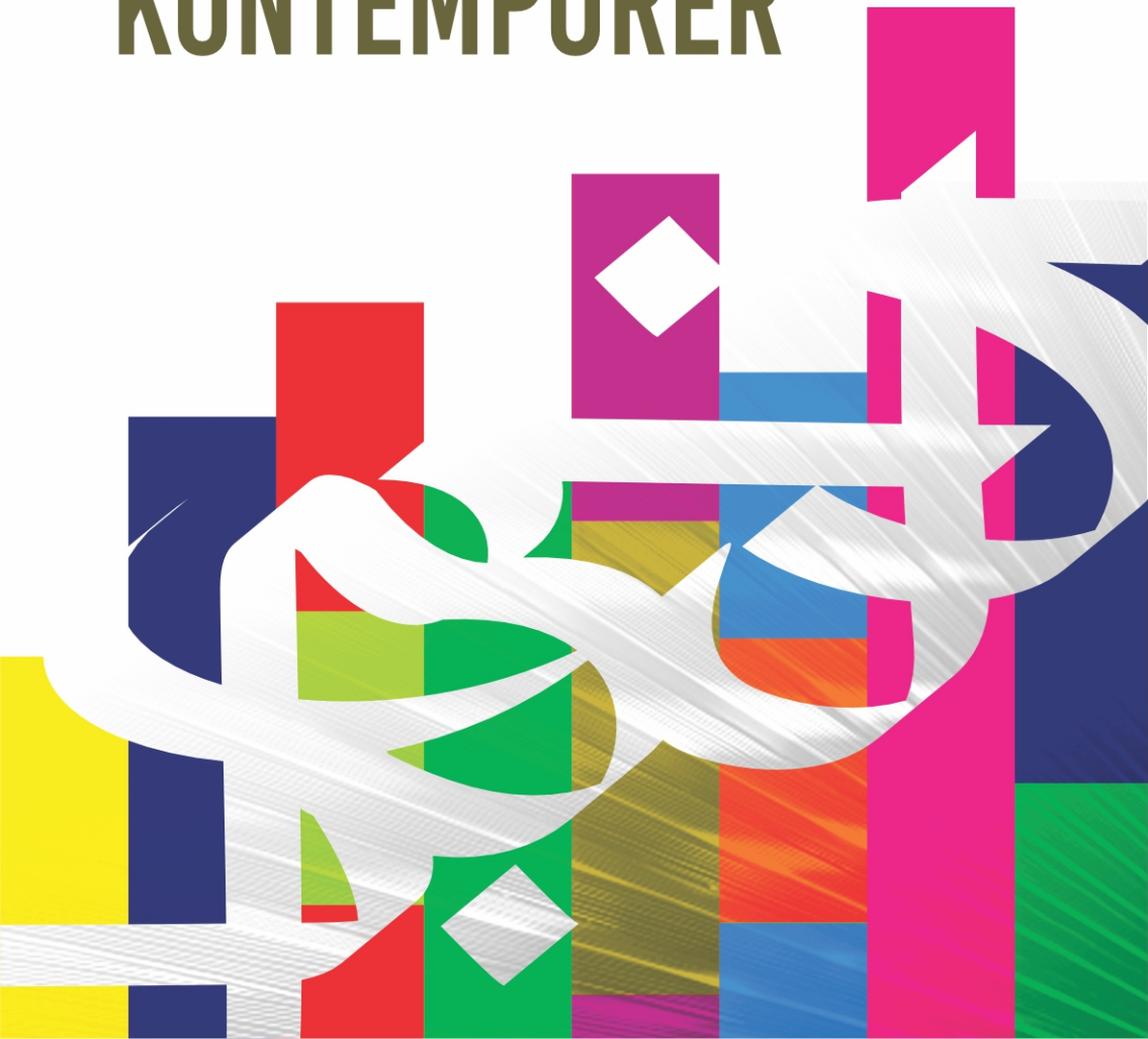


Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag
Dr. Maryamah, M.Pd.I

PERBANDINGAN PENDIDIKAN ISLAM KONTEMPORER



PERBANDINGAN PENDIDIKAN ISLAM
KONTEMPORER

Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag
Dr. Maryamah, M.Pd.I

PERBANDINGAN PENDIDIKAN ISLAM KONTEMPORER

Copyright ©2022, Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag., Dr. Maryamah, M.Pd.I., dkk.
All rights reserved

Perbandingan Pendidikan Islam Kontemporer

Fitri Oviyanti, Maryamah, Mustopa, Azimah, Sulastri, Madina, Armelis,
Yuliana Rauf, Halimi, Churairoh, Mentari, Rindi Atika, Ryko Adiansyah, M.
Amirul Mukminin, Rara Yurisia, Izen Yevien Fidarsih, Nur Idha Qummala,
Zulhijra

Editor: Angge Sapto Mubharokh
Desain Sampul: Ruhtata
Layout/tata letak Isi: Tim Redaksi Bildung

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Perbandingan Pendidikan Islam Kontemporer/Fitri Oviyanti, Maryamah,
dkk./Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara/2022

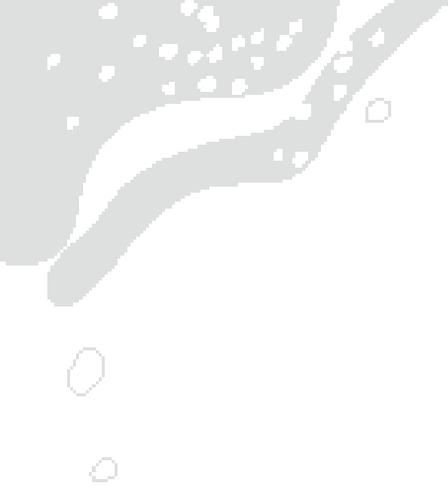
x + 162 halaman; 15 x 23 cm
ISBN: 978-623-6379-86-8

Cetakan Pertama: Oktober 2022

Penerbit:
BILDUNG
Jl. Raya Pleret KM 2
Banguntapan Bantul Yogyakarta 55791
Email: bildungpustakautama@gmail.com
Website: www.penerbitbildung.com

Anggota IKAPI

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari
Penerbit dan Penulis



KATA PENGANTAR

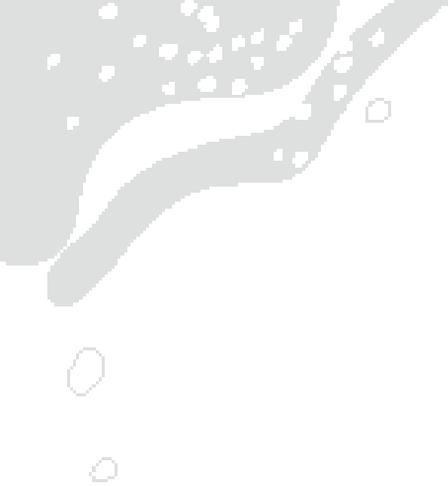
PERBANDINGAN PENDIDIKAN sebagai ilmu dalam dunia Pendidikan pada khususnya dan dunia ilmu pengetahuan pada umumnya mempunyai kedudukan yang penting. Perkembangan Pendidikan yang berjalan dalam suatu bangsa mengandung aspirasi-aspirasi dan ide-ide yang mendorong berkembangnya sebuah peradaban. Peradaban akan menjadi lebih kuat dengan berkembangnya Pendidikan. Perbandingan Pendidikan bertujuan menganalisis berbagai metode, pendekatan dan proses Pendidikan yang dialami oleh berbagai bangsa di belahan dunia. Hal ini menjadi referensi yang sangat baik bagi kita untuk membangun Pendidikan yang komprehensif di negara Indonesia.

Buku Perbandingan Pendidikan ini merupakan kumpulan dari makalah mahasiswa S2 Prgram Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang yang telah didiskusikan dalam kegiatan perkuliahan selama satu semester. Makalah-makalah tersebut lalu diberi saran dan masukan oleh sesama rekan mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah, juga diperkaya analisis dan referensinya. Selanjutnya diedit dan dijadikan buku referensi. Kehadiran buku ini bertujuan untuk memperkaya khazanah keilmuan mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan

Perbandingan Pendidikan serta para pembaca dalam memahami perkembangan Pendidikan di dunia.

Buku ini membahas tentang azas komparasi Pendidikan, metodologi komparasi Pendidikan, kebijakan Pendidikan di beberapa negara, Pendidikan internasional dan global, histori Pendidikan di Indonesia, serta perbandingan Pendidikan Islam kontemporer. Semoga buku ini dapat menginspirasi para pembaca untuk membangun Pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik, sehingga bangsa ini dapat menjadi bangsa yang maju dengan tetap tidak meninggalkan ciri khasnya sebagai bangsa yang beradab.

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I PERBANDINGAN PENDIDIKAN ISLAM KONTEMPORER (PENGERTIAN, KEDUDUKAN DAN TUJUANNYA)	1
A. Pengertian Pendidikan Islam Kontemporer	1
B. Tujuan Pendidikan Islam Kontemporer.....	1
C. Jenis-jenis Pendidikan Islam Kontemporer	2
D. Tantangan dalam Pendidikan Islam Kontemporer	6
E. Problematika dalam Pendidikan Islam Kontemporer	7

BAB II HISTORI PENDIDIKAN DI INDONESIA.....	13
A. Histori Pendidikan Di Indonesia.....	13
B. Landasan Histori Pendidikan di Indonesia	21

BAB III KONSEP, PROBLEM, DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA	25
A. Konsep Pendidikan di Indonesia	25
B. Problematika Pendidikan di Indonesia	26
C. Kebijakan Pendidikan di Indonesia	31

BAB IV PERBANDINGAN PENDIDIKAN	
ISLAM KONTEMPORER : PENDIDIKAN	
INTERNASIONAL DAN GLOBAL	46
A. Pengertian Pendidikan Komparatif.....	46
B. Tujuan Pendidikan Komparatif	48
C. Pengertian Pendidikan Internasional	49
D. Pengertian Pendidikan Global	51
E. Tujuan Pendidikan Global	52
BAB V ASAS KOMPARASI PENDIDIKAN	
A. Pengertian Pendidikan Komparatif.....	54
B. Masalah-masalah Pendidikan Komparatif.....	55
C. Tujuan Pendidikan Komparatif	56
D. Manfaat Pendidikan Komparatif	57
E. Kedudukan Pendidikan Komparatif	58
F. Cakupan Studi Pendidikan Komparatif.....	59
G. Asas-asas Komparabilitas	60
H. Syarat Komparabilitas	61
BAB VI METODOLOGI KOMPERASI	
PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGANNYA.....	
A. Pengertian Metode Pendekatan Studi dalam Komperasi	
Pendidikan.....	63
B. Metode-metode Studi dalam Komparasi Pendidikan	64
C. Pengembangan Metode dalam Melakukan Komperasi	
Pendidikan.....	68
BAB VII LATAR BELAKANG, KONSEP	
PENDIDIKAN, PROBLEMATIKA DAN KEBIJAKAN	
PENDIDIKAN DI NEGARA ASIA.....	
A. Pendidikan di Malaysia	72

B. Pendidikan Di China	84
C. Pendidikan di Jepang	94

BAB VIII LATAR BELAKANG, KONSEP PENDIDIKAN, PROBLEMATIKA DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI NEGARA EROPA.....		98
A. Pendidikan di Inggris		98
B. Pendidikan di Finlandia		106

BAB IX KONSEP PENDIDIKAN, PROBLEMATIKA DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI AMERIKA.....		116
A. Politik Pendidikan Amerika Serikat		116
B. Tujuan Pendidikan Amerika.....		119
C. Manajemen Pendidikan Amerika		120
D. Pendanaan Pendidikan Amerika		121
E. Isu-isu Pendidikan Amerika		122
F. Reformasi Pendidikan Amerika		123

BAB X LATAR BELAKANG, KONSEP PENDIDIKAN, PROBLEMATIKA DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI NEGARA AFRIKA UTARA		126
A. Pendidikan di Sudan		126
B. Pendidikan di Mesir		134

PENUTUP	147
---------------	-----

DAFTAR PUSTAKA	149
TENTANG PENULIS	158



BAB I

PERBANDINGAN PENDIDIKAN ISLAM KONTEMPORER (PENGERTIAN, KEDUDUKAN DAN TUJUANNYA)

A. Pengertian Pendidikan Islam Kontemporer

PENDIDIKAN ISLAM adalah pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunah. Menurut Mohammad Hamid an-Nasyir dan Kulah Abd Al-Qadir Darwis mendefinisikan pendidikan Islam sebagai proses pengarahan perkembangan manusia (*ri'ayah*) pada sisi jasmani, akal, bahasa, tingkah laku, kehidupan social dan keagamaan yang diharapkan pada kebaikan menuju kesempurnaan. Pendidikan Islam Kontemporer adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi anak didik berdasarkan pada kaidah-kaidah Agama Islam pada masa sekarang.

B. Tujuan Pendidikan Islam Kontemporer

Tujuan Pendidikan Islam Kontemporer harus sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional yang sesuai dengan UU Sisdiknas 2003 Pasal 1 ayat (2) yakni Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

C. Jenis –jenis Pendidikan Islam Kontemporer

1. Pondok Pesantren

Pondok pesantren adalah lembaga keagamaan, yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam. Istilah pondok, mungkin berasal dari kata funduk, dari bahasa arab yang berarti rumah penginapan atau hotel. Akan tetapi di dalam pesantren Indonesia, khususnya pulau jawa, lebih mirip dengan pemondokkan dalam lingkungan padepokan, yaitu perumahan sederhana yang dipetak- petak dalam bentuk kamar-kamar yang merupakan asrama santri. Sedangkan istilah pesantren secara etimologis asalnya pe-santri-an yang berarti tempat santri. Santri atau murid mempelajari agama dari seorang Kyai atau Syaikh di pondok pesantren.

Jika mencari lembaga pendidikan yang asli Indonesia dan berakar kuat dalam masyarakat, tentu akan menempatkan pesantren di tangga teratas. Namun, ironisnya lembaga yang dianggap merakyat ini ternyata masih menyisakan keberbagaian masalah dan diragukan kemampuannya dalam menjawab tantangan zaman, terutama ketika berhadapan dengan arus modernisasi. Untuk mengubah image yang agak miring ini tentunya memerlukan proses yang panjang dan usaha tidak begitu mudah.

Pada taraf ini, pesantren berhadap-hadapan dengan dilema antara tradisi dan modernitas. Ketika pesantren tidak mau beranjak ke modernitas, dan hanya berkuat dan

mempertahankan otentisitas tradisi pengajarannya yang khas tradisional, dengan pengajaran yang melulu bermuatan Al-Qur'an dan Al-Hadis serta kitab-kitab klasiknya, tanpa adanya pembaharuan metodologis, maka selama itu pula pesantren harus siap ditinggalkan oleh masyarakat.

Pengajaran Islam tradisional dengan muatan-muatan yang telah disebutkan di muka, tentu saja harus lebih dikembangkan agar penguasaan materi keagamaan anak didik (santri) dapat lebih maksimal, di samping juga perlu memasukkan materi-materi pengetahuan non-agama dalam proses pengajaran di pesantren.

Pondok pesantren yang ideal adalah pondok pesantren yang mampu mengantisipasi adanya pendapat yang mengatakan bahwa alumni pondok pesantren tidak berkualitas. Oleh sebab itu, sasaran utama yang diperbaharui adalah mental, yakni mental manusia dibangun hendaknya diganti dengan mental membangun.

2. Sekolah Islam Terpadu

Seperti diketahui khalayak umum, sekolah Islam Terpadu (IT) berbasis pada keterpaduan antara ilmu sains dan Islam. Dalam kurikulum dicantumkan Tahfizul Qur'an atau mata pelajaran menghafal Al Qur'an serta sisipan muatan spiritual dalam mata pelajaran umum.

Pendidikan tahfidzul Qur'an tradisional masih diselenggarakan oleh TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an). Namun seiring dengan makin tersibuknya siswa siswi SD, SMP, dan SMA membuat mereka tak lagi sempat dan mau pergi ke TPA. Sedangkan untuk menghafal Al Qur'an secara menyeluruh dan khusus harus dilakukan di podok pesantren

yang belum mengakomodir kebutuhan mereka memperdalam ilmu sains secara bersamaan. Sedangkan keluarga penghafal Al-Qur'an di Indonesia bisa dihitung dengan jari.

Seiring dengan berjalannya waktu dan pesatnya sekolah berbasis IT maka semakin banyaklah penghafal Al-Qur'an (belum taraf seluruhnya, hanya sebagian juz saja). Walaupun begitu sekolah IT mampu mengembalikan budaya menghafal Al-Qur'an di tengah masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan dan menghargai pendidikan akademis. Sayangnya kebanyakan siswa sekolah IT tak melanjutkan jenjang yang lebih tinggi di sekolah yang sama, ada yang memilih sekolah negeri karena dipandang lebih memiliki prospek ke depan. Siswa yang meninggalkan bangku sekolah IT memiliki kesulitan dalam memelihara hafalannya karena budaya menghafal al qur'an tidak di bawa ke rumah rumah mereka. Maka tak heran banyak siswa lulusan IT yang menurun jumlah hafalannya padahal pernah menguasai 5 juz lancar diluar kepala.

Terlepas dari hal itu kita harus mengakui pentingnya sekolah IT dalam membumikan Al Qur'an di Indonesia. Perannya sebagai lembaga sekolah formal yang diakui pemerintah dalam hal mutu juga patut menjadi pelajaran bagi sekolah sekolah Islam pada umumnya. Dalam menghadapi era global tentu kebutuhan akan ilmuan yang tak hanya pandai dalam hal akademis tapi juga dalam akhlaq dan spiritualitasnya menjadi kebutuhan yang pokok. Karena teknologi yang berkembang sedemikian pesatnya takkan mampu mengubah peradaban manusia menjadi lebih baik tanpa individu-individu yang memiliki keterpaduan pengetahuan sains dan Islam.

3. Madrasah

Madrasah adalah tempat pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran yang berada di bawah naungan Departemen Agama. Yang termasuk kedalam kategori madrasah ini adalah lembaga Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, Mu'allimin, Muallimat serya diniyyah.

Madrasah tidak lain adalah kata Arab untuk sekolah, artinya tempat belajar. Istilah madrasah ditinjau Arab ditujukan untuk semua sekolah secara umum, namun di Indonesia ditujukan untuk sekolah-sekolah Islam yang mata pelajaran utamanya adalah mata pelajaran agama Islam. Lahirnya lembaga ini merupakan kelanjutan sistem di dunia pesantren yang di dalamnya terdapat unsur-unsur pokok dari suatu pesantren. Sedangkan pada sistem madrasah, tidak harus ada pondok, masjid dan pengajian kitab-kitab Islam klasik. Unsur-unsur yang diutamakan di madrasah adalah pimpinan, guru, siswa, perangkat keras, perangkat lunak, dan pengajaran mata pelajaran Islam.

Bertitik tolak dari prinsip madrasah ini, maka pendidikan dan pengajarannya diarahkan untuk membentuk manusia pembangunan yang pancasilais yang sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreatifitas dan penuh tanggung rasa, dapat menyuburkan sikap demokrasi, dan dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945.

Adapun beberapa ciri dari madrasah adalah:

1. Lembaga pendidikan yang mempunyai tata cara yang sama dengan sekolah.

2. Mata pelajaran agama Islam di madrasah dijadikan mata pelajaran pokok, di samping diberikan mata pelajaran umum.

D. Tantangan dalam Pendidikan Islam Kontemporer

Ada beberapa hal yang dianggap sebagai tantangan dalam pendidikan Islam, diantaranya: Pertama adalah pengembangan potensi manusia. Mengembangkan potensi manusia dalam pandangan pendidikan Islam merupakan tantangan yang bersifat holistik, berkesinambungan dan tanpa akhir. Kedua, membahas tentang kegagalan dari para pemikiran Barat dalam membangun konsep tentang sifat asal manusia yang tidak dipandu oleh wahyu. Ketiga, membahas tentang tantangan budaya fatalistik dari kaum muslimin sendiri. Keempat, membahas tentang munculnya ancaman di era abad 21, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor perubahan sosial.

Perubahan sosial yang terjadi secara simultan dalam masyarakat, pada gilirannya akan merangsang munculnya berbagai permasalahan dalam lembaga pendidikan Islam, diantaranya adalah problem lulusan LPI dengan tuntutan dunia industri, kualitas SDM dan lingkup LPI, masalah keilmuan Islam yang dilematis dan ambivalensi penyelenggaraan pendidikan Islam.

Sistem pendidikan Islam di Indonesia mengalami tantangan yang mendasar, untuk itu diberlakukan upaya pembaharuan yang tanpa henti. Tantangan yang mendasar itu antara lain:

1. Mampukah sistem pendidikan Islam Indonesia menjadi *center of excellence* bagi perkembangan iptek yang tidak bebas nilai, yakni mengembangkan iptek dengan sumber ajaran Qur'an dan As-Sunah.

2. Mampukah system pendidikan Islam Indonesia menjadi pusat pembaharuan pemikiran Islam yang benar-benar mampu merespon tantangan zaman tanpa mengabaikan aspek dogmatis yang wajib diikuti.
3. Mampukah ahli-ahli pendidikan Islam menumbuhkan kepribadian yang benar-benar beriman dan bertaqwa kepada Tuhan lengkap dengan kemampuan bernalar-ilmiah yang tidak mengenal batas akhir.

E. Problematika dalam Pendidikan Islam Kontemporer

1. Faktor Internal

a. Relasi Kekuasaan dan Orientasi Pendidikan Islam

Tujuan pendidikan pada dasarnya hanya satu, yaitu memanusiaikan manusia, atau mengangkat harkat dan martabat manusia atau *human dignity*, yaitu menjadi khalifah di muka bumi dengan tugas dan tanggung jawab memakmurkan kehidupan dan memelihara lingkungan. Tujuan pendidikan yang selama ini diorientasikan memang sangat ideal bahkan, lantaran terlalu ideal, tujuan tersebut tidak pernah terlaksana dengan baik.

Orientasi pendidikan, sebagaimana yang dicita-citakan secara nasional, barangkali dalam konteks era sekarang ini menjadi tidak menentu, atau kabur kehilangan orientasi mengingat adalah tuntutan pola kehidupan pragmatis dalam masyarakat Indonesia. Hal ini patut untuk dikritisi bahwa globalisasi bukan semata mendatangkan efek positif, dengan kemudahan-kemudahan yang ada, akan tetapi berbagai tuntutan kehidupan yang disebabkan olehnya menjadikan disorientasi pendidikan. Pendidikan cenderung berpijak pada kebutuhan pragmatis, atau kebutuhan pasar lapangan, kerja, sehingga ruh pendidikan

islam sebagai pondasi budaya, moralitas, dan *social movement* (gerakan sosial) menjadi hilang.

b. Pendekatan/Metode Pembelajaran

Peran guru atau dosen sangat besar dalam meningkatkan kualitas kompetensi siswa/mahasiswa. Dalam mengajar, ia harus mampu membangkitkan potensi guru, memotifasi, memberikan suntikan dan menggerakkan siswa/mahasiswa melalui pola pembelajaran yang kreatif dan kontekstual (konteks sekarang menggunakan teknologi yang memadai). Pola pembelajaran yang demikian akan menunjang tercapainya sekolah yang unggul dan kualitas lulusan yang siap bersaing dalam arus perkembangan zaman.

Siswa atau mahasiswa bukanlah manusia yang tidak memiliki pengalaman. Sebaliknya, berjuta-juta pengalaman yang cukup beragam ternyata ia miliki. Oleh karena itu, dikelas pun siswa/mahasiswa harus kritis membaca kenyataan kelas, dan siap mengkritisnya. Bertolak dari kondisi ideal tersebut, kita menyadari, hingga sekarang ini siswa masih banyak yang senang diajar dengan metode yang konservatif, seperti ceramah, didikte, karena lebih sederhana dan tidak ada tantangan untuk berfikir.

c. Profesionalitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Salah satu masalah besar yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia sejak masa Orde Baru adalah profesionalisme guru dan tenaga pendidik yang masih belum memadai. Secara kuantitatif, jumlah guru dan tenaga kependidikan lainnya agaknya sudah cukup memadai, tetapi dari segi mutu dan profesionalisme masih belum memenuhi harapan. Banyak guru dan tenaga kependidikan masih

unqualified, *underqualified*, dan *mismatch*, sehingga mereka tidak atau kurang mampu menyajikan dan menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar kualitatif.

d. Biaya Pendidikan

Faktor biaya pendidikan adalah hal penting, dan menjadi persoalan tersendiri yang seolah-olah menjadi kabur mengenai siapa yang bertanggung jawab atas persoalan ini. Terkait dengan amanat konstitusi sebagaimana termaktub dalam UUD 45 hasil amandemen, serta UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang memerintahkan negara mengalokasikan dana minimal 20% dari APBN dan APBD di masing-masing daerah, namun hingga sekarang belum terpenuhi. Bahkan, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan genap 20% hingga tahun 2009 sebagaimana yang dirancang dalam anggaran strategis pendidikan.

2. Faktor Eksternal

a. Dichotomic

Masalah besar yang dihadapi dunia pendidikan islam adalah *dichotomy* dalam beberapa aspek yaitu antara Ilmu Agama dengan Ilmu Umum, antara Wahyu dengan Akal setara antara Wahyu dengan Alam. Munculnya problem dikotomi dengan segala perdebatannya telah berlangsung sejak lama. Boleh dibilang gejala ini mulai tampak pada masa-masa pertengahan. Menurut Rahman, dalam melukiskan watak ilmu pengetahuan islam zaman pertengahan menyatakan bahwa, muncul persaingan yang tak berhenti antara *hukum* dan *teologi* untuk mendapat julukan sebagai mahkota semua ilmu.

b. *Too General Knowledge*

Kelemahan dunia pendidikan islam berikutnya adalah sifat

ilmu pengetahuannya yang masih terlalu general/umum dan kurang memperhatikan kepada upaya penyelesaian masalah (*problem solving*). Produk-produk yang dihasilkan cenderung kurang membumi dan kurang selaras dengan dinamika masyarakat. Menurut Syed Hussein Alatas menyatakan bahwa, kemampuan untuk mengatasi berbagai permasalahan, mendefinisikan, menganalisis dan selanjutnya mencari jalan keluar/pemecahan masalah tersebut merupakan karakter dan sesuatu yang mendasar kualitas sebuah intelektual. Ia menambahkan, ciri terpenting yang membedakan dengan non-intelektual adalah tidak adanya kemampuan untuk berfikir dan tidak mampu untuk melihat konsekuensinya.

c. *Lack of Spirit of Inquiry*

Persoalan besar lainnya yang menjadi penghambat kemajuan dunia pendidikan islam ialah rendahnya semangat untuk melakukan penelitian/penyelidikan. Syed Hussein Alatas merujuk kepada pernyataan *The Spiritus Rector* dari Modernisme Islam, Al Afghani, Menganggap rendahnya “*The Intellectual Spirit*” (semangat intelektual) menjadi salah satu faktor terpenting yang menyebabkan kemunduran Islam di Timur Tengah.

d. Memorisasi

Rahman menggambarkan bahwa, kemerosotan secara gradual dari standar-standar akademis yang berlangsung selama berabad-abad tentu terletak pada kenyataan bahwa, karena jumlah buku-buku yang tertera dalam kurikulum sedikit sekali, maka waktu yang diperlukan untuk belajar juga terlalu singkat bagi pelajar untuk dapat menguasai materi-materi yang seringkali sulit untuk dimengerti, tentang aspek-aspek tinggi ilmu keagamaan pada usia yang

relatif muda dan belum matang. Hal ini pada gilirannya menjadikan belajar lebih banyak bersifat *studi tekstual* daripada *pemahaman* pelajaran yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan dorongan untuk belajar dengan sistem hafalan (*memorizing*) daripada pemahaman yang sebenarnya. Kenyataan menunjukkan bahwa abad-abad pertengahan yang akhir hanya menghasilkan sejumlah besar karya-karya komentar dan bukan karya-karya yang pada dasarnya orisinal.

e. *Certificate Oriented*

Pola yang dikembangkan pada masa awal-awal Islam, yaitu *thalab al'ilm*, telah memberikan semangat dikalangan muslim untuk gigih mencari ilmu, melakukan perjalanan jauh, penuh resiko, guna mendapatkan kebenaran suatu *hadits*, mencari guru diberbagai tempat, dan sebagainya. Hal tersebut memberikan isyarat bahwa karakteristik para ulama muslim masa-masa awal didalam mencari ilmu adalah *knowledge oriented*. Sehingga tidak mengherankan jika pada masa-masa itu, banyak lahir tokoh-tokoh besar yang memberikan banyak kontribusi berharga, ulama-ulama *encyclopedic*, karya-karya besar sepanjang masa. Sementara, jika dibandingkan dengan pola yang ada pada masa sekarang dalam mencari ilmu menunjukkan kecenderungan adanya pergeseran dar *knowledge oriented* menuju *certificate oriented* semata. Mencari ilmu hanya merupakan sebuah proses untuk mendapatkan sertifikat atau ijazah saja, sedangkan semangat dan kualitas keilmuan menempati prioritas berikutnya

Pembinaan dan pengajaran yang ideal dalam pendidikan Islam kontemporer ialah yang saling bersinergi yang tidak hanya mengajar, dan memberikan latihan semata

tapi juga melakukan pengawasan dan memberi teladan, model integrasi pemikiran Zakiah Darajat sebagai bentuk untuk menghiasi wajah baru di dunia pendidikan Islam era modern. Pandangan Hasan Langgulung dan Zakiah Darajat menjadi sumber tokoh pemikir pendidikan yang bisa dikatakan mempunyai gagasan-ide kontemporer yang bisa membantu pendidikan Islam menggapai kemajuan yang kompleks. Keduanya mempunyai visi misi yang ingin menjadikan wajah pendidikan Islam bersifat integratif, komprehensif dan holistik, bukan menjadi pendidikan yang dikotomis. Integrasi keilmuan, transformasi keilmuan dan multidisipliner keilmuan menjadi corak dari wajah pendidikan Islam kontemporer.



BAB II

HISTORI PENDIDIKAN DI INDONESIA

A. Histori Pendidikan Di Indonesia

PENDIDIKAN DI INDONESIA memiliki sejarah yang cukup panjang. Pendidikan itu telah ada sejak zaman kuno/ tradisional yang dimulai dengan zaman pengaruh agama Hindu dan Budha, zaman pengaruh Islam, zaman penjajahan, dan zaman merdeka. Mudyahardjo (2008) dan Nasution (2008) menguraikan masing-masing zaman tersebut secara lebih terperinci. Berikut ini adalah uraian dan rincian perjalanan sejarah pendidikan Indonesia:

1. Zaman Pengaruh Hindu dan Budha

Hinduisme and Budhisme datang ke Indonesia sekitar abad ke-5. Hinduisme dan Budhisme merupakan dua agama yang berbeda, namun di Indonesia keduanya memiliki kecenderungan *sinkretisme*, yaitu keyakinan mempersatukan figur *Syiwa* dengan *Budha* sebagai satu sumber Yang Maha Tinggi. Motto pada lambang Negara Indonesia yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*, secara etimologis berasal dari keyakinan tersebut. Tujuan pendidikan pada zaman ini sama dengan tujuan kedua agama tersebut. Pendidikan dilaksanakan dalam rangka penyebaran dan pembinaan kehidupan bergama Hindu dan Budha.

2. Zaman Pengaruh Islam (Tradisional)

Islam mulai masuk ke Indonesia pada akhir abad ke-13 dan mencakup sebagian besar Nusantara pada abad ke-16. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia sejalan dengan perkembangan penyebaran Islam di Nusantara, baik sebagai agama maupun sebagai arus kebudayaan. Pendidikan Islam pada zaman ini disebut Pendidikan Islam Tradisional. Tujuan pendidikan Islam adalah sama dengan tujuan hidup Islam, yaitu mengabdikan sepenuhnya kepada Allah SWT sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pendidikan Islam Tradisional ini tidak diselenggarakan secara terpusat, namun banyak diupayakan secara perorangan melalui para ulamanya di suatu wilayah tertentu dan terkoordinasi oleh para wali di Jawa, terutama *Wali Songo*.

3. Zaman Pengaruh Nasrani (Katholik dan Kristen)

Bangsa Portugis pada abad ke-16 bercita-cita menguasai perdagangan dan perniagaan Timur-Barat dengan cara menemukan jalan laut menuju dunia Timur serta menguasai bandar-bandar dan daerah-daerah strategis yang menjadi mata rantai perdagangan dan perniagaan. Di samping mencari kejayaan (*glorious*) dan kekayaan (*gold*), bangsa Portugis datang ke Timur (termasuk Indonesia) bermaksud pula menyebarkan agama yang mereka anut, yakni Katholik (*gospel*). Pada akhirnya pedagang Portugis menetap di bagian timur Indonesia tempat rempah-rempah itu dihasilkan. Namun kekuasaan Portugis melemah akibat peperangan dengan raja-raja di Indonesia dan akhirnya dilenyapkan oleh Belanda pada tahun 1605. Dalam setiap operasi perdagangan, mereka menyertakan para paderi misionaris Paderi yang terkenal di Maluku, sebagai salah satu

pijakan Portugis dalam menjalankan misinya, adalah Franciscus Xaverius dari orde Jesuit.

Orde ini didirikan oleh Ignatius Loyola (1491-1556) dan memiliki tujuan yaitu segala sesuatu untuk keagungan yang lebih besar dari Tuhan. Yang dicapai dengan tiga cara: memberi khotbah, memberi pelajaran, dan pengakuan. Orde ini juga mempunyai organisasi pendidikan yang seragam: sama di mana pun dan bebas untuk semua. Xaverius memandang pendidikan sebagai alat yang ampuh untuk penyebaran agama.

Sedangkan pengaruh Kristen berasal dari orang-orang Belanda yang datang pertama kali tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dengan tujuan untuk mencari rempah-rempah. Untuk menghindari persaingan di antara mereka, pemerintah Belanda mendirikan suatu kongsi dagang yang disebut VOC (*vreenigds Oost Indische Compagnie*) atau Persekutuan Dagang Hindia Belanda tahun 1602. Sikap VOC terhadap pendidikan adalah membiarkan terselenggaranya Pendidikan Tradisional di Nusantara, mendukung diselenggarakannya sekolah-sekolah yang bertujuan menyebarkan agama Kristen. Kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh VOC terutama dipusatkan di bagian timur Indonesia di mana Katolik telah berakar dan di Batavia (Jakarta), pusat administrasi kolonial. Tujuannya untuk melenyapkan agama Katolik dengan menyebarkan agama Kristen Protestan, Calvinisme.

4. Zaman Kolonial Belanda

VOC pada perkembangannya diperkuat dan dipersenjatai dan dijadikan benteng oleh Belanda yang akhirnya menjadi landasan untuk menguasai daerah di sekitarnya. Lambat laun kantor dagang itu beralih dari pusat komersial menjadi basis politik dan territorial. Setelah pecah perang kolonial di berbagai

daerah di tanah air, akhirnya Indonesia jatuh seluruhnya di bawah pemerintahan Belanda.

Pada tahun 1816 VOC ambruk dan pemerintahan dikendalikan oleh para Komisaris Jendral dari Inggris. Mereka harus memulai sistem pendidikan dari dasar kembali, karena pendidikan pada zaman VOC berakhir dengan kegagalan total. Ide-ide liberal aliran *Ufklarung* atau *Enlightenment*, yang mana mengatakan bahwa pendidikan adalah alat untuk mencapai kemajuan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, kurikulum sekolah mengalami perubahan radikal dengan masuknya ide-ide liberal tersebut yang bertujuan mengembangkan kemampuan intelektual, nilai-nilai rasional dan sosial.

Pada awalnya kurikulum ini hanya diterapkan untuk anak-anak Belanda selama setengah abad ke-19. Setelah tahun 1848 dikeluarkan peraturan pemerintah yang menunjukkan bahwa pemerintah lambat laun menerima tanggung jawab yang lebih besar atas pendidikan anak-anak Indonesia sebagai hasil perdebatan di parlemen Belanda dan mencerminkan sikap liberal yang lebih menguntungkan rakyat Indonesia.

Pada tahun 1899 terbit sebuah atrikel oleh Van Deventer berjudul *Hutang Kehormatan* dalam majalah *De Gids*. Ia menganjurkan agar pemerintahannya lebih memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ekspresi ini kemudian dikenal dengan *Politik Etis* dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui irigasi, transmigrasi, reformasi, pendewasaan, perwakilan yang mana semua ini memerlukan peranan penting pendidikan. Di samping itu, Van Deventer juga mengembangkan pengajaran bahasa Belanda. Menurutnya, mereka yang menguasai Belanda secara kultural lebih maju dan dapat menjadi pelopor bagi yang lainnya.

Sejak dijalankannya Politik Etis ini tampak kemajuan yang lebih pesat dalam bidang pendidikan selama beberapa dekade. Pendidikan yang berorientasi Barat ini meskipun masih bersifat terbatas untuk beberapa golongan saja, antara lain anak-anak Indonesia yang orang tuanya adalah pegawai pemerintah Belanda, telah menimbulkan elite intelektual baru.

Golongan baru inilah yang kemudian berjuang merintis kemerdekaan melalui pendidikan. Perjuangan yang masih bersifat kedaerahan berubah menjadi perjuangan bangsa sejak berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 dan semakin meningkat dengan lahirnya Sumpah Pemuda tahun 1928. Setelah itu tokoh-tokoh pendidik lainnya adalah Mohammad Syafei dengan *Indonesisch Nederlandse School*-nya, Ki Hajar Dewantara dengan Taman Siswa-nya, dan Kyai Haji Ahmad Dahlan dengan Pendidikan Muhammadiyah-nya yang semuanya mendidik anak-anak agar bisa mandiri dengan jiwa merdeka.

5. Zaman Kolonial Jepang

Perjuangan bangsa Indonesia dalam masa penjajahan Jepang tetap berlanjut sampai cita-cita untuk merdeka tercapai. Walaupun bangsa Jepang menguras habis-habisan kekayaan alam Indonesia, bangsa Indonesia tidak pantang menyerah dan terus mengobarkan semangat 45 di hati mereka. Meskipun demikian, ada beberapa segi positif dari penjajahan Jepang di Indonesia. Di bidang pendidikan, Jepang telah menghapus dualisme pendidikan dari penjajah Belanda dan menggantikannya dengan pendidikan yang sama bagi semua orang. Selain itu, pemakaian bahasa Indonesia secara luas diinstruksikan oleh Jepang untuk di pakai di lembaga-lembaga pendidikan, di kantor-kantor, dan dalam pergaulan sehari-hari.

Hal ini mempermudah bangsa Indonesia untuk merealisasi Indonesia merdeka. Pada tanggal 17 Agustus 1945 cita-cita bangsa Indonesia menjadi kenyataan ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan kepada dunia.

6. Zaman Kemerdekaan (Awal)

Setelah Indonesia merdeka, perjuangan bangsa Indonesia tidak berhenti sampai di sini karena gangguan-gangguan dari para penjajah yang ingin kembali menguasai Indonesia datang silih berganti sehingga bidang pendidikan pada saat itu bukanlah prioritas utama karena konsentrasi bangsa Indonesia adalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih dengan perjuangan yang amat berat.

Tujuan pendidikan belum dirumuskan dalam suatu undang-undang yang mengatur pendidikan. Sistem persekolahan di Indonesia yang telah dipersatukan oleh penjajah Jepang terus disempurnakan. Namun dalam pelaksanaannya belum tercapai sesuai dengan yang diharapkan bahkan banyak pendidikan di daerah-daerah tidak dapat dilaksanakan karena faktor keamanan para pelajarnya. Di samping itu, banyak pelajar yang ikut serta berjuang mempertahankan kemerdekaan sehingga tidak dapat bersekolah.

7. Zaman ‘Orde Lama’

Setelah gangguan-gangguan itu mereda, pembangunan untuk mengisi kemerdekaan mulai digerakkan. Pembangunan dilaksanakan serentak di berbagai bidang, baik spiritual maupun material. Diadakan konsolidasi yang intensif, sistem pendidikan Indonesia terdiri atas: Pendidikan Rendah, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi. Pendidikan harus membimbing para siswanya agar menjadi warga negara

yang bertanggung jawab. Sesuai dengan dasar keadilan sosial, sekolah harus terbuka untuk tiap-tiap penduduk negara.

Di samping itu, Pendidikan Nasional zaman ‘Orde Lama’ adalah pendidikan yang dapat membangun bangsa agar mandiri sehingga dapat menyelesaikan revolusinya baik di dalam maupun di luar, pendidikan yang secara spiritual membina bangsa yang ber-Pancasila dan melaksanakan UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Kepribadian Indonesia, dan merealisasikan ketiga kerangka tujuan Revolusi Indonesia sesuai dengan Manipol yaitu membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia berwilayah dari Sabang sampai Merauke, menyelenggarakan masyarakat Sosialis Indonesia yang adil dan makmur, lahir-batin, melenyapkan kolonialisme, mengusahakan dunia baru, tanpa penjajahan, penindasan dan penghisapan, ke arah perdamaian, persahabatan nasional yang sejati dan abadi.

8. Zaman ‘Orde Baru’

Orde Baru dimulai setelah penumpasan G-30S pada tahun 1965 dan ditandai oleh upaya melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Haluan penyelenggaraan pendidikan dikoreksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Orde Lama yaitu dengan menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Menurut Orde Baru, pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Pendidikan pada masa ini memungkinkan adanya penghayatan dan pengamalan Pancasila secara meluas di masyarakat, tidak hanya di dalam sekolah sebagai mata pelajaran di setiap jenjang pendidikan.

Di samping itu, dikembangkan kebijakan *link and match* di bidang pendidikan. Konsep keterkaitan dan kepadanan ini dijadikan strategi operasional dalam meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar. Inovasi-inovasi pendidikan juga dilakukan untuk mencapai sasaran pendidikan yang diinginkan. Sistem pendidikannya adalah sentralisasi dengan berpusat pada pemerintah pusat. Namun demikian, dalam dunia pendidikan pada masa ini masih memiliki beberapa kesenjangan.

Buchori dalam Pidarta (2008: 138-39) mengemukakan beberapa kesenjangan, yaitu (1) kesenjangan okupasional (antara pendidikan dan dunia kerja), (2) kesenjangan akademik (pengetahuan yang diperoleh di sekolah kurang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari), (3) kesenjangan kultural (pendidikan masih banyak menekankan pada pengetahuan klasik dan humaniora yang tidak bersumber dari kemajuan ilmu dan teknologi), dan (4) kesenjangan temporal (kesenjangan antara wawasan yang dimiliki dengan wawasan dunia terkini).

Keberhasilan pembangunan yang menonjol pada zaman ini adalah (1) kesadaran beragama dan kenagsaan meningkat dengan pesat, (2) persatuan dan kesatuan bangsa tetap terkendali, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga meningkat.

9. Zaman ‘Reformasi’

Selama Orde Baru, rezim yang berkuasa sangat leluasa melakukan hal-hal yang mereka inginkan tanpa ada yang berani melakukan pertentangan dan perlawanan, rezim ini juga memiliki motor politik yang sangat kuat yaitu partai Golkar yang merupakan partai terbesar saat itu. Hampir tidak ada kebebasan bagi masyarakat untuk melakukan sesuatu, termasuk kebebasan untuk berbicara dan menyampaikan pendapatnya.

Begitu Orde Baru jatuh pada tahun 1998 masyarakat merasa bebas bagaikan burung yang baru lepas dari sangkarnya yang telah membelenggunya selama bertahun-tahun. Masa Reformasi ini pada awalnya lebih banyak bersifat mengejar kebebasan tanpa program yang jelas. Sementara itu, ekonomi Indonesia semakin terpuruk, pengangguran bertambah banyak, demikian juga halnya dengan penduduk miskin. Korupsi semakin hebat dan semakin sulit diberantas. Namun demikian, dalam bidang pendidikan ada perubahan-perubahan dengan munculnya Undang-Undang Pendidikan yang baru dan mengubah sistem pendidikan sentralisasi menjadi desentralisasi, di samping itu kesejahteraan tenaga kependidikan perlahan-lahan meningkat. Hal ini memicu peningkatan kualitas profesional mereka. Instrumen-instrumen untuk mewujudkan desentralisasi pendidikan juga diupayakan, misalnya MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), *Life Skills* (Lima Keterampilan Hidup), dan TQM (Total Quality Management).

B. Landasan Histori Pendidikan di Indonesia

Sejarah atau *history* keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang didasari oleh konsep-konsep tertentu. Sejarah penuh dengan informasi-informasi yang mengandung kejadian, model, konsep, teori, praktik, moral, cita-cita, bentuk dan sebagainya.

Informasi-informasi di atas merupakan warisan generasi terdahulu kepada generasi muda yang tidak ternilai harganya. Generasi muda dapat belajar dari informasi-informasi ini terutama tentang kejadian-kejadian masa lampau dan memanfaatkannya untuk mengembangkan kemampuan diri mereka. Sejarah telah memberi penerangan, contoh, dan teladan bagi mereka dan semuanya ini diharapkan akan dapat

meningkatkan peradaban manusia itu sendiri di masa kini dan masa yang akan datang.

Indonesia dan negara-negara lainnya pada tahap awal perkembangan ekonomi mereka telah mengembangkan sistem pendidikan yang baik dan berdasarkan kebudayaan tradisional. Pada masa kolonial, sistem pendidikan berkembang dengan berdasar pada sistem pendidikan sebelumnya ini. Pada masa modern seperti sekarang, sistem pendidikan yang berlaku juga berdasarkan pengembangan dari sistem pendidikan kolonial.

Dengan kata lain, tinjauan landasan sejarah atau historis Pendidikan Nasional Indonesia merupakan pandangan ke masa lalu atau pandangan retrospektif. Pandangan ini melahirkan studi-studi historis tentang proses perjalanan pendidikan nasional Indonesia yang terjadi pada periode tertentu di masa yang lampau.

Perjalanan sejarah pendidikan di tanah air yang sangat panjang, bahkan semenjak jauh sebelum kita menacapai kemerdekaan pada tahun 1945, baik sebagai aktivitas intelektualisasi dan budaya maupun sebagai alat perjuangan politik untuk membebaskan bangsa dari belenggu kolonialisme, telah diwarnai oleh bermacam-macam corak. Menjelang 64 tahun Indonesia merdeka, dengan system politik sebagai penjabaran demokrasi Pancasila di Era Reformasi ini yang telah mewujudkan pola Pendidikan Nasional seperti sekarang, kita mulai dapat melihat dengan ke arah mana partisipasi masyarakat dalam ikut serta menyelenggarakan pendidikan itu. Semua corak tersebut memiliki pandangan atau dasar pemikiran yang hampir sama tentang pendidikan; pendidikan diarahkan pada optimasi upaya pendidikan sebagai bagian integral dari proses pembangunan bangsa.

Di samping itu, pendidikan memiliki peranan strategis menyiapkan generasi berkualitas untuk kepentingan masa depan. Pendidikan dijadikan sebagai institusi utama dalam upaya pembentuk sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang diharapkan suatu bangsa. Apalagi kini semakin dirasakan bahwa SDM Indonesia masih lemah dalam hal daya saing (kemampuan kompetisi) dan daya sanding (kemampuan kerja sama) dengan bangsa lain di dunia.

Dengan demikian, setiap bidang kegiatan yang ingin dicapai manusia untuk maju, pada umumnya dikaitkan dengan bagaimana keadaan bidang tersebut pada masa yang lampau. Demikian juga halnya dengan bidang pendidikan. Sejarah pendidikan merupakan bahan pembandingan untuk memajukan pendidikan suatu bangsa. Masa lampau memperjelas pemahaman kita tentang masa kini. Sistem pendidikan yang kita miliki sekarang adalah hasil perkembangan pendidikan yang tumbuh dalam sejarah pengalaman bangsa kita pada masa yang telah lalu. Pembahasan tentang landasan sejarah di atas memberi implikasi konsep-konsep pendidikan sebagai berikut:

Pendidikan diharapkan bertujuan dan mampu mengembangkan berbagai macam potensi peserta didik serta mengembangkan kepribadian mereka secara lebih harmonis. Tujuan pendidikan juga diarahkan untuk mengembangkan aspek keagamaan, kemanusiaan, kemandirian, serta kemandirian peserta didik. Di samping itu, tujuan pendidikan harus diarahkan kepada hal-hal yang praktis dan memiliki nilai guna yang tinggi yang dapat diaplikasikan dalam dunia kerja nyata.

Proses pendidikan terutama proses belajar-mengajar dan materi pelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik, melaksanakan metode global

untuk pelajaran bahasa, mengembangkan kemandirian dan kerjasama siswa dalam pembelajaran, mengembangkan pembelajaran lintas disiplin ilmu, demokratisasi dalam pendidikan, serta mengembangkan ilmu dan teknologi.

Pendidikan harus juga memajukan kebudayaan nasional. Karena kebudayaan nasional merupakan puncak-puncak budaya daerah dan menjadi identitas bangsa Indonesia agar tidak ditelan oleh budaya global. Inovasi-inovasi harus bersumber dari hasil-hasil penelitian pendidikan di Indonesia, bukan sekedar konsep-konsep dari dunia Barat sehingga diharapkan pada akhirnya membentuk konsep-konsep pendidikan yang bercirikan Indonesia.



BAB III

KONSEP, PROBLEM, DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

A. Konsep Pendidikan di Indonesia

MENURUT SK Dirjen Dikti No.32/DJ/Kep/1983 menyebutkan bahwa komponen mata kuliah dasar umum (pendidikan umum) diarahkan untuk melengkapi pembentukan kepribadian bidang dengan pengembangan kehidupan pribadi yang memuaskan, keanggotaan keluarga yang bahagia, dan masyarakat yang produktif. Dalam buku Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan menyatakan bahwa komponen dasar umum diarahkan kepada pembentukan warga Negara pada umumnya dengan kompetensi personal, sosial, serta kultural.

Dalam SK Mendiknas No.008-E/U/1975 menyebutkan bahwa Pendidikan Umum ialah pendidikan yang bersifat umum, yang wajib diikuti oleh semua siswa dan mencakup program Pendidikan Moral Pancasila yang berfungsi bagi pembinaan warga negara yang baik. Pendidikan Umum itu memiliki beberapa tujuan:

1. Membiasakan siswa berfikir objektif, kritis dan terbuka.
2. Memberikan pandangan tentang berbagai jenis nilai hidup, seperti kebenaran, keindahan dan kebaikan.
3. Menjadi manusia yang sadar akan dirinya, sebagai

mahluk, sebagai manusia, dan sebagai pria dan wanita, serta sebagai warga negara.

4. Mampu menghadapi tugasnya, bukan saja menguasai profesinya, tetapi karena mampu mengadakan bimbingan dan hubungan sosial yang baik dalam lingkungannya.

Dengan demikian Pendidikan Umum membina pribadi yang utuh, terampil berbicara, menggunakan lambang dan isyarat, mampu berkreasi dan menghargai hal-hal yang secara menyakinkan estetika, ditunjang oleh kehidupan yang berharga dan disiplin dalam hubungan pribadi dan pihak lain memiliki kemampuan membuat keputusan yang bijaksana, serta memiliki wawasan yang integral.

B. Problematika Pendidikan di Indonesia

Problematika secara etimologi berasal dari kata “problem” yang berarti “persoalan atau permasalahan”. Maka problematika berarti hal-hal yang menimbulkan permasalahan yang belum bisa terpecahkan. Dalam kamus ilmiah populer, problema memiliki arti soal, masalah, perkara sulit dan persoalan.

Problematika pendidikan merupakan hal yang amat penting untuk diketahui hal ini merupakan permasalahan penting suatu negara, oleh karena itu problematika pendidikan disini akan dibahas diantaranya: Dimensi kepemimpinan dan dimensi kesenjangan:

1. Dimensi Kepemimpinan

Dilihat dari perjalanan sejarah pendidikan Indonesia, arah pendidikan disesuaikan dengan keadaan dan kepentingan penguasa, ketika penguasa memerlukan suatu kekuatan politik ke arah itulah pendidikan di arahkan. Bangsa Indonesia, sejak merdeka hingga saat ini mengalami pergantian empat model

kepemimpinan, masing-masing adalah orde lama, orde baru, orde reformasi dan orde sekarang yang banyak pengamat atau pemerhati menyebutnya sebagai era transisi menuju demokrasi. Sedikit atau banyak, tentunya setiap orde memberikan kontribusi dan membantu menentukan corak pendidikan saat ini.

Kalau ditilik lebih dalam aspek politik pendidikan. Pendidikan diorientasikan sebagai alat untuk kepentingan tertentu, seperti kepentingan ideologi dan kepentingan politik untuk mempertahankan status quo bermakna suatu kondisi yang ada saat ini dan sedang berjalan (Sekarang). Misalkan pada masa orde baru pendidikan cenderung dijadikan sebagai alat kekuasaan sehingga menghilangkan esensi dari pendidikan yang sebenarnya. Bahkan pendidikan dijadikan sebagai alat indoktrinasi kepada masyarakat. Sistem pendidikan pada masa orde baru, pelaksanaan pendidikan secara langsung dikendalikan oleh sistem birokrasi dengan mata rantai yang sangat panjang dari tingkat pusat sampai ke daerah bahkan sampai tingkat satuan pendidikan. Kepemimpinan seperti ini tentunya berdampak pada dunia pendidikan, di mana pedoman dan dasar bertindak pendidik tidak lagi mengacu pada profesionalitas melainkan instruksi dari atasan. Kondisi seperti mengakibatkan keberpihakan pada atasan dan menghilangkan hak-hak dan kewenangan profesional. Alhasil pendidikan memproduksi manusia-manusia penurut, tidak berani mengambil Keputusan tidak ada kemandirian karena lebih banyak terpaksa dan kepura-puraan.

Dewasa ini pendidikan nasional merupakan subordinasi dari kekuatan-kekuatan politik praktis. Hal ini berarti pendidikan telah dimasukkan di dalam kancah perebutan kekuasaan oleh partai-partai politik. Pendidikan bukan lagi

untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, tetapi untuk membangun kekuatan dari partai politik praktis tertentu untuk kepentingan golongan atau pun kelompoknya sendiri.

Yang lebih tragis ketika diberlakukannya otonomi daerah yang diiringi dengan otonomi pendidikan, banyak kepala daerah yang mengedepankan sisi subjektivitas dari pada objektivitas dalam menempatkan orang-orang yang profesional di bidang pendidikan. Hal ini berarti dimensi kepemimpinan di daerah juga mempengaruhi pendidikan di tingkat daerah.

Kebijakan otonomi daerah, bagaimanapun akan membawa implikasi yang sangat besar dalam berbagai tatanan pemerintah, baik pusat dan daerah, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Dalam kebijakan desentralisasi pendidikan, pemindahan Kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bukanlah hal yang terpenting, yang penting adalah mendorong terjadinya proses otonomi baik pada pemerintah daerah agar memiliki kemampuan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan adil. Maka dalam hal ini, perlu pengaturan perimbangan kewenangan antara pusat dan daerah, dan masing-masing mempunyai komitmen tinggi untuk mewujudkannya. Sebab berhasil atau tidaknya pelaksanaan otonomi daerah paling tidak ditentukan tiga hal, yaitu (1) adanya *political will dan political commitment* dari pemerintah pusat untuk memberdayakan daerah; (2) adanya iktikad baik dari pemerintah dalam membantu keuangan daerah; (3) adanya perubahan perilaku elit lokal untuk dapat membangun daerah.

Kemudian kalau kita lihat ketika terjadi pergantian menteri hampir selalu dibarengi dengan pergantian kurikulum. Orientasi kurikulum yang diterapkan pun dilandasi oleh

background pendidikan sang menteri. Pergantian kurikulum tersebut memang tidak menjadi permasalahan, karena pergantian kurikulum diharapkan materi pelajaran akan lebih baik dan lebih bermuatan jawaban terhadap tantangan global. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika kurikulum tersebut tidak diimbangi oleh porsi muatan humanisme. Pergantian kurikulum ini juga sebenarnya justru menambah beban tersendiri bagi orang tua dalam hal pembiayaan pendidikan. Karena otomatis jika pergantian kurikulum akan cenderung ganti buku, dan dengan sendirinya pengeluaran terhadap buku anak akan meningkat.

Tidak seorang pun yang dapat membantah pendapat yang menyatakan bahwa pendidikan itu penting. Semuanya sependapat bahwa pendidikan menjadi alat yang amat penting untuk meningkatkan mutu kehidupan. Meski pendidikan penting bagi kehidupan tidak semua orang memiliki komitmen yang sama untuk memajukan pendidikan, khususnya komitmen para pemimpin terhadap pentingnya pendidikan. Inti permasalahan pendidikan di Indonesia adalah rendahnya kesadaran pemimpin bangsa terhadap pendidikan dan rendahnya dana yang dialokasikan untuk pendidikan.

Dalam proses transformasi sosial, transformasi pendidikan Indonesia merupakan suatu keniscayaan. Ke mana arah dan bentuk transformasi pendidikan akan banyak dipengaruhi oleh kepemimpinan. Bangsa kita sudah yang ke tujuh kalinya melakukan pergantian kepemimpinan nasional. Kita tentunya berharap banyak terhadap pemimpin yang baru ini dapat melakukan transformasi pendidikan sehingga problematika di bidang pendidikan dapat terselesaikan paling tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik untuk kemajuan bangsa ini.

2. Kesenjangan Pendidikan

Kesenjangan dalam pendidikan di Indonesia masih terjadi di berbagai hal seperti: sarana prasarana dan sumber daya tenaga pendidik

a. Sarana Prasarana

Terdapat kesenjangan cukup besar terkait kualitas pendidikan antara sekolah yang di kota dan daerah terpencil. Pada umumnya sekolah yang berada di perkotaan lebih baik daripada sekolah di pedesaan Sering kita lihat secara langsung maupun lewat pemberitaan di media televisi dan surat kabar kondisi sekolah di pedesaan dan daerah terpencil yang sangat tidak layak

Kesenjangan yang lain juga pada jumlah dan ketersediaan buku yang,. Ketersediaan buku di daerah perkotaan dan dan daerah terpencil serta perbatasan terjadi kesenjangan baik dari segi jumlah ketersediaan dan kualitas buku. Sementara ketersediaan buku merupakan penunjang pendidikan yang sangat penting karena hal ini akan menunjang keberhasilan proses pendidikan.

Sebagai salah satu kebijakan pendidikan nasional dapat dilaksanakan dengan baik dan terarah. Otonomi pendidikan diharapkan menghasilkan sistem pendidikan yang lebih mandiri, terbuka, demokratis dan maju masih jauh dari tercapai.

b. Tenaga Pendidik

kuantitas dan kualitas guru saat ini, juga merupakan hal yang dilematis. Secara objektif jumlah guru saat ini memang kurang memadai, namun hal ini tidak dapat dipukul rata begitu saja Tetapi harus diakui bahwa jumlah guru yang sedikit salah satu indikator kesenjangan dalam masalah pemerataan guru.

Kesenjangan pemerataan tenaga pendidik ini merupakan pekerjaan yang harus terselesaikan supaya pemerataan guru ini dapat terwujud. Berbagai upaya sudah dilakukan seperti penambahan guru melalui rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), guru kontrak dan memberikan tunjangan khusus bagi guru yang tinggal di daerah terpencil. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah ini tentunya tidak langsung menyelesaikan masalah.

Mengenai kualitas guru, seharusnya juga menjadi prioritas yang diutamakan dalam rangka menyiapkan guru yang kompeten, memiliki skill/kemampuan yang tinggi. Pemerintah diharapkan mengalokasikan dana bagi peningkatan kualitas guru, karena tidak bisa dipungkiri bahwa guru merupakan ujung tombak bagi keberhasilan pendidikan. Hal ini sejalan dengan apa yang tertuang dalam undang-undang guru dan dosen Bab V Pasal 10 yang berbunyi: kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Masalah kompetensi guru adalah masalah serius, untuk itu perlu dilakukan pembinaan secara baik, selain itu juga tentunya guru terus belajar untuk mengembangkan wawasan dan intelektualitas yang pada gilirannya bisa membangun kreativitas guru.

C. Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Menurut kamus besar bahasa indonesia kebijakan berarti kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud

sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan. Menurut kamus besar Oxford, kebijakan berarti “rencana kegiatan” atau pernyataan-pernyataan tujuan ideal. Berikut akan dijelaskan kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia dari masa kemasa:

1. Kebijakan Pendidikan Pada Masa Kemerdekaan Sampai Orde Lama (1945-1969)

Pada masa ini, usaha penting dari pemerintah Indonesia pada permulaan adalah tokoh pendidik yang telah berjasa dalam zaman kolonial menjadi menteri pengajaran. Dalam kongres pendidikan, Menteri Pengajaran dan Pendidikan tersebut membentuk panitia perancang RUU mengenai pendidikan dan pengajaran. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk sebuah sistem pendidikan yang berlandaskan pada ideologi Bangsa Indonesia sendiri. Pemerintah Indonesia berupaya melaksanakan pendidikan nasional yang berlandaskan pada budaya bangsa sendiri. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk menciptakan warga negara yang sosial, demokratis, cakap dan bertanggung jawab dan siap sedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara. Praktek pendidikan selepas penjajahan menekankan pengembangan jiwa patriotisme. Praktek pendidikan tidak bisa dilepaskan dari lingkungan, baik lingkungan sosial, politik, ekonomi maupun lingkungan lainnya.

Tujuan dari pendidikan zaman kemerdekaan adalah untuk mengisi tata kehidupan dan pembangunan. Tujuan tersebut mengalami kendala, yaitu penjajah Belanda ingin menjajah kembali sehingga kondisi ini menuntut kembali bangsa Indonesia berjuang secara politik dan fisik.

Pada kondisi ini, pemerintah mulai mempersiapkan sistem pendidikan nasional sesuai amanat UUD 1945. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) mengeluarkan “Intruksi Umum” agar para guru membuang sistem pendidikan kolonial dan mengutamakan patriotisme. Selanjutnya, diawali dengan Kongres Pendidikan, Menteri PP dan K membentuk Komisi Pendidikan dan komisi ini membentuk Panitia Perancang Undang-Undang (RUU) mengenai pendidikan dan pengajaran. Karena terganggu dengan pecahnya perang kolonial kedua, pembahasan RUU di Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) terhenti dan baru dapat dilaksanakan kembali pada tanggal 29 Oktober 1949. Tanggal 5 April 1950 RUU tersebut diundangkan sebagai UU RI No.4 Tahun 1950 Tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. UU RI No.4 Tahun 1950 ini kemudian diterima oleh DPR pada tanggal 27 Januari 1954, kemudian disahkan oleh pemerintah pada tanggal 12 Maret 1954 dan diundangkan tanggal 18 Maret 1954 sebagai UU No.12 Tahun 1954.

Sekalipun terjadi pergantian bentuk dan konstitusi negara sebagaimana terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara hingga pada akhirnya terbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) yang memberlakukan UUD RIS, Pada saat RIS kembali ke negara kesatuan RI, UUD RIS diganti dengan UUD Sementara RI atau UU No. 7 Tahun 1950, tetapi pendidikan nasional Indonesia tetap dilaksanakan sesuai jiwa UUD 1945, dan bahwa UU RI No.4 Tahun 1950 de facto digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, kebudayaan untuk seluruh daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam UU No 4/1950 Bab II, pasal, tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.

2. Struktur Persekolahan dan Kurikulum Pendidikan Pada Masa Awal Kemerdekaan

Tata susunan persekolahan sesudah Indonesia merdeka yang berdasarkan satu jenis sekolah untuk tiga tingkat pendidikan seperti pada zaman Jepang tetap diteruskan sedangkan rencana pembelajaran pada umumnya sama dan bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pengantar untuk sekolah. Buku-buku pelajaran yang digunakan adalah buku-buku hasil terjemahan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia yang sudah dirintis sejak jaman Jepang. Adapun susunan persekolahan dan kurikulum yang berlaku sejak tahun 1945-1950 adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan Rendah
- b. Pendidikan Guru
- c. Pendidikan Umum
- d. Pendidikan Kejuruan
- e. Pendidikan Teknik
- f. Sekolah Teknik menengah (STM)
- g. Pendidikan Tinggi
- h. Pendidikan Tinggi Republik
- i. Pendidikan Tinggi di Daerah Pendudukan Belanda

3. Pendidikan Masa Orde Lama

Secara umum pendidikan orde lama sebagai wujud interpretasi pasca kemerdekaan di bawah kendali kekuasaan Soekarno cukup memberikan ruang bebas terhadap pendidikan.

Pemerintahan yang berasaskan sosialisme menjadi rujukan dasar bagaimana pendidikan akan dibentuk dan dijalankan demi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang. Pada prinsipnya konsep sosialisme dalam pendidikan memberikan dasar bahwa pendidikan merupakan hak semua kelompok masyarakat tanpa memandang kelas sosial.

Pada masa ini Indonesia mampu mengeksport guru ke negara tetangga, dan banyak generasi muda yang disekolahkan di luar negeri dengan tujuan agar mereka kelak dapat kembali ke tanah air untuk mengaplikasikan ilmu yang telah mereka dapat. Tidak ada halangan ekonomis yang merintangai seseorang untuk belajar di sekolah, karena diskriminasi dianggap sebagai tindakan kolonialisme. Pada saat inilah merupakan suatu era di mana setiap orang merasa bahwa dirinya sejajar dengan yang lain, serta setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Orde lama berusaha membangun masyarakat sipil yang kuat, yang berdiri di atas demokrasi, kesamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara, termasuk dalam bidang pendidikan. Tidak ada nuansa kepentingan politik sektoral tertentu untuk menjadikan pendidikan sebagai alat negara maupun kaum dominan pemerintah:

a. Rentang Tahun 1945-1968

Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda “leer plan” artinya rencana pelajaran. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Sedangkan, asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan “Rencana Pelajaran 1947”, yang baru dilaksanakan pada tahun

1950. Orientasi Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat.

Pada masa tersebut siswa lebih diarahkan bagaimana cara bersosialisasi dengan masyarakat. Proses pendidikan sangat kental dengan kehidupan sehari-hari. Aspek afektif dan psikomotorik lebih ditekankan dengan pengadaan pelajaran kesenian dan pendidikan jasmani. Oleh karena itu, yang lebih penting adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran bela negara.

b. Rencana Pelajaran Terurai 1952

Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut “Rencana Pelajaran Terurai 1952”. Silabus mata pelajarannya jelas sekali, dan seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Pada masa ini memang kebutuhan peserta didik akan ilmu pengetahuan lebih diperhatikan, dan satuan mata pelajaran lebih dirincikan. Namun, dalam kurikulum ini siswa masih diposisikan sebagai objek karena guru menjadi subjek sentral dalam pentransferan ilmu pengetahuan. Guru yang menentukan apa saja yang akan diperoleh siswa di kelas, dan guru pula yang menentukan standar-standar keberhasilan siswa dalam proses pendidikan.

c. Kurikulum 1964

Fokus kurikulum 1964 adalah pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral (Panca wardhana). Mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, emosional/artistik, keterampilan, dan jasmaniah. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Pada kurikulum 1964 ini, arah pendidikan mulai merambah lingkup praksis. Dalam pengertian bahwa setiap pelajaran

yang diajarkan disekolah dapat berkorelasi positif dengan fungsional praksis siswa dalam masyarakat

Berdasarkan UU No 4 tahun 1950 (juncto UU no 12 tahun 1954) dapat dilihat pada beberapa jenis pendidikan dan kegiatannya yaitu:

1. Pendidikan Jasmani
2. Pendidikan Orang Dewasa
3. Pendidikan Luar Biasa
4. Pendidikan Guru
5. Pendidikan kejuruan
6. Pendidikan wanita
7. Pendidikan Agama
8. Pendidikan Tinggi
9. Pendidikan Swasta

4. Pendidikan Pada Masa Orde Baru

Orde baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998, dan dapat dikatakan sebagai era pembangunan nasional. Dalam bidang pembangunan pendidikan, khususnya pendidikan dasar, terjadi suatu loncatan yang sangat signifikan dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Pendidikan Dasar. Namun, yang disayangkan adalah pengaplikasian inpres ini hanya berlangsung dari segi kuantitas tanpa diimbangi dengan perkembangan kualitas. Yang terpenting pada masa ini adalah menciptakan lulusan terdidik sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kualitas pengajaran dan hasil didikan.

Pelaksanaan pendidikan pada masa orde baru ternyata banyak menemukan kendala, karena pendidikan orde baru mengusung ideologi “keseragaman” sehingga memampatkan kemajuan dalam bidang pendidikan. EBANAS, UMPTN, menjadi seleksi penyeragaman intelektualitas peserta didik.

Pemerintah orde baru yang dipimpin oleh Soeharto megedepankan motto “membangun manusia Indonesia seutuhnya dan Masyarakat Indonesia”. Pada masa ini seluruh bentuk pendidikan ditunjukkan untuk memenuhi hasrat penguasa, terutama untuk pembangunan nasional. Siswa sebagai peserta didik, dididik untuk menjadi manusia “pekerja” yang kelak akan berperan sebagai alat penguasa dalam menentukan arah kebijakan negara. Pendidikan bukan ditujukan untuk mempertahankan eksistensi manusia, namun untuk mengeksploitasi intelektualitas mereka demi hasrat kepentingan penguasa.

Kurikulum-kurikulum yang digunakan pada masa orde baru yaitu sebagai berikut:

1. Kurikulum 1968, menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran: kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan.
2. Kurikulum 1975, menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efektif dan efisien berdasar MBO (management by objective). Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), yang dikenal dengan istilah “satuan pelajaran”, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi : tujuan instruksional umum (TIU), tujuan instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar-mengajar, dan evaluasi.
3. Kurikulum 1984, mengusung “process skill approach”. Proses menjadi lebih penting dalam pelaksanaan pendidikan. Peran siswa dalam kurikulum ini menjadi mengamati sesuatu,

mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Learning (SAL).

4. Kurikulum 1994, merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Pada kurikulum ini bentuk operasi kepada siswa mulai terjadi dengan beratnya beban belajar siswa, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya, Kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat.

5. Pendidikan Pada Masa Reformasi

Era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi. Begitu pula bentuk pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik (orde lama) menjadi desentralistik. Pada masa ini pemerintah menjalankan amanat UUD 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja Negara.

Dengan didasarkan oleh UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang diperkuat dengan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka pendidikan digiring pada pengembangan lokalitas, di mana keberagaman sangat diperhatikan. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan satuan pendidikan.

Pendidikan di era reformasi 1999 mengubah wajah sistem pendidikan Indonesia melalui UU No 22 tahun 1999, dengan ini pendidikan menjadi sektor pembangunan yang

didesentralisasikan. Pemerintah memperkenalkan model “Manajemen Berbasis Sekolah”. Sementara untuk mengimbangi kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas, maka dibuat sistem “Kurikulum Berbasis Kompetensi”.

Memasuki tahun 2003 pemerintah membuat UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menggantikan UU No 2 tahun 1989., dan sejak saat itu pendidikan dipahami sebagai: “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Pendidikan di masa reformasi juga belum sepenuhnya dikatakan berhasil. Karena, pemerintah belum memberikan kebebasan sepenuhnya untuk mendesain pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan lokal, misalnya penentuan kelulusan siswa masih diatur dan ditentukan oleh pemerintah. Ada beberapa kesalahan dalam pengelolaan pendidikan pada masa ini, telah melahirkan hasilnya yang pahit yakni:

- a. Angkatan kerja yang tidak bisa berkompetisi dalam lapangan kerja pasar global.
- b. Birokrasi yang lamban, korup dan tidak kreatif.
- c. Masyarakat luas yang mudah bertindak anarkis.
- d. Sumberdaya alam (terutama hutan) yang rusak parah.
- e. Hutang Luar Negeri yang tak bertanggung.
- f. Merajalelanya tokoh-tokoh pemimpin yang rendah moralnya.

Adapun kurikulum-kurikulum yang dipakai pada masa reformasi yaitu sebagai berikut:

1. Kurikulum Berbasis Kompetensi, Pada pelaksanaan kurikulum ini, posisi siswa kembali ditempatkan sebagai subjek dalam proses pendidikan dengan terbukanya ruang diskusi untuk memperoleh suatu pengetahuan. Siswa justru dituntut untuk aktif dalam memperoleh informasi. Kembali peran guru diposisikan sebagai fasilitator dalam perolehan suatu informasi. Kemudian pada kurikulum ini kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi.
2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, tidak jauh berbeda dengan KBK namun perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya.
3. Kurikulum 2013, adalah langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan secara terpadu. Kurikulum 2013 berbasis karakter dan kompetensi lahir sebagai jawaban terhadap berbagai kritikan terhadap kurikulum 2006, serta sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan dunia kerja.

6. Kebijakan Pendidikan Kabinet Kerja

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)

Nadiem Anwar Makarim, menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”. Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Selanjutnya, mengenai ujian UN, tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN untuk terakhir kalinya. “Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter,” jelas Mendikbud.

Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. “Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS,” Sedangkan untuk penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Kemendikbud akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen

Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen.

Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. “Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi.

Sejarah atau *history* keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang didasari oleh konsep-konsep tertentu. Sejarah penuh dengan informasi-informasi yang mengandung kejadian, model, konsep, teori, praktik, moral, cita-cita, bentuk dan sebagainya.

Informasi-informasi di atas merupakan warisan generasi terdahulu kepada generasi muda yang tidak ternilai harganya. Generasi muda dapat belajar dari informasi-informasi ini terutama tentang kejadian-kejadian masa lampau dan memanfaatkannya untuk mengembangkan kemampuan diri mereka. Sejarah telah memberi penerangan, contoh, dan teladan bagi mereka dan semuanya ini diharapkan akan dapat meningkatkan peradaban manusia itu sendiri di masa kini dan masa yang akan datang.

Indonesia dan negara-negara lainnya pada tahap awal perkembangan ekonomi mereka telah mengembangkan sistem pendidikan yang baik dan berdasarkan kebudayaan tradisional. Pada masa kolonial, sistem pendidikan berkembang dengan berdasar pada sistem pendidikan sebelumnya ini. Pada masa modern seperti sekarang, sistem pendidikan yang berlaku juga berdasarkan pengembangan dari sistem pendidikan kolonial.

Dengan kata lain, tinjauan landasan sejarah atau historis Pendidikan Nasional Indonesia merupakan pandangan ke masa lalu atau pandangan retrospektif. Pandangan ini melahirkan studi-studi historis tentang proses perjalanan pendidikan nasional Indonesia yang terjadi pada periode tertentu di masa yang lampau.

Perjalanan sejarah pendidikan di tanah air yang sangat panjang, bahkan semenjak jauh sebelum kita menacapai kemerdekaan pada tahun 1945, baik sebagai aktivitas intelektualisasi dan budaya maupun sebagai alat perjuangan politik untuk membebaskan bangsa dari belenggu kolonialisme, telah diwarnai oleh bermacam-macam corak. Menjelang 64 tahun Indonesia merdeka, dengan system politik sebagai penjabaran demokrasi Pancasila di Era Reformasi ini yang telah mewujudkan pola Pendidikan Nasional seperti sekarang, kita mulai dapat melihat dengan ke arah mana partisipasi masyarakat dalam ikut serta menyelenggarakan pendidikan itu. Semua corak tersebut memiliki pandangan atau dasar pemikiran yang hampir sama tentang pendidikan; pendidikan diarahkan pada optimasi upaya pendidikan sebagai bagian integral dari proses pembangunan bangsa.

Di samping itu, pendidikan memiliki peranan strategis menyiapkan generasi berkualitas untuk kepentingan masa depan. Pendidikan dijadikan sebagai institusi utama dalam upaya pembentuk sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang diharapkan suatu bangsa. Apalagi kini semakin dirasakan bahwa SDM Indonesia masih lemah dalam hal daya saing (kemampuan kompetisi) dan daya sanding (kemampuan kerja sama) dengan bangsa lain di dunia.

Dengan demikian, setiap bidang kegiatan yang ingin dicapai manusia untuk maju, pada umumnya dikaitkan dengan bagaimana keadaan bidang tersebut pada masa yang lampau. Demikian juga halnya dengan bidang pendidikan. Sejarah pendidikan merupakan bahan pembanding untuk memajukan pendidikan suatu bangsa. Masa lampau memperjelas pemahaman kita tentang masa kini. Sistem pendidikan yang

kita miliki sekarang adalah hasil perkembangan pendidikan yang tumbuh dalam sejarah pengalaman bangsa kita pada masa yang telah lalu. Pembahasan tentang landasan sejarah di atas memberi implikasi konsep-konsep pendidikan sebagai berikut:

Pendidikan diharapkan bertujuan dan mampu mengembangkan berbagai macam potensi peserta didik serta mengembangkan kepribadian mereka secara lebih harmonis. Tujuan pendidikan juga diarahkan untuk mengembangkan aspek keagamaan, kemanusiaan, kemandirian, serta kemandirian peserta didik. Di samping itu, tujuan pendidikan harus diarahkan kepada hal-hal yang praktis dan memiliki nilai guna yang tinggi yang dapat diaplikasikan dalam dunia kerja nyata.

Proses pendidikan terutama proses belajar-mengajar dan materi pelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik, melaksanakan metode global untuk pelajaran bahasa, mengembangkan kemandirian dan kerjasama siswa dalam pembelajaran, mengembangkan pembelajaran lintas disiplin ilmu, demokratisasi dalam pendidikan, serta mengembangkan ilmu dan teknologi.

Pendidikan harus juga memajukan kebudayaan nasional. Karena kebudayaan nasional merupakan puncak-puncak budaya daerah dan menjadi identitas bangsa Indonesia agar tidak ditelan oleh budaya global. Inovasi-inovasi harus bersumber dari hasil-hasil penelitian pendidikan di Indonesia, bukan sekedar konsep-konsep dari dunia Barat sehingga diharapkan pada akhirnya membentuk konsep-konsep pendidikan yang bercirikan Indonesia.



BAB IV

PERBANDINGAN PENDIDIKAN ISLAM KONTEMPORER : PENDIDIKAN INTERNASIONAL DAN GLOBAL

A. Pengertian Pendidikan Komparatif

SECARA ETIMOLOGIS, pendidikan komparatif dimaksudkan sebagai ilmu yang mengajarkan tentang tata cara atau prosedur membandingkan dua atau lebih sistem yang berbeda, baik antar daerah maupun antar negara. Istilah pendidikan komparatif sering diucapkan dengan istilah pendidikan perbandingan, karena keduanya memiliki pengertian sama. Pengertian secara terminologis adalah disiplin ilmu yang mempelajari sistem-sistem pendidikan baik dalam satu negara maupun antar negara yang menyangkut: (a) sistem pendidikan formal, non-formal dan informal, (b) teori dan praktek pendidikan, serta (c) latar belakang sosial, ekonomi, politik, ideologi, dan budaya yang mempengaruhi sistem pendidikan.

Pendidikan Komparatif secara harfiah sendiri adalah Ilmu yang mendidik bagaimana cara membandingkan. Yang diperbandingkan dalam ilmu ini adalah praktek dan hasil-hasil penyelenggaraan pendidikan yang terjadi dalam masyarakat. I.L Kandel dalam bukunya “*comparative education*” yang

mengartikan pendidikan komparatif sebagai studi tentang teori dan praktek pendidikan pada waktu sekarang yang dipengaruhi oleh bermacam-macam latar belakang dan merupakan kelanjutan dari sejarah pendidikan. Carter V. Good mengartikan pendidikan komparatif sebagai lapangan yang mempunyai tugas untuk mengadakan perbandingan teori dan praktek pendidikan sebagaimana terdapat pada beberapa negeri dengan maksud untuk mengadakan perluasan pandangan dan pengetahuan tentang pendidikan di luar batas negeri sendiri.

Dalam pendidikan komparatif, hal-hal yang perlu dipelajari adalah kajian-kajian studi yang secara umum mencakup 2 hal penting yaitu studi kawasan, studi ini diarahkan pada kawasan tertentu yang berusaha mempelajari sistem pendidikan di kawasan tersebut. Misalnya studi sistem pendidikan di kawasan asia tenggara, eropa, dan timur tengah. Dan yang kedua adalah studi tematik, studi ini diarahkan pada pengkajian terhadap tema-tema tertentu dalam pendidikan misalnya, manajemen persekolahan, pengembangan kurikulum, mutu input sekolah, otonomi sekolah atau lembaga, privatisasi sekolah, pendidikan pra sekolah, integrasi pendidikan sekolah dan luar sekolah, peningkatan pendidikan guru, dan lain-lain

Keharusan kita mempelajari pendidikan komparatif yaitu agar kita mengerti konsep-konsep dasar dan metode dalam membandingkan aneka sistem baik didalam atau diluar negeri, dapat mengevaluasi keberhasilan dan kekurangan serta mengidentifikasi sesuatu yang bermanfaat atau tidak, dapat mempertimbangkan isu-isu pendidikan dan mengikuti perkembangan pendidikan secara global serta terhindar dari kacamata etnosentrisme sempit, mempereoleh pengetahuan

tentang model-model sistem pendidikan di berbagai negara dan faktor yang mempengaruhi dan melatar belakangi (*national character*) sistem tersebut.

B. Tujuan Pendidikan Komparatif

I.L. Kandel menyebutkan ada tiga tujuan yang ingin dicapai dalam studi pendidikan komparatif yaitu:

1. Repertorial-deskriptif.

Pertama-tama studi dalam pendidikan komparatif berusaha mengungkap-kan data-data yang bersifat informotoris tentang sistem pendidikan pada umumnya maupun pada khususnya. Misalnya data tentang angka partisipasi, jumlah anak putus sekolah, jumlah angka buta huruf, jumlah sekolah negeri dan swasta baik dalam lingkup satu negara maupun dua / lebih negara yang berbeda.

2. Historik-fungsional.

Studi-studi yang telah dilakukan dalam pendidikan komparatif juga berusaha mencari kaitan data-data yang bersifat informotoris pendidikan dengan bidang lain seperti filsafat dan pandangan hidup, sistem politik, sistem ekonomi dan sosial-budaya dari masyarakat itu.

3. Melioristik.

Tujuan pendidikan komparatif yang terakhir adalah dalam rangka mengembangkan pendidikan di dalam negeri sendiri. Setelah mengetahui persamaan dan perbedaan keadaan pendidikan antar negara termasuk dengan negaranya sendiri, maka dapat diambil manfaat dari kebaikan-kebaikan negara lain tersebut. Yaitu kebaikan-kebaikan itu sebisa mungkin dapat diterapkan di negara sendiri dengan beberapa penyesuaian kritis.

Menurut Harold J Noah (1985), dan Dr.Farooq Joubish (2009), pendidikan komparatif memiliki empat tujuan:

1. Untuk menjelaskan sistem pendidikan, proses, atau hasil.
2. Untuk membantu dalam pengembangan lembaga pendidikan dan praktik.
3. Untuk menyorot hubungan antara pendidikan dan masyarakat.
4. Untuk menetapkan pernyataan umum tentang pendidikan yang berlaku di lebih dari satu negara.

C. Pengertian Pendidikan Internasional

Belakangan ini muncul tren di beberapa sekolah yang mengklaim dirinya menerapkan pendidikan internasional. Dengan mengadopsi kurikulum asing dan mendatangkan para pengajar dari negara asal kurikulum, sekolah-sekolah ini berani menyebutkan bahwa kurikulum mereka berkualitas pendidikan internasional. pendidikan inetrnasional adalah pendidikan yang mengaplikasikan sistem terbuka di era global yang mendorong interaksi dengan masyarakat lokal tetapi ilmu pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang diajarkan berwawasan internasional.

Sebenarnya standar pendidikan internasional bukan sekedar pendidikan yang menggunakan bahasa internasional. Bukan hanya pada kulitnya. Harusnya pendidikan internasional bukan melulu mempromosikan penggunaan bahasa asing. Pendidikan internasional harus dimaknai dengan pendidikan yang menjadikan anak didiknya berpikir secara terbuka dan internasional, *open and international minded*. *International minded* dimana di dalamnya para anak didiknya kelak akan menjadi manusia yang 'berwarga negara internasional' atau istilahnya sebagai global citizen. Jadi pendidikan internasional

bukan sekedar kulit belaka, namun lebih pada esensi yang terletak di dalamnya, dalam pembelajarannya.

Dalam pendidikan internasional, kurikulum yang diterapkan boleh-boleh saja kurikulum nasional, tetapi di dalamnya disisipkan pendidikan untuk ber-internasional. Program yang benar-benar program berstandar internasional dalam arti yang sesungguhnya yakni dalam program ini selain menerapkan pelajaran Bahasa Inggris sebagai satu dari mata pelajarannya, Bahasa Ibu, dalam hal ini Bahasa Indonesia- bila diterapkan di Indonesia, masih harus dipakai. Anak didik harus tetap dikenalkan dengan budaya lokal dan harus tetap diajak berpikir tentang apa yang ada di sekitar lokalnya.

Namun pada saat bersamaan, program ini membuat anak didik untuk berpikir secara internasional dengan cara mengajak mereka untuk peduli akan situasi yang ada di dunia luar - *Act locally, think globally*. Juga dengan cara mengajarkan kepada anak didik adanya perbedaan di antara sesama, dan dengan cara menerapkan profil-profil manusia yang mengarah ke dalam kehidupan yang lebih baik. Artinya, anak didik dijejali dengan pendidikan akan hidup dalam suasana damai di dunia, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, diberikan makna perdamaian internasional, dan arah kehidupan yang lebih baik. Bentuk pendidikan semacam ini bukan dalam tingkat pendidikan teori, namun harus diterapkan secara nyata. Dalam pendidikan internasional, para pendidik harus pandai menyelipkan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam semua mata pelajaran dan dalam semua kegiatan secara berkelanjutan. Kegiatan yang dirancang haruslah sedemikian rupa sehingga anak didik tidak hanya belajar ilmu, namun juga belajar nilai.

D. Pengertian Pendidikan Global

Globalisasi telah menghampiri seluruh rakyat di belahan bumi manapun dengan membawa banyak dampak baik positif maupun negatif. Sisi positif dari globalisasi itu berada pada kemajuan teknologi informatika dan teknologi komunikasi. Dampak negatifnya kalau sampai kita hanya menjadi objek suatu arus globalisasi tanpa mampu berbuat. Oleh karenanya perlu banyak persiapan terutama mental guna menghadapi era tersebut. Dalam era tersebut dibutuhkan kemampuan untuk menjaring dan menyaring segala pengaruh yang masuk dari berbagai kebudayaan yang lain

Robert Hanvey (1982, h.5) menyatakan ‘... *a global perspective is not a quantum, something you either have or don't have*’ (perspektif global bukanlah suatu quantum ialah sesuatu yang anda miliki atau belum miliki). Perspektif global merupakan ‘*a blend of many things and any given individual may be rich in certain elements and relatively lacking in others.*’ (suatu paduan dari banyak hal dan individu yang memiliki kekayaan dalam hal tertentu tetapi kekurangan dalam hal lain). Di Amerika Serikat, National Council for Accreditation of Teacher Education mendefinisikan perspektif global sebagai ‘*the view point that accepts the interdependency of nations and people and the interlinkage of political, economic, ecological, and social issues of transnational and global nature*’ (Merryfield, 1997).

Willard M. Kniep (1986) mengemukakan bahwa isi pendidikan global dirumuskan dari realitas sejarah dan kondisi saat ini yang menggambarkan dan menunjukkan dunia sebagai masyarakat global. Dari hasil analisisnya ini, Kniep (1986, h.437) memperkenalkan empat unsur kajian yang dianggap

esensial dan mendasar bagi pendidikan global: (1) kajian tentang nilai manusia (*the study of human values*); (2) kajian tentang system global (*the study of global system*); (3) kajian tentang masalah-masalah dan isu-isu global (*the study of global problems and issues*); (4) kajian tentang sejarah hubungan dan saling ketergantungan antar orang, budaya dan bangsa (*the study of the history of contacts and interdependence among people, cultures, and nations*).

Pendidikan Perspektif Global atau disebut juga pendidikan Global artinya Pendidikan yang membekali wawasan global untuk membekali siswa memasuki era globalisasi sehingga Siswa mampu bertindak lokal dengan dilandasi wawasan global. Pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dan global dalam aspek ekonomi, seni budaya, SDM, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain ke dalam kurikulum sekolah yang akhirnya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik yang dapat dimanfaatkan untuk persaingan global. Pendidikan Global dirasa perlu di sebabkan kemajuan komunikasi & transportasi yang dirasakan dunia semakin sempit, batas negara menjadi buram, proses universalisasi melanda berbagai aspek kehidupan.

E. Tujuan Pendidikan Global

1. Mengembangkan pengertian keberadaan mereka membentuk masyarakat bahwa mereka merupakan anggota masyarakat manusia, bahwa mereka adalah penghuni planet bumi, dan kehidupannya tergantung pada planet bumi tersebut, bahwa mereka adalah partisipan atau pelaku aktif dalam masyarakat global.
2. Mendidik siswa agar mampu hidup secara bijaksana dan bertanggung jawab, sebagai individu, umat manusia,

penghuni planet bumi, dan sebagai anggota masyarakat global.

3. Pendidikan Global menekankan pada: Kesadaran terhadap perspektif global, Memahami sistim-sistim global, Sejarah globalisasi, Saling pengertian terhadap budaya bangsa lain.



BAB V

ASAS KOMPARASI PENDIDIKAN

A. Pengertian Pendidikan Komparatif

MENURUT CARTER v. good tentang pengertian pendidikan komparatif adalah study yang bertugas mengadakan perbandingan teori dan praktik kependidikan yang ada di dalam beberapa negara dengan maksud untuk memperluas pandangan dan pengetahuan di luar batas negerinya sendiri.” Menurut L.Ishak Kandel bahwa Pendidikan komparatif studi tentang teori dan praktek pendidikan pada waktu sekarang yang dipengaruhi oleh bermacam-macam latar belakang dan merupakan kelanjutan dari sejarah pendidikan. Ada juga pengertian secara etimologis. Pendidikan komparatif secara etimologis dimaksudkan sebagai ilmu yang mengajarkan dan melatih tentang tata cara atau prosedur membandingkan dua atau lebih sistem yang berbeda, baik antar daerah maupun antar negara.

Istilah pendidikan komparatif sering diucapkan dengan istilah pendidikan perbandingan, karena keduanya memiliki pengertian sama. Istilah lain selain pendidikan perbandingan ialah perbandingan pendidikan. Pendidikan perbandingan merupakan ilmu yang mengajarkan dan melatih tata cara atau prosedur membandingkan dua sistem pendidikan yang

berbeda. Sedangkan perbandingan pendidikan adalah upaya kegiatan membandingkan, lebih menekankan pada sisi praktis, yaitu kegiatan membandingkan dua sistem pendidikan yang berbeda.

Pengertian secara terminologis atau secara utuh. Pendidikan komparatif secara terminologis adalah disiplin ilmu yang mempelajari sistem-sistem pendidikan baik dalam satu negara maupun antar negara yang menyangkut:

1. Sistem pendidikan formal, non-formal dan informal,
2. Teori dan praktek pendidikan,
3. Latar belakang sosial, ekonomi, politik, ideologi, dan budaya yang mempengaruhi sistem pendidikan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan komparatif adalah lapangan studi yang mempunyai tugas untuk mengadakan perbandingan teori dan praktek pendidikan pada beberapa negeri dengan maksud untuk mengadakan perluasan pandangan dan pengetahuan tentang pendidikan di luar batas negeri sendiri.

B. Masalah-masalah Pendidikan Komparatif

Masalah-masalah pendidikan komparatif diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Persoalan humanisasi akibat pembangunan dan proses industrialisasi. Misal: kemiskinan, gelandangan, dan kriminalitas.
2. Kesenjangan ekonomi, sosial maupun geografis antar kelompok masyarakat.
3. Kendala sosiokultural pada masing-masing bangsa.
4. Dinamika sosial politik dunia yang masih menunjukkan adanya ketimpangan struktural tata dunia baru.

Sedangkan masalah-masalah pendidikan komparatif menurut Har Tilaar, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Merosotnya akhlak peserta didik.
2. Kurangnya pemerataan akses pendidik dan pemerataan kualitas pendidik.
3. Rendahnya mutu pendidik di berbagai jenjang dan jenis pendidik.
4. Rendahnya efisiensi internal sistem pendidik.
5. Rendahnya efisiensi eksternal sistem diklat pendidikan.
6. Kelembagaan diklat yg kaku dan simpang siur.
7. Manajemen diklat nasional yang belum sejalan dengan pembangunan nasional.
8. Sumber daya manusia yg belum profesional.
9. Masih adanya dehumanisasi dlm masyarakat (termasuk dlm pendidikan).

Efisiensi penyelesaian masalah membutuhkan skala prioritas. F. Harbison: penentuan prioritas adalah sesuatu yang menyulitkan. Kesulitannya: pemilihan pada satu program pemecahan masalah akan berimplikasi pada penundaan pemecahan masalah lainnya.

C. Tujuan Pendidikan Komparatif

L. Ishak Kandel menyebutkan ada tiga tujuan yang ingin dicapai dalam studi pendidikan komparatif yaitu:

1. Repertorial-deskriptif
Pertama-tama studi dalam pendidikan komparatif berusaha mengungkapkan data-data yang bersifat informotoris tentang sistem pendidikan pada umumnya maupun pada khususnya. Misalnya data tentang angka partisipasi, jumlah anak putus sekolah, jumlah angka buta huruf, jumlah sekolah

negeri dan swasta baik dalam lingkup satu negara maupun dua/ lebih negara yang berbeda.

2. Historik-fungsional

Studi-studi yang telah dilakukan dalam pendidikan komparatif juga berusaha mencari kaitan data-data yang bersifat informotoris pendidikan dengan bidang lain seperti filsafat dan pandangan hidup, sistem politik, sistem ekonomi dan sosial-budaya dari masyarakat itu.

3. Melioristik

Tujuan pendidikan komparatif yang terakhir adalah dalam rangka mengembangkan pendidikan di dalam negeri sendiri. Setelah mengetahui persamaan dan perbedaan keadaan pendidikan antar negara termasuk dengan negaranya sendiri, maka dapat diambil manfaat dari kebaikan-kebaikan negara lain tersebut. Yaitu kebaikan-kebaikan itu sebisa mungkin dapat diterapkan di negara sendiri dengan beberapa penyesuaian kritis.

Sedangkan menurut Harold J Noah, dan Dr.Farooq Joubish, pendidikan komparatif memiliki empat tujuan:

1. Untuk menjelaskan sistem pendidikan, proses, atau hasil.
2. Untuk membantu dalam pengembangan lembaga pendidikan dan praktik.
3. Untuk menyorot hubungan antara pendidikan dan masyarakat.
4. Untuk menetapkan pernyataan umum tentang pendidikan yang berlaku di lebih dari satu negara.

D. Manfaat Pendidikan Komparatif

Manfaat mempelajari studi pendidikan komparatif diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dapat memiliki konsep-konsep dasar dan metode membandingkan aneka sistem pendidikan baik yang ada dalam satu daerah atau negara maupun antar daerah atau negara.
2. Dapat menilai keberhasilan dan kekurangan atau hal-hal positif dan negatif tentang sistem pendidikan kita sendiri.
3. Dapat menilai isu-isu dan mengikuti perkembangan pendidikan secara global sekaligus dapat menghindari dari penilaian dengan kacamata etnosentrisme sempit.
4. Memperoleh pengetahuan tentang model-model sistem pendidikan di beberapa daerah atau negara. Keberagaman model dan macam sistem pendidikan di beberapa daerah dalam lingkup negara ataupun beberapa negara dalam lingkup dunia, antara lain dipengaruhi oleh latarbelakang daerah atau negara tersebut.

E. Kedudukan Pendidikan Komparatif

Pendidikan komparatif berkedudukan sebagai salah satu ilmu fondasi yang memperkokoh bangunan Ilmu Pendidikan. Sebagai ilmu fondasi, pendidikan komparatif dapat memberikan kontribusi kepada ilmu pendidikan berupa hasil temuan studi perbandingan antar sistem pendidikan baik dalam satu negara maupun antar negara. Paling tidak ada dua temuan studi yang diidentifikasi secara awam tentang sumbangan ilmu ini, yaitu: 1) Penemuan pola-pola umum penyelenggaraan pendidikan sebagai trend pendidikan dunia, dan 2) Peretasan aneka tipologi pendidikan yang berlangsung di banyak kawasan dunia. Kesemua hasil temuan pengkajiannya tersebut dapat memperkaya khazanah pengetahuan dari Ilmu Pendidikan.

Menurut Van Cleve Morris, terdapat dua rumpun ilmu fondasi yang selalu memberikan kontribusi kepada ilmu

pendidikan. Kedua rumpun disiplin ilmu fondasi tersebut adalah 1) Philosophical and historical foundations of education, dan 2) Sociological and psychological foundations of education. Sebagai konsekuensi dari dua rumpun ilmu fondasi tersebut selanjutnya berkembang empat macam ilmu fondasi, yaitu: 1) Filsafat pendidikan, 2) Sejarah pendidikan, 3) Sosiologi pendidikan dan 4) Psikologi pendidikan.

Perkembangan berikutnya, ilmu fondasi yang menopang bangunan ilmu pendidikan tidak cukup dengan empat bidang ilmu diatas, akan tetapi berkembang lebih banyak lagi. Sebagaimana dikemukakan Frank H. Blackington dan Robbert S. Patterson yang menyebut pendidikan komparatif sebagai fondasi ilmu pendidikan. Dengan demikian, fondasi ilmu pendidikan menurutnya menjadi sebagai berikut : 1) Filsafat pendidikan, 2) Sejarah pendidikan, 3) Ekonomi pendidikan, 4) Politik pendidikan, 5) Sosiologi pendidikan, 6) Antropologi pendidikan, 7) Psikologi Pendidikan, 8) Aestetika pendidikan, 9) Pendidikan komparatif.

F. Cakupan Studi Pendidikan Komparatif

Kajian-kajian studi dalam mempelajari ilmu pendidikan komparatif secara umum mencakup dua hal penting, yaitu : studi Area dan studi tematik dalam bidang pendidikan.

1. Studi Area

Studi ini diarahkan pada suatu wilayah tertentu yang berusaha mempelajari sistem pendidikan dengan memperhatikan konteks ekonomi, sosial, politik dan budayanya. Satu arca dapat mencakup satu negara atau beberapa negara yang menjadi sasaran studi. Misalnya studi sistem pendidikan di area Asia Tenggara yang mencakup beberapa negara

seperti Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam, Philipina, Thailand, Kamboja, Vietnam, Myanmar, Laos dan Indonesia, atau area ujung Malaka saja yang hanya mencakup negara Malaysia saja atau Singapura saja. Bisa juga studi area dalam batas-batas negara Brunai Darussalam.

2. Studi tematik

Studi tematik ini lebih diarahkan kepada pengkajian terhadap tema-tema tertentu dalam pendidikan. Misalnya tema : manajemen kelembagaan sekolah, pembaharuan kurikulum, mutu lulusan sekolah, otonom lembaga pendidikan, privatisasi perguruan tinggi, pendidikan pra sekolah, integrasi pendidikan sekolah dan luar sekolah, peningkatan mutu guru, pemberdayaan organisasi profesi pendidik, pengayaan sumberbelajar dan lain lain.

Dua cakupan studi diatas merupakan keluasan batas-batas kajian yang umumnya dilakukan para ahli pendidikan komparatif. Kedua cakupan tersebut bukan merupakan pilihan akan tetapi juga bisa dilakukan secara bersamaan untuk studi studi komparatif dalam pendidikan.

G. Asas-asas Komparabilitas

Asas-asas komparabilitas adalah sebagai berikut:

1. Dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat)
2. Dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi);
3. Hukum dasar. Komparabilitas adalah kesebandingan.

Asas komparabilitas adalah metode penelitian atau penulisan dengan membandingkan berbagai aspek dalam pendidikan. Misalnya tujuan pendidikan nasioanl, biaya, proses, evaluasi, dan sebagainya. Asas komparabilitas juga

dapat diartikan sebagai perbandingan konsep mendasar dalam sebuah sistem pendidikan dan pengajaran yang diajukan acuan lainnya.

H. Syarat Komparabilitas

Secara umum di dalam ilmu pendidikan komparatif dikenal adanya syarat kesebandingan (*comparability*) di dalam upaya membandingkan dua atau lebih sistem pendidikan. Persyaratan adanya kesebandingan atau komparabilitas ini diperlukan agar upaya perbandingan aneka sistem pendidikan yang dilakukan pada akhirnya akan diperoleh kebermanfaatannya yang tinggi. Bila ada seseorang yang berupaya membandingkan sistem pendidikan di Indonesia dengan Amerika Serikat, jelas tidak akan mendapatkan banyak kemanfaatan, mengingat kedua negara sudah jelas-jelas banyak perbedaan. Jika ini tetap dilakukan, meskipun nantinya mampu menghasilkan banyak rekomendasi dari studi perbandingan tersebut, pada akhirnya tidak akan banyak yang dapat diterapkan dalam rangka memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Hal tersebut berbeda bila studi perbandingan pendidikan dilakukan dengan cara membandingkan antara pendidikan di Indonesia dengan Malaysia, yang sudah tentu terdapat banyak kemiripan serta relatif sedikit perbedaan. Diantara segi-segi perbandingan atau komparabilitas dalam melakukan studi komparasi sistem pendidikan antar dua negara atau lebih yang berbeda adalah:

1. Segi kemajuan pembangunan. Beberapa negara yang akan diperbandingkan adalah sama-sama negara maju, kaya atau sama-sama negara berkembang atau miskin.
2. Segi latar belakang sejarah. Misalnya negara yang sama-sama bekas jajahan. Lebih tepat jika negara-negara yang diperbandingkan adalah negara-negara yang pernah dijajah

oleh negara yang sama. Misalnya Malaysia dan Philipina yang pernah dijajah oleh Inggris.

3. Segi latar belakang ekonomi. Misal sama-sama berpendapatan perkapita rendah atau sama-sama negara yang masih mengandalkan hasil pertanian, sama-sama negara penerima pinjaman luar negeri dari donor (IMF, WORLD BANK).
4. Segi letak geografisnya. Misal sama-sama negara yang terletak di kawasan ASEAN atau sama-sama negara Afrika Barat, atau juga sama-sama negara di belahan selatan.

Dari beberapa segi kesebandingan di atas, menurut para ahli jelas akan lebih layak untuk diperbandingkan dan akan banyak memperoleh kebermanfaatannya. Akan sangat sulit bila seseorang memperbandingkan dua sistem pendidikan di dua negara yang memiliki latar belakang kultural, sosial, politik dan ekonomi yang secara mencolok berbeda.

Ada satu hal penting lagi antar dua atau lebih negara yang berbeda, yaitu dua dimensi yang perlu ditentukan yaitu dimensi ruang dan dimensi waktu. Dimensi ruang menyangkut seberapa luas atau banyak negara yang ingin diteliti atau diperbandingkan. Sedangkan dimensi waktu menyangkut periode waktu atau rentang waktu yang perlu ditentukan terlebih dahulu. Penentuan dimensi ruang dan dimensi waktu ini penting supaya studi perbandingan bisa lebih terfokus dan tidak mengimbas kemana-mana.



BAB VI

METODOLOGI KOMPERASI PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGANNYA

A. Pengertian Metode Pendekatan Studi dalam Komperasi Pendidikan

KOMPARATIF MEMILIKI arti dalam kelas adjektiva atau kata sifat sehingga komparatif dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik Berkenaan atau berdasarkan perbandingan. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata komparatif adalah berkenaan atau berdasarkan perbandingan.

Pendidikan komparatif sebagai disiplin ilmu terus menunjukkan perkembangan. Sejalan dengan itu pula, pendidikan komparatif banyak diminati orang dari berbagai aspek kependidikan, dengan tujuan untuk mempelajari sistem pendidikan di tempat lain, agar hal positif dari sistem pendidikan di tempat lain dapat diadopsi dan diterapkan dalam tempatnya sendiri.

Kalau kita pertanyakan adakah hubungan antara pendidikan komparatif dengan metodologi, tentu ada keterkaitan diantara keduanya. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa tujuan pelaksanaan pendidikan komparatif yakni

mempelajari sistem pendidikan di tempat lain itu melewati proses pengamatan yang membutuhkan metode-metode yang cocok untuk digunakan. Diperkuat lagi dengan pernyataan bahwa pendidikan komparatif diminati banyak orang dari ahli dalam bidangnya pendidik, sampai pejabat-pejabat dalam perencanaan dan kerjasama regional dan internasional dalam bidang pendidikan. Atas dasar kenyataan ini, maka pendidikan perbandingan membutuhkan metode-metode yang bervariasi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa metode pendidikan perbandingan adalah cara apa yang diterapkan oleh disiplin pendidikan perbandingan dalam menyusun dan mengkaji objek atau sasaran yang menjadi bidang garapannya. Metodologi tidak lebih dari pengkajian terhadap aturan langkah-langkah dalam melaksanakan metode ilmiah

B. Metode-metode Studi dalam Komparasi Pendidikan

Menurut Debold Van Dalen dalam "*Understanding Educational Research*" menyebutkan metode ilmiah yang lazim digunakan dalam studi-studi pendidikan komparatif adalah: (1) historis, (2) deskriptif, (3) eksperimen, (4) filosofis.

1. Metode Historis

Metode historis ini digunakan untuk menemukan fakta-fakta pendidikan yang sudah lampau dalam rangka mencari keterkaitan dengan kondisi pendidikan sekarang. Metodologi historis dalam pendidikan adalah suatu wahana sistematis, serta objektif, menilai, dan menafsirkan bukti-bukti tentang kejadian-kejadian pendidikan masa lampau untuk dapat dimengerti pada masa sekarang.

Bagi pendidikan perbandingan metode Historis dapat digunakan untuk memenuhi sebagian dari kebutuhannya, yaitu mengenai latar belakang historisnya atau bila yang diperbandingkan itu mengenai sejarah pendidikan negeri-negeri tertentu. Jalan yang ditempuh oleh metode historis ini adalah:

1. Memilih problem yang akan diteliti
2. Mengumpulkan sumber-sumber bahan (*sources materials*)
3. Penilaian dan pengujian sumber-sumber data yang terkumpul, kemudian dilanjutkan penyajian
4. Menentukan hipotesis untuk menjelaskan hakekat dari fenomena-fenomena pendidikan yang sudah lampau
5. Melakukan penafsiran atas bahan-bahan yang telah terkumpul secara mendalam atau juga penyusunan bahan-bahan
6. Menyimpulkan dan membuat laporan mengenai temuan-temuannya.

Sumber bahan yang paling dekat dalam penelitian dengan metode historis adalah dokumen-dokumen, antara lain seperti :

1. Peninggalan material: fosil, piramida, senjata, perkakas rumah tangga, perhiasan, bangunan, benda-benda budaya
2. Peninggalan tertulis: papyrus, daun (lontar) bertulis, kronik, relief, candi, catatan khusus, buku harian, arsip negara, dll
3. Peninggalan tak tertulis: adat istiadat, bahasa, dongeng, dan kepercayaan.

2. Metode Deskriptif

Metode deskriptif dilakukan dengan cara menggambarkan dan menguraikan apa adanya yang terjadi pada objek yang diteliti secara mendetail. Jadi, tujuan utama metodologi deskriptif adalah menerangkan apa adanya. Metode penelitian

jenis dekriptif ini mencakup beberapa metode, antara lain: (1) studi kasus; (2) survey, (3) studi perkembangan, (4) studi tindak lanjut, (5) analisis dokumen, (6) studi korelasi, dan (7) studi aliran atau trend.

Metode deskriptif dalam pendidikan komparatif bertujuan untuk menggambarkan suatu fakta-fakta pendidikan baik dalam satu negara maupun antar negara. Bisa menyangkut sistem pendidikan secara umum maupun menyangkut bagian per bagian dalam sistem pendidikan, misalnya: kurikulumnya, kondisi siswanya, tenaga kependidikannya, pendanaanya, dll.

3. Metode Eksperimen

Metode eksperimen merupakan salah satu metode dalam penelitian ilmiah yang dilakukan dengan cara menspesifikasi obyek yang diteliti melalui tindakan mengeliminasi variabel-variabel yang ada dari variabel lain. Dengan kata lain metode eksperimen dilakukan dengan cara mendudukan obyek penelitian yang spesifik dalam suatu totalitas yang terkontrol.

Tujuan utama metodologi eksperimen adalah untuk menentukan apa yang dapat terjadi dari percobaan yang telah dilakukan. Misalnya, pengaruh peningkatan pendanaan terhadap peningkatan mutu sekolah, pengaruh penggunaan metode tugas terhadap peningkatan prestasi belajar, dll.

4. Metode Filisofis

Berfikir filosofis adalah tindakan berfikir yang mendasar, sistematis, dan universal. Dalam hal ini metode filosofis berusaha menemukan prinsip-prinsip atau konsep-konsep yang mendasar tentang sistem pendidikan disuatu negara atau beberapa negara. Dengan metode filosofis ini, akan dapat ditemukan sekaligus dipahami aneka sistem dan praktek

pendidikan secara mendalam dan menyeluruh beserta alasan dan pertimbangan rasionalnya.

Pada hakekatnya metode filosofis terdiri dari dua jenis analisa yaitu *analisa linguistik* dan *analisa konsep*. *Analisa linguistik* yang dapat disebut sebagai analisa bahasa, berusaha untuk menemukan makna sesungguhnya dari sesuatu. Misalnya, tentang mencari perbandingan antara filsafat pendidikan dan filsafat pendidikan guru. Kemudian terdapat titik terang bahwa filsafat pendidikan guru merupakan bagian dari filsafat pendidika. *Analisa Konsep* atau analisa aliran digunakan untuk mempelajari kecepatan dan arah perubahan-perubahan dan menggunakan kesemuanya ini untuk memperkirakan atau meramalkan keadaan yang akan datang. Misalnya, pendidikan selalu berkepentingan dengan manusia. Maka dari hal ikhwal yang mengenai kependudukan akan memiliki permasalahan kuantitatif dalam bidang pendidikan.

5. Metode Ex Post Facto

Metode *Ex Post Facto* dikemukakan oleh Donald Ary dan kawan-kawan dalam "*Introduction to Research in Education*". Metode ilmiah yang berjenis *ex post facto* dilakukan dengan cara melihat obyek spesifik yang diteliti yang sudah dieliminasi dari variabel atau faktor lain tetapi tidak melalui percobaan-percobaan yang dilakukan peneliti, akan tetapi melalui kejadian-kejadian yang sudah terjadi di masyarakat.

Jenis penelitian *ex post facto* ini sebenarnya sama dengan jenis penelitian eksperimental, perbedaannya *ex post facto* objek kejadiannya sudah terjadi. Sedangkan pada eksperimental kejadiannya dirancang dan direkayasa oleh peneliti sendiri.

Kelebihan yang dimiliki metode ini adalah Peneliti dapat melihat akibat dari suatu fenomena dan menguji hubungan sebab akibat dari data-data yang tersedia. Dan kelemahannya penelitian tersebut tidak mempunyai kontrol terhadap variabel bebas. Peneliti hanya berpegang pada penampilan variabel sebagaimana adanya, tanpa kesempatan mengatur kondisi ataupun mengadakan manipulasi terhadap beberapa variabel.

6. Metode Area

Metode Area dapat dilakukan pada satu desa (*village*) atau propinsi (*province*) tertentu bahkan dapat lebih luas lagi yaitu negara. Studi area dapat dilakukan dengan cara : (a) studi latar belakang negara, (b) deskripsi sistem pendidikan pada masing-masing negara tersebut, (c) menarik interpretasi.

7. Metode Komparasi

Metode komparasi, yaitu metode yang dilakukan dengan area wilayah yang lebih sempit misalnya hanya dua desa atau propinsi atau kawasan atau negara tetapi dengan tekanan pada studi yang mendalam.

Metode komparasi atau perbandingan adalah penelitian pendidikan yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. Objek yang diperbandingkan dapat berwujud tokoh atau cendekiawan, aliran pemikiran, kelembagaan, manajemen maupun pengembangan aplikasi pembelajaran.

C. Pengembangan Metode dalam Melakukan Komperasi Pendidikan

Keragaman metode yang dipakai dalam melakukan studi komparasi pendidikan telah mendorong beberapa ahli untuk

mengembangkan metode yang secara relatif lebih spesifik dapat digunakan lebih untuk melakukan studi komparasi pendidikan. Beberapa metode sebagaimana telah disebutkan memiliki kelebihan yang beragam sekaligus kelemahannya. Untuk itu George ZF. Bereday (1964) sebagai profesor di bidang Pendidikan Komparatif dari Columbia University Amerika Serikat mengembangkan satu metode yang disebut dengan Metode Induktif Komparasi. Metode ini menurut George ZF. Bereday (1964) memiliki langkah-langkah prosedural yang meliputi:

1. Penggalan data

Penggalan data yang baik adalah dengan cara datang ke lokasi penelitian lalu berdiam atau tinggal beberapa waktu di lokasi tersebut agar bisa merekam lebih lengkap data yang dicari. Untuk mempertajam kepekaan atas data, maka peneliti perlu menguasai bahan dan fokus yang diamati. Hal yang lebih penting lagi adalah peneliti perlu waspada dan bisa membatasi yang mungkin akan terjadi.

2. Deskripsi data

Pendeskripsian data dilakukan dengan cara menyajikan semua data yang diperoleh menurut kelompok-kelompok data berdasarkan klasifikasi yang dibuat dalam bentuk tabel, teks atau uraian, serta peta. Deskriptif data adalah merupakan gambaran data yang digunakan dalam suatu penelitian. Dalam pengujian deskripsi data ini peneliti mencoba untuk mengetahui gambaran atau kondisi responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

3. Interpretasi

Setelah data-data disajikan menurut pengelompokannya maka peneliti perlu melakukan langkah selanjutnya yakni interpretasi atau penafsiran atas data yang telah tersaji.

Upaya penafsiran data ini dilakukan dengan cara melakukan analisis konteks, baik analisis aspek historik, aspek politik, aspek ekonomik, maupun aspek sosial. Dalam arti bahwa mengkaitkan data-data yang ada dengan konteks masyarakat yang berupa informasi historik, politik, ekonomik, dan sosial. Contoh informasi historik adalah isi catatan masa lalu bangsa tersebut yang antara lain pernah dijajah oleh bangsa Eropa; pernah berjuang merebut kemerdekaannya dengan pengorbanan harta, benda, dan nyawa yang tidak sedikit; masyarakatnya pernah terkotak-kotak terbagi menjadi beberapa bagian yang saling bertikai kemudian bersatu menjadi negara kesatuan, dan lain-lain.

4. Juxtaposisi atau Komparasi Awal

Pada tahap ini yang perlu dilakukan adalah menyusun sebuah kerangka kerja perbandingan secara umum (*common comparative framework*) Kegiatan ini dapat diartikan juga upaya menentukan dimensi-dimensi komparasi, yaitu menentukan hal-hal apa yang akan dikomparasikan. Beberapa aspek yang dapat dikomparasikan misalnya tentang informasi umum pendidikan, inisiatif reformasi pendidikan, tujuan reformasi, kesempatan penduduk bersekolah; pola uji coba reformasi, prosedur implementasi, deskripsi reformasi, hasil pasca reformasi, dan sumber-sumber terpilih. Masing-masing dimensi komparasi yang berisi informasi data pendidikan dari dua daerah atau negara yang berbeda yang siap diperbandingan.

5. Perumusan Hipotesis

Kegiatan ini merupakan cara untuk menemukan hasil komparasi yang masih bersifat sementara setelah peneliti melakukan kegiatan juxtaposisi. Perumusan hipotesis komparasi berisi pernyataan-pernyataan perbandingan

pendidikan antara dua daerah atau negara yang diperbandingkan, baik berupa persamaan maupun berupa perbedaan.

6. Komparasi Final

Kegiatan komparasi final dilakukan dengan cara menganalisis secara cermat dan mendalam perbandingan pendidikan antara dua daerah atau negara dalam rangka mencari dan menemukan dua hal, yaitu: persamaan dan pertidaksamaan. Penemuan Persamaan akan melahirkan generalisasi dan penemuan ketidaksamaan akan memunculkan tipologi. Kegiatan ini harus cermat menganalisa data karena banyakngkut dua daerah atau Negara, sama atau tidak sama akan menimbulkan generalisasi dalam penelitian.



BAB VII

LATAR BELAKANG, KONSEP PENDIDIKAN, PROBLEMATIKA DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI NEGARA ASIA

A. Pendidikan di Malaysia

1. Latar Belakang Pendidikan di Malaysia

DAHULU NEGARA Malaysia belajar ke Indonesia. Mereka pergi ke Indonesia untuk mendapatkan ilmu dari ilmuwan di Indonesia. Akan tetapi, sangat memilukan saat ini pendidikan negara Malaysia jauh lebih maju dibandingkan dengan negara Indonesia. Tahun 1970 Malaysia sudah telah menganggarkan dana pendidikan sebesar 25% dari anggaran negara untuk pendidikan sehingga pada tahun tersebut guru-guru di Malaysia dikirim ke Indonesia untuk belajar di Indonesia. Sebagaimana dirangkum U.S News & World Report tentang peringkat sistem pendidikan terbaik negara-negara di dunia tahun 2021, Malaysia menempati peringkat 38 dari 73 negara dan Indonesia peringkat 55 dari 73 negara. Pada tingkat Asia tenggara Malaysia berada pada urutan ke-2 setelah Singapura dan Indonesia urutan ke-4 setelah Thailand.

Secara historis negara Malaysia pernah menjadi bagian dari wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Hal ini terjadi pada masa kerajaan Sriwijaya pada abad ke 12 M.

selain itu negara Malaysia juga pernah menjadi bagian dari kerajaan Majapahit pada tahun 1293- 1500 M. Maka bahas dan beberapa kebudayaan hamper mirip dengan Indonesia. Dan pada saat kerajaan Majapahit mengalami kemunduran maka wilayah Malaysia lepas dan muncul kerajaan baru yaitu kesultanan Malaka pada awal abad ke 16.

Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari tiga belas negeri (negara bagian) dan tiga wilayah federal di Asia Tenggara dengan luas 330.803 km persegi. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Federasi Malaysia adalah sebuah monarki konstitusional. Kepala negara persekutuan Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong, biasa disebut Raja Malaysia. Yang di-Pertuan Agong dipilih dari dan oleh sembilan Sultan Negeri-Negeri Malaya, untuk menjabat selama lima tahun secara bergiliran.

Jumlah penduduk Malaysia pada bulan Juli 2014 berjumlah 30.073.353. Penduduk Malaysia lebih sejahtera dibandingkan Indonesia. Sementara, berkaitan dengan sumber daya alam antara Indonesia dan Malaysia, mempunyai sumber daya alam yang sama yang terdiri dari minyak bumi, gas alam, timah, tembaga, kayu dan bauksit. Begitu juga halnya dengan bidang pertanian yang terdiri dari minyak sawit, beras, kakao, dan karet. Sedangkan, dalam hal produk peternakan dan pertanian yang terdiri unggas, daging sapi, udang, kopi, jamu, minyak esensial, ikan dan rempah-rempah, bahwa Indonesia lebih unggul dibandingkan dengan Malaysia. Adapun dilihat dari industri, Indonesia dan Malaysia hanya mengandalkan industri tekstil, pakaian, alas kaki, otomotif, semen, makanan olahan, perhiasan dan pariwisata. Malaysia memiliki keunggulan

dalam hal industri semi konduktor yang mana di Indonesia masih belum memiliki. Suku di Malaysia terdiri dari Suku Melayu dengan mencapai 62%, China 8% dan sisanya terdiri dari Suku India dan suku lainnya.

Sebelum kedatangan penjajah, sistem pendidikan agama Islam yang diajarkan oleh ulama atau guru agama di Malaysia berlandaskan kitab suci al-Qur'an dan hadis yang diajarkan pada tempat yang sederhana atau tradisional, seperti surau, masjid, majlis khalifah, kuttab, istana dan rumah ulama. Sistem pelajaran yang diajarkan kepada rakyat-rakyat Malaysia adalah sistem hafalan ayat-ayat al-Qur'an, doa dan mata pelajaran lainnya yang berkaitan dengan agama. Kemudian, mengajarkan tentang asas-asas Islam seperti tauhid, fiqih, sejarah nabi, tasawuf, al-Qur'an dan lain sebagainya. Warnawarni dalam perbedaan pandangan terhadap Islam sehingga ikut juga melahirkan golongan tasawuf yang melahirkan institusi pendidikan pada waktu itu. Selain itu juga, istana yang dimiliki raja Malaysia dijadikan sebagai tempat perpustakaan dan untuk menyalin menterjemahkan kitab dari bahasa Arab dan Parsi yang dirubah menjadi kata Melayu.

Pada masa ini, pendidikan di Malaysia diwarnai dengan latar belakang peran atau tokoh penting dalam memberikan pendidikan kepada rakyat Malaysia, tokoh penting tersebut adalah raja dan agama raja adalah Islam, maka pendidikan yang diberikan tidak terlepas dari agama Islam, sehingga untuk mendukung kesuksesan dari pendidikan tersebut, raja Malaysia rela untuk menjadikan tempat istananya sebagai tempat pembelajaran agama Islam bagi rakyat.

Tahun 1511 Malaysia mulai kedatangan penjajah, Portugis (1511 M-1641 M), Belanda (1641 M-1786 M) dan Inggris

(1786 M-1957 M). Kaum penjajah yang datang ke negara Malaysia disatu sisi mengambil kekayaan yang ada pada negara Malaysia, tetapi disisi lain membawa paham keagamaan yang berbeda dan sistem pendidikan yang berbeda juga. Namun, walaupun paham keagamaan yang bertolak belakang dengan rakyat Malaysia dari Suku Melayu, tetapi tidak menyurutkan sama sekali dari paham agama yang dibawa oleh kaum penjajah, sementara dalam hal pendidikan ternyata terkena imbasnya bagi rakyat Malaysia sehingga pendidikan Islam telah diwarnai oleh kaum penjajah yang bersangkutan.

Di antara kaum penjajah di Malaysia yang paling banyak membawa pengaruh dari sistem pendidikan Islam di Malaysia adalah Inggris. Inggris bukan hanya membawa paham yang sekular, tetapi juga telah menguasai sistem kerajaan dari kekuasaan Sultan di Malaysia, sehingga sistem kerajaan terbagi menjadi dua golongan. Pertama, sistem kerajaan hanya berkuasa dalam bidang agama Islam dan adat istiadat pada rakyat Malaysia. Kedua, secara keseluruhan yang bukan berkaitan dengan agama Islam dan adat resam budaya Melayu, maka dikuasi oleh kaum Inggris yang mana Inggris telah melantik residen dan pesuruh jaya tertinggi untuk mengontrol negara tersebut dari rakyat Malaysia juga. Dengan adanya kekuasaan yang penuh bagi kaum Inggris dan dibantu juga oleh residen-residennya (kalau di Indonesia disebut Menteri), maka pendidikan Islam sudah diwarnai oleh dualisme. Para ulama di Malaysia sangat tidak mendukung dari sistem pendidikan yang diajarkan oleh kaum Inggris, sehingga golongan ulama dan tokoh pendidik Islam telah membuat inisiatif sendiri untuk menyelenggarakan pendidikan Islam tanpa bantuan dari pemerintah, sehingga pada waktu itu sistem pendidikan terdiri dari dua, yakni sistem pendidikan tradisional yang dikenal

dengan pondok dan sistem sekolah yang dikenal dengan madrasah. Bagi lembaga pendidikan yang memakai sistem ala pendidikan Inggris, maka mendapat bantuan biaya dari Inggris, sementara yang tidak melakukan sistem pendidikan ala Inggris, maka tidak mendapatkan bantuan sama sekali.

2. Konsep Pendidikan di Malaysia

Dasar pendidikan di Malaysia adalah “Dasar pendidikan kebangsaan”. Dasar pendidikan ini diterapkan sejak tahun 1957. Dasar pendidikan di Malaysia memiliki 3 tujuan dasar pendidikan *Pertama*, tujuan dasar pendidikan diadakan adalah untuk mewujudkan satu sistem pelajaran yang dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik. *Kedua*, untuk menghasilkan pelajar yang berdisiplin serta mematuhi dan menghormati kedua ibu bapak mereka di mana prinsip ini sejajar dengan dasar dan polisi pendidikan untuk mengadakan proses pengajaran dan pembelajaran yang cekap dan efisien dengan keperluan untuk mengelakkan perbelanjaan awam yang tidak tersusun. *Ketiga* bertujuan untuk memastikan agar dasar ini dapat dilaksanakan dengan berkesan khususnya dalam menentukan perkembangan sistem pendidikan yang progresif dan bahasa kebangsaan dijadikan sebagai bahasa pengantar yang utama.

Tujuan pendidikan di Malaysia adalah mengembangkan potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu secara menyeluruh dan terpadu untuk mewujudkan manusia yang seimbang dan harmonis dari segi intelektual, ruhani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Tujuan ini diharapkan mampu melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, memiliki keterampilan,

berakhlak mulia, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan Negara.

Penerapan kurikulum pendidikan Islam di Malaysia tidak berbeda jauh dengan pendidikan Islam di Indonesia, yaitu kurikulum pendidikan Islam yang mengandung dua kurikulum inti sebagai kerangka dasar operasional pengembangan kurikulum, yaitu: tauhid sebagai unsur pokok yang tidak dapat diubah dan perintah membaca ayat-ayat Alquran. Prinsip umum yang menjadi dasar kurikulum pendidikan Islam di Malaysia adalah:

1. Adanya pertautan yang sempurna dengan agama, termasuk ajaran-ajaran dan nilai-nilainya.
2. Prinsip menyeluruh (universal) pada tujuan-tujuan dan kandungan-kandungankurikulum.
3. Keseimbangan yang relatif antara tujuan dan kandungan-kandungan kurikulum.
4. Perkaitan dengan bakat, minat, kemampuan-kemampuan dan kebutuhan pelajar dan juga dengan alam sekitar, fisik, dan sosial tempat pelajar itu hidup berinteraksi.
5. Pemeliharaan atas perbedaan-perbedaan individu di antara pelajar dalam bakat-bakat, minat, kemampuan, kebutuhan, dan perbedaan lingkungan masyarakat.
6. Penyesuaian dengan perkembangan dan perubahan yang berlaku dalam kehidupan.
7. Pertautan antara mata pelajaran, pengalaman, dan aktivitas yang terkandung dalam kurikulum, dan pertautan antara kandungan kurikulum dengan kebutuhan murid dan kebutuhan masyarakat tempat murid itu tinggal.

Berdasarkan Laporan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan (1979), Rancangan

Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) mulai dilaksanakan di semua sekolah rendah di seluruh negara mulai tahun 1983. Rancangan KBSR ini menekankan penguasaan terhadap kemahiran asas 3M yaitu membaca, menulis dan menghitung. Selain itu samping itu juga, ia juga memberi tumpuan terhadap perkembangan individu secara menyeluruh yang meliputi aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial (JERIS). Pada tahun 1989, Rancang Rancangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) juga diperkenalkan di semua sekolah menengah. KBSM ini dirancang untuk memperkembangkan potensi individu daripada aspek JERIS secara menyeluruh dan berpadu dalam usaha untuk melahirkan pelajar yang berilmu, berakhlak mulia serta berupaya memberi sumbangan kepadakemajuan, kesejahteraan serta pembangunan negara.

Kurikulum pendidikan di Malaysia ditetapkan oleh kementerian pelajaran Malaysia. Kurikulum pendidikan di Malaysia relatif stabil. Kurikulum pendidikan tingkat sekolah dasar misalnya (KBSD) yang berjalan dari tahun 1982 sampai tahun 2007 masih digunakan. Hal yang unik lagi dalam Buku pendidikan di Malaysia. pengantar ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris untuk pelajaran sains.

Adapun jenis pendidikan di Malaysia yaitu:

1. Sekolah Kebangsaan

Bahasa Malaysia digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan merupakan salah satu jenis sekolah rendah.

2. Sekolah Kluster

Suatu nama yang diberikan kepada sekolah yang dikenal cemerlang, baik dari aspek manajemenya maupun dari outputnya.

3. Sekolah Wawasan

Sekolah Wawasan menggunakan bahasa Ibu, sekolah ini berorientasi untuk mengembangkan keakraban antar kaum dalam berinteraksi.

4. Sekolah Agama Islam

Sekolah pondok, madrasah, dan sekolah agama Islam lain merupakan bentuk sekolah asal di Malaysia.

5. Sekolah Teknik dan Vokasional

Sekolah ini memberi peluang kepada murid yang mempunyai keahlian dalam pendidikan sains dan teknologi untuk memenuhi tenaga kerja dalam bidang industri negara.

6. Sekolah Berasrama Penuh

Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) dan Sekolah Berasrama Penuh atau Residential School juga dikenal sebagai sekolah-sekolah sains (*science schools*). Sekolah-sekolah ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan calon-calon elit Malaysia tetapi kemudian diperluas sebagai sekolah untuk menjaga Malaysia dengan cara menerima siswa dengan kemampuan akademik dan bakat-bakat olah raga serta kepemimpinan yang menonjol. Sekolah tersebut dijadikan sebagai model setelah Sekolah Asrama Inggris (*British Boarding School*).

Selain itu, Jenjang pendidikan di Malaysia adalah sebagai berikut:

1. Prapendidikan Dasar

Pendidikan di Malaysia dimulai dari pendidikan prasekolah yang disediakan oleh beberapa instansi pemerintah, badan swasta, dan lembaga-lembaga sukarela dan diikuti oleh anak didik berusia 4-6 tahun.

2. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar adalah wajib bagi semua anak-anak antara usia 7 dan 12.

3. Pendidikan Menengah Pertama (Form I-III)

Pendidikan menengah terbagi menjadi 2 siklus: menengah bawah, berlangsung 3 tahun yang disebut Form I-III, dan menengah atas, berlangsung 2 tahun yang disebut Form IV-V. Siswa sekolah dasar nasional langsung melanjutkan ke Form I. Adapun siswa dari sekolah tipe-nasional (Cina dan Tamil) mengikuti kelas transisi 1 tahun untuk mendapatkan bekal bahasa Melayu yang memadai, kecuali bagi siswa yang mendapatkan nilai yang memuaskan pada Tes Penilaian Primer dapat langsung mengikuti Form I. Di akhir tahun pendidikan menengah pertama, siswa menjalani Ujian Penilaian Menengah Pertama (*Lower Secondary Assessment Examination*).

4. Pendidikan Menengah Atas (Form IV-V)

Pada tingkat menengah atas, siswa dapat memilih salah satu di antara dua program yang ditawarkan: akademis dan teknik (kejuruan). Di akhir tahun, pendidikan siswa di bidang akademi menjalani ujian *Malaysia Certificate of Education* (MCE) yaitu sertifikat pendidikan Malaysia.

5. Pendidikan Pasca Pendidikan Menengah

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, siswa dapat memilih untuk mengejar 1 sampai 2 tahun pendidikan pasca pendidikan menengah untuk mendapatkan Form VI dan pendidikan matrikulasi untuk persiapan masuk universitas. Pendidikan matrikulasi dipersiapkan untuk memenuhi persyaratan masuk khusus dari universitas tertentu. Adapun Form VI ditujukan untuk memenuhi persyaratan dari semua universitas.

6. Pendidikan Tinggi

Siswa yang telah menyelesaikan pendidikan menengah, mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian sertifikasi Sekolah Tinggi Malaysia (di Indonesia dikenal sebagai SPMB atau UMPTN) yang diselenggarakan oleh Dewan Ujian Malaysia. Lembaga pendidikan tinggi mencakup universitas, akademi, dan politeknik. Program yang ditawarkan beragam, mulai sertifikat, diploma, hingga degree levels. Pada tingkat sarjana pendidikan ditempuh selama 3-4 tahun.

3. Problematika dan Kebijakan Pendidikan di Malaysia

Negara Malaysia merupakan negara multikultural, terdapat cukup beragam suku atau ras pada masyarakatnya. Keadaan ini menjadi problem tersendiri dalam pendidikan. Masyarakat dengan beragam suku di dalamnya membutuhkan perhatian serius agar tidak menjadi penghambat dalam harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di antara problematika pendidikan sebatas yang penulis temukan terletak pada pendidikan multikultural dan pendidikan moral. Pendidikan multikultural masuk ke dalam pendidikan moral yang sejatinya kompleks. Dalam konteks multikultur Malaysia yang seharusnya hal ini lebih cocok diberikan dalam semangat supaya pada akhirnya siswa mampu berpikir secara mandiri dan mendapatkan kesimpulan nilai moral yang tidak bertentangan dengan kepercayaanya.

Hambatan yang dialami oleh guru seperti kurangnya buku latihan, tidak tersedianya dana untuk kegiatan di luar sekolah dan kurangnya guru spesialis dalam bidang pendidikan moral dan pendidikan karakter. Poin terakhir ini memang sebuah realita bahwa pendidikan guru pendidikan moral memang tidak tersedia dalam jumlah banyak, sehingga guru mata

pelajaran lain pun disertai tanggung jawab untuk mengajar dengan persiapan melalui kursus singkat. Hal ini membawa dampak karena ternyata guru hasil kursus singkat tidak memahami dengan baik istilah-istilah dalam pendidikan moral dengan tingkat pemahaman yang biasa. Dengan demikian, kualitas pendidikan karakter kurang efektif sehingga tidak aneh metoda mengajar yang dilakukan pun sangat sederhana: murid disuruh menghafal.

Malaysia memiliki keunikan dalam mengambil kebijakan dalam pendidikannya yaitu sebelum meraih kemerdekaan pada tahun 1955 sudah membentuk sebuah komisi yang diprakarsai oleh A. Rezak dengan mempersiapkan sistem pendidikan negara Malaysia yang terpenting dari sistem pendidikan di Malaysia sama dengan penjelasan di atas bahwa bahasa Melayu dan bahasa Inggris menjadi bahasa yang wajib dipelajari oleh semua pelajar di sekolah selain itu juga bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Inggris sudah diberikan kepada siswa sekolah dasar, sedangkan bahasa Cina diberikan ketika pendidikan tingkat menengah.

Organisasi pendidikan yang berada di pusat pemerintahan terbagi menjadi beberapa menteri antara lain menteri yang bertanggung jawab atas seluruh pendidikan menengah dan purna sekolah menengah, sekolah Teknik dan pemberian dana kepada negara-negara bagian. Kementerian ini juga dibagi menjadi dua bagian yaitu menteri bagian administrasi yang mengatur perencanaan, keuangan, administrasi, personil dan pelajaran terpadu dan pengawasan terhadap pelajaran agama Islam. Sedangkan menteri yang kedua adalah mentee yang mengurus pendidikan guru, bagian sekolah, sindikat ujian, pendidikan teknis, registrasi guru dan perencanaan pendidikan

dan penelitian.

Pada tahun 1974 Malaysia membentuk Jawatan kuasa Kabinet. Jawatan ini bertugas mengkaji semua pelaksanaan pendidikan dan dalam hal ini semuanya dilaporkan secara tertib dari tahun 1979. Ternyata hal ini menjadikan pendidikan menjadi lebih baik dengan terwujudnya reformasi pendidikan yang dilakukan oleh kementerian pendidikan di Malaysia dan mengadakan perubahan kebijakan-kebijakan pendidikan antara lain:

1. Memperkenalkan pendidikan sekolah dalam sekolah rendah
2. Mengurangi tahun lama sekolah rendah dari 6 tahun menjadi 5 tahun bagi murid yang cerdas begitu juga sebaliknya menambah tahun lama sekolah bagi murid yang memiliki kecerdasan yang lambat.
3. Memberikan peluang pendidikan kepada semua pelajar dengan melanjutkan waktu belajar mereka dari 9 tahun menjadi 12 tahun, yaitu sampai tingkat 5 diperingkat sekolah menengah.
4. Mengutamakan pendidikan teknologi dengan tujuan melahirkan pelajar yang mahir dalam bidang seni perusahan, perdagangan dan ekonomi. Inilah yang membedakan dengan pendidikan di Indonesia yang mewajibkan belajar 9 tahun pada tahun 2002. Hal ini menunjukkan ketertinggalan yang jauh belum juga orientasi pendidikan yang lebih menekankan pada kemajuan teknologi yang dapat mewujudkan kemajuan bagi suatu Negara.
5. Mengubah sistem pemeriksaan SRP dengan penilain menengah rendah. Jika dalam Indonesia system penilain atau evaluasi belajar siswa.

Negara Malaysia memiliki slogan “ilmu puncak kemajuan” jika kita pahami slogan di atas merupakan sebuah slogan yang memiliki paradigma bahwa dengan ilmu pengetahuan sebuah Negara akan melangkah untu kemajuan. Tentu saja dengan berbagai cabang keilmuan.

B. Pendidikan Di China

1. Latar Belakang Pendidikan di China

Cina, nama pendeknya atau nama panjangnya Republik Rakyat Tiongkok (Hanzi sederhana: 中华人民共和国; Hanzi tradisional: 中華人民共和國; Pinyin: Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó; harfiah: 'Republik Rakyat Tionghoa', disingkat RRT) adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur yang beribu kota di Beijing. Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia (sekitar 1,4 miliar jiwa, mayoritas merupakan suku Han) dan luas daratan 9,59 juta kilometer persegi, menjadikannya negara ke-3 terbesar di dunia. Negara ini didirikan pada tahun 1949 setelah berakhirnya Perang Saudara Tiongkok, dan sejak saat itu dipimpin dengan sistem 1 partai oleh sebuah partai tunggal, yaitu Partai Komunis Republik Rakyat Tiongkok/Cina (PKT). Sekalipun sering kali dilihat sebagai negara komunis, kebanyakan ekonomi republik ini telah diswastakan sejak tahun 1980-an. Walau bagaimanapun, pemerintah masih mengawasi ekonominya secara politik terutama dengan perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan sektor perbankan. Secara politik, ia masih tetap menjadi pemerintahan satu partai.

Cina merupakan salah satu 5 negara yang tidak pernah dijajah negara asing. Adapun 5 negara tersebut adalah Thailand, Jepang, Cina, Bhutan dan Iran. Menjadi bangsa yang

tidak pernah dijajah setidaknya telah menggambarkan kondisi mental bangsa di antara bangsa-bangsa lain. Atau setidaknya menggambarkan bahwa mereka tidak dapat dijajah.

Sistem pendidikan China pada tahun 1949 berkembang dan berubah menjadi sistem yang lebih modern yang di anut dari budaya barat. seperti sistem pendidikan di negara Australia, Kanada, Inggris, Amerika, India, Jepang, Thailand, Korea Selatan dan lain-lain. Kemudian pendidikan Cina mengalami reorganisasi dan menjadi sistem pendidikan yang semakin modern pada tahun 1950-an. Dalam era reformasi pendidikan China berpegang teguh pada modernization theory dan human capital theory. Karena China meyakini bahwa pembangunan tidak bisa direalisasikan apabila mayoritasnya tidak memegang teguh nilai moderniasasi.

Cina memiliki sejarah dinamika pendidikan yang rumit dan panjang. Sejak dari era kekaisaran sampai penguasa komunis, sistem yang digunakan adalah campuran dari berbagai falsafah klasik dan modern dan dipengaruhi oleh keberagaman budaya, psikologi sosial, agama, ekonomi dan politik. Sejak Dinasti Han tahun 206 SM sampai 220 M pendidikan telah diorganisir ketika banyak literatur Konfusiunisme yang dikumpulkan serta disusun kembali dan dijadikan filosofis oleh masyarakat Cina. Semboyan kementerian pendidikan china sekarang adalah "Belajar terus sampai mati dan hanya kematianlah yang menghentikannya", yang berasal dari ajaran seorang filsuf terkenal yaitu Hsun Tzu.

Sejak tahun 1980an China berlandaskan pada Komunisme, sosialisme, Leninisme serta ideology MAO Tse Tung, marxisme, dan terbuka terhadap dunia luar, landasan tersebut merupakan prinsip-prinsip dasar pembangunan ekonomi

yang ditetapkan oleh Pemerintah China. “Pendidikan harus menjalankan tujuan pembangunan sosialis, dan pembangunan sosialis harus tergantung pada pendidikan” merupakan hasil putusan reformasi struktur pendidikan yang diadakan oleh komite petani komunis cina pada tahun 1985. Berdasar putusan tersebut terlihat adanya hubungan antara pendidikan dan pembangunan ekonomi, serta menegaskan bahwa pembangunan ekonomi ini bergantung pada peningkatan kualitas angkatan kerja serta kemajuan IPTEK. Dengan demikian, pembangunan kerangka dasar system pendidikan yang dapat dipakai dan disesuaikan dengan keperluan gerakan modernisasi sosialis yang diarahkan pada tuntutan abad ke-21, dan yang merefleksikan karakteristik dan nilai-nilai Cina merupakan tujuan dari pembangunan pendidikan cina.

Adapun Menteri Pendidikan nasional Cina bertanggung-jawab terhadap penyusunan kebijakan umum dan Perencanaan tentang pendidikan sehingga bertujuan mempersiapkan para pelajarnya untuk melakukan pengembangan diri dalam dimensi estetika, fisik, intelektual dan moral, sesuai dengan bidang pekerjaannya agar kelak nanti dapat menjadi pekerja sosialis yang beridealisme, terdidik dan berbudaya serta disiplin dan memiliki karakter yang kuat dibawah pengawasan State Council, dimana administrasi pendidikan dasar didesentralisasikan ke Pemerintah Provinsi dan Kota/ Kabupaten/ Desa. Sedangkan administrasi dan pengawasan pendidikan tinggi dilakukan di tingkat nasional dan provinsi.

2. Konsep Pendidikan di China

Pendidikan di Cina selama dua dekade terakhir telah dipandu oleh prinsip dasar, yang diusulkan oleh Deng Xiaoping, bahwa pendidikan harus berorientasi modernisasi,

ke dunia luar, dan ke masa depan. Tujuan pendidikan adalah "*mengaktifkan siswa untuk belajar dengan cara yang aktif dan hidup serta berkembang secara moral, intelektual, dan fisik dengan cara pengembangan semua potensi dan untuk mempersiapkan generasi baru yang memiliki cita-cita, kebajikan moral yang dididik dalam disiplin*". Tujuan pendidikan, hakikatnya terdiri dari dua elemen penting yaitu: 1) penekanan pada "pengembangan semua potensi peserta didik", dan 2) pergeseran fokus dari "pengetahuan dasar dan pengembangan keterampilan dasar", nilai-nilai atau pengembangan sikap serta dari akuisisi doktrin politik-ideologis ke pendekatan holistik humanistik untuk pembangunan manusia seutuhnya.

China mulai melakukan reformasi kurikulum nasional yang luas pada tahun 1999, setelah kurikulum lama dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kondisi sosial budaya dan kondisi ekonomi China, terutama dalam upaya mempromosikan kompetensi warga China dalam masyarakat global yang semakin kompetitif. Tujuan reformasi tersebut adalah untuk menghasilkan siswa yang memiliki keterampilan praktis individu yang utuh, melalui perancangan ulang standar kurikulum nasional dan wajib belajar. Secara khusus, reformasi kurikulum tersebut berusaha untuk: (1) membangun karakter siswa, mengembangkan kemampuan mereka untuk menjadi pelajar yang mandiri dan aktif, dan membantu mereka mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk pembelajaran seumur hidup, (2) mengintegrasikan materi ajar yang saling berhubungan, (3) membuat kurikulum yang lebih banyak materi yang bermakna dan relevan untuk masyarakat modern, dan (4) menilai belajar siswa sesuai standar kurikulum yang telah ditetapkan. Reformasi ini diharapkan membawa

perubahan dalam praktik pendidikan, khususnya Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.

Kurikulum baru mulai diperkenalkan pada tahun 2000 dan dilakukan uji coba lapangan untuk mengetahui relevansinya dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian kurikulum disesuaikan atau disempurnakan pada tahun 2005. Secara nasional pembelajaran dengan kurikulum baru tersebut dimulai pada musim gugur tahun 2005. Social Studies merupakan bagian dari program utama dalam reformasi tersebut. Tujuan pembelajaran Pendidikan Ilmu Sosial disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern yang menuntut kemampuan berkompetisi, adaptif dengan perubahan serta memiliki keterampilan sosial yang memadai. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka proses pembelajaran Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial mesti dikembangkan sesuai dengan kondisi sosial empirik masyarakat China dan perubahan masyarakat global. Praktik pendidikan juga dikembangkan secara demokratis, aktif, kreatif dan bersifat multi sumber, untuk memperkaya kasanah pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan yang bersifat holistik dan komperhensif. Secara tradisional, Ilmu Politik, Ilmu Sejarah, Politik dan Geografi adalah subjek yang terpisah dan berbasis pengetahuan. Kurikulum lama menekankan akumulasi informasi dalam bidang pengetahuan tertentu, tetapi mengabaikan pengembangan pengetahuan yang komprehensif dalam disiplin ilmu yang saling berkaitan sehingga siswa memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk memecahkan masalah. Akan tetapi melalui proses reformasi yang dilakukan, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang semua berbasis konten/materi dikembangkan pada pembelajaran yang berbasis konteks. Melalui pembelajaran yang berbasis konteks,

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di China mengalami perubahan dan perkembangan yang luar biasa, bukan saja dalam menunjang pengembangan pengetahuan tetapi juga mampu meningkatkan keterampilan siswa.

Secara rinci kurikulum yang tertuang dalam falsafah Su-Shi-Jiao-Yu yang merupakan perwujudan pendidikan berorientasi kualitas. Berikut tujuan kurikulum yang dimaksud:

1. Mengembangkan rasa patriotisme, kolektivisme, cinta sosialisme, dan pelestarian tradisi budaya nasional;
2. Mengembangkan kesadaran/rasa demokrasi sosialis dan taat aturan hukum serta mematuhi hukum dan norma-norma sosial;
3. Mengembangkan cara pandang hidup sehat dan bertumpu pada nilai-nilai kehidupan;
4. Mengembangkan rasa tanggung-jawab sosial dan kewajiban untuk melayani rakyat;
5. Membudayakan semangat kreatifitas, kemampuan praktek, kompetensi ilmiah dan humanistik dan kesadaran lingkungan;
6. Mengembangkan dasar pengetahuan, keterampilan dan pendekatan untuk belajar sepanjang hayat; dan
7. Mengembangkan tubuh yang sehat, kualitas psikologis yang solid, apresiasi estetika dan cara-cara hidup sehat.

Tujuan kurikulum untuk tingkat SMA juga menambahkan hal berikut:

1. Mengembangkan kemampuan untuk belajar mandiri, kesadaran kejuruan/kerja, kewirausahaan, perencanaan karir;
2. Memahami diri sendiri dan menghargai orang lain, belajar untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain, pengembangan semangat tim/bekerja-sama; dan

3. Memahami keanekaragaman budaya, dan keterbukaan pikiran terhadap dunia luar.

Kurikulum pendidikan dasar memiliki 3 tujuan dimensional, yaitu:

1. Sesuai pilihan konten pendidikan, termasuk pengetahuan dasar dan keterampilan dasar, mencerminkan pembangunan sosial, kemajuan ilmu pengetahuan-teknologi dan keragaman budaya, dan yang berkaitan dengan pengalaman pembelajar;
2. Mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan di semua kurikulum atau bidang pelajaran; dan
3. Memperhatikan proses dan pendekatan pembelajaran, mendorong pengembangan aktif, strategi pembelajaran yang saling bergantung.

Struktur kurikulum Cina memuat 3 hal yaitu:

1. Peningkatan Kurikulum Seimbang

Keseimbangan yang lebih baik antara kurikulum berbasis disiplin, kurikulum terpadu dan "kurikulum berbasis praktek yang komprehensif". Skema kurikulum mempertahankan sejumlah kurikulum berbasis disiplin, terutama untuk SMA, termasuk bahasa Cina, matematika, dan bahasa asing; dan sebagai alternatif: fisika, kimia dan biologi untuk sains. Upaya yang dilakukan adalah untuk membangun keunggulan kurikulum berbasis disiplin (misalnya logika dan integritas dalam mengorganisir pengetahuan, profesionalisme dan keilmiahan sistemik untuk akuisisi belajar efektif). Sementara itu, mata pelajaran berbasis disiplin dalam kurikulum diseimbangkan dengan keterampilan kognitif dan nilai-nilai dimensi konten pendidikan dan mengalihkan fokus dari akuisisi pengetahuan untuk pembangunan manusia secara

holistik. Selain itu, pengetahuan disiplin lebih terkait dengan pengalaman siswa dan kehidupan atau praktek sosial.

Tabel distribusi keseimbangan proporsi mata pelajaran

Mata pelajaran	Persentase	Persen
Moral (pembangunan karakter)		7 s.d 9%
Bahasa Cina		20 s.d 22%
Matematika		13 s.d 15%
Bahasa Asing		6 s.d 8%
Seni (Musik, Seni rupa)		9 s.d 11%
Pendidikan Jasmani		10 s.d 11%
Praktek (muatan lokal)		16 s.d 20%

2. Peningkatan Kurikulum Terpadu

Kurikulum di Cina berdasarkan pada disiplin ilmu berbasis konten dan terkotak tanpa interaksi antara domain pembelajaran. Salah satu tujuan dari kurikulum pendidikan dasar adalah untuk meningkatkan integrasi konten kurikulum yang relevan dan mempromosikan pembelajaran antar-disiplin.

3. Peningkatan Kurikulum Pilihan

Diberlakukannya kurikulum pilihan dalam struktur kurikulum Cina bertujuan untuk menanggapi kesenjangan besar antara daerah pedesaan dan perkotaan, antara wilayah timur dan barat, antara etnis mayoritas dan minoritas, dan antar sekolah dalam wilayah atau kota yang sama, dalam hal perencanaan kurikulum, implementasi dan manajemen. Struktur kurikulum sebelumnya dalam pendidikan dasar sangat sentralistik, ditandai dengan keseragaman hal yang berbanding terbalik dengan kebutuhan belajar murid dengan kondisi sosial-ekonomi dan budaya yang beragam. Peningkatan "kurikulum pilihan" berarti menawarkan mata

pelajaran yang lebih elektif dan memfasilitasi otonomi yang lebih luas dalam adaptasi kurikulum dengan konteks lokal atau spesifik dan partisipasi yang lebih aktif dalam kurikulum terutama pada proses pengambilan keputusan oleh otoritas lokal, sekolah, guru dan murid.

Pendidikan dasar Cina terdiri dari 3 tahun PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), 6 tahun pendidikan dasar, 3 tahun pendidikan menengah pertama, dan 3 tahun pendidikan menengah atas. Ada pula pendidikan tinggi setingkat akademi 2-3 tahun, pendidikan tinggi kejuruan teknik 4 tahun, pendidikan gelar sarjana 4 tahun, pendidikan gelar magister 2-3 tahun, dan pendidikan doktor 3 tahun.

No	Tipe Sekolah	Lama Belajar	Usia	Ijazah
1	Pendidikan Anak Usia Dini	3 tahun	Usia 3-5 tahun	-
2	Pendidikan Dasar	6 tahun	Usia 6 - 12 tahun	-
3	Pendidikan Menengah Pertama	3 tahun	Usia 12 - 15 tahun	-
4	Pendidikan Menengah Atas	3 tahun	Usia 15-18 tahun	Diberikan ijazah SMA
6	Pendidikan Menengah Atas Spesialisasi	3 tahun	Usia 15 - 19 tahun	Diberikan ijazah SMK

3. Problematika dan Kebijakan Pendidikan di China

Di antara problematika pendidikan di Cina adalah adanya kewajiban setiap murid untuk mengikuti ujian mulai kelas 1 sampai masuk universitas. Dalam pendidikan China, ada sebuah ujian yang disebut dengan nama "Gaokao", yaitu ujian puncak masuk universitas yang sangat ditakuti setiap murid. Dalam pendidikan China, ada sebuah ujian yang disebut dengan nama "Gaokao", yaitu ujian puncak masuk universitas yang sangat ditakuti setiap murid. Oleh karena itu, untuk mengurangi tekanan pada anak-anak muda, maka pemerintah

China membuat kebijakan baru. Dalam peraturan baru ini juga dikatakan bahwa ujian di setiap tahunnya akan dibatasi jadi satu kali saja setiap semesternya, dimana ujian tengah semester hanya ada mulai sekolah menengah pertama (SMP). Langkah-langkah baru ini merupakan salah satu bagian dari reformasi pemerintah China di bidang pendidikan.

Menteri Pendidikan nasional Cina bertanggung-jawab terhadap penyusunan kebijakan umum dan Perencanaan tentang pendidikan sehingga bertujuan mempersiapkan para pelajarnya untuk melakukan pengembangan diri dalam dimensi estetika, fisik, intelektual dan moral, sesuai dengan bidang pekerjaannya agar kelak nanti dapat menjadi pekerja sosialis yang beridealisme, terdidik dan berbudaya serta disiplin dan memiliki karakter yang kuat dibawah pengawasan State Council, dimana administrasi pendidikan dasar didesentralisasikan ke Pemerintah Provinsi dan Kota/ Kabupaten/ Desa. Sedangkan administrasi dan pengawasan pendidikan tinggi dilakukan di tingkat nasional dan provinsi.

Sekarang ini sistem pendidikan di negara china dimulai dari pusat, provinsi, kotamadiya, kabupaten dan termasuk daerah-daerah otonomi setingkat kota madiya, artinya bersifat transentralisasi. Adapaun dalam bidang pembangunan pendidikan dibentuk organisasi pemerintah bernama komite pendidikan Negara (state education commission) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan. Untuk biaya pendidikan tersedia pada pemerintah pusat dan daerah dengan distribusi, alokasi dari daerah khusus untuk pendidikan yang dikelola oleh daerah sedangkan dana pusat untuk lembaga pendidikan yang berada di kementrian- kementrian.

C. Pendidikan di Jepang

1. Latar Belakang Pendidikan di Jepang

Jepang adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan Republik Rakyat Tiongkok, Korea, dan Rusia. Pulau-pulau paling utara berada di Laut Okhotsk, dan wilayah paling selatan berupa kelompok pulau-pulau kecil di Laut Cina Timur, tepatnya di sebelah selatan Okinawa yang bertetangga dengan Taiwan.

Sebagaimana Cina, Jepang juga termasuk ke dalam negara yang tidak pernah dijajah negara atau bangsa lain. Jepang terdiri dari 6.852 pulau yang menjadikannya sebagai negara kepulauan. Pulau-pulau utama dari utara ke selatan adalah Hokkaido, Honshu (pulau terbesar), Shikoku, dan Kyushu. Sekitar 97% wilayah daratan Jepang berada di keempat pulau terbesarnya. Sebagian besar pulau di Jepang bergunung-gunung, dan sebagian di antaranya merupakan gunung berapi. Gunung tertinggi di Jepang adalah Gunung Fuji yang merupakan sebuah gunung berapi. Penduduk Jepang berjumlah 128 juta orang, dan berada di peringkat ke-10 negara berpenduduk terbanyak di dunia. Tokyo secara de facto adalah ibu kota Jepang, dan berkedudukan sebagai sebuah prefektur. Tokyo Raya adalah sebutan untuk Tokyo dan beberapa kota yang berada di prefektur sekelilingnya. Sebagai daerah metropolitan terluas di dunia, Tokyo Raya berpenduduk lebih dari 30 juta orang.

Menurut mitologi tradisional, Jepang didirikan oleh Kaisar Jimmu pada abad ke-7 SM. Kaisar Jimmu memulai mata rantai monarki Jepang yang tidak terputus hingga kini. Meskipun begitu, sepanjang sejarahnya, untuk kebanyakan masa kekuatan sebenarnya berada di tangan anggota-anggota

istana, shogun, pihak militer, dan memasuki zaman modern, di tangan perdana menteri. Menurut Konstitusi Jepang tahun 1947, Jepang adalah negara monarki konstitusional di bawah pimpinan Kaisar Jepang dan Parlemen Jepang.

Sejarah pendidikan di Jepang dimulai setidaknya pada abad keenam, ketika pembelajaran Tiongkok diperkenalkan di istana Yamato. Peradaban asing sering kali memberikan ide-ide baru bagi perkembangan budaya Jepang sendiri. Ajaran dan gagasan Tiongkok mengalir ke Jepang dari abad keenam hingga kesembilan. Bersamaan dengan masuknya Buddhisme muncul sistem penulisan bahasa Tionghoa dan tradisi sastra, dan Konfusianisme. Pada abad kesembilan, Heian-kyō (sekarang Kyoto), ibukota kekaisaran, memiliki lima institusi pendidikan tinggi, dan selama sisa zaman Heian, sekolah-sekolah lain didirikan oleh bangsawan dan istana kekaisaran. Selama periode abad pertengahan (1185–1600), biara-biara Buddhis Zen adalah pusat pembelajaran yang sangat penting, dan Sekolah Ashikaga, Ashikaga Gakkō, berkembang pesat pada abad ke-15 sebagai pusat pendidikan tinggi.

2. Konsep Pendidikan di Jepang

Adapun tujuan pendidikan di Jepang adalah “Pendidikan harus bertujuan untuk pengembangan penuh kepribadian dan berusaha untuk memelihara warga, suara dalam pikiran dan tubuh, yang dijiwai dengan kualitas yang diperlukan bagi mereka yang membentuk negara dan masyarakat yang damai dan demokratis”. Tujuan-tujuan yang menjadi target yang ingin dicapai pendidikan Jepang yaitu :

1. Pencapaian pengetahuan luas dan budaya, budidaya sensibilitas kaya dan rasa moralitas, dan pengembangan tubuh yang sehat.

2. Pengembangan kemampuan individu, membina semangat otonomi dan kemandirian, dan menekankan hubungan antara karir dan kehidupan praktis.
3. Membina sikap menghargai keadilan dan tanggung jawab, saling menghormati dan kerjasama, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan jiwa sipil.
4. Membina sikap menghormati kehidupan dan alam, dan memberikan kontribusi terhadap perlindungan lingkungan.
5. Membina sikap menghormati tradisi dan budaya, mencintai negara dan wilayah yang mengasuh mereka, menghormati negara-negara lain, dan memberikan kontribusi bagi perdamaian dunia dan perkembangan masyarakat internasional.

Kurikulum di Jepang dilakukan perubahan 10 tahunan. Tentunya ada hal baru yang dimasukkan dalam setiap kurikulum, mengikuti perubahan sosial dan ekonomi masyarakat Jepang di dunia. Sekalipun perubahan sosial terjadi, para pakar pendidikan Jepang mensinyalir adanya kemunduran dalam dunia pendidikan di Jepang. Kemunduran tersebut diantaranya adalah menurunnya minat bersekolah anak-anak, dekadensi moral dan kedisiplinan yang mulai rapuh, juga prestasi belajar yang menurun, sekalipun beberapa pakar meragukan alat ukur ini sebagai alat yang tepat untuk mengukur kemampuan akademik siswa. Hal-hal yang ditegaskan oleh Kementerian Pendidikan Jepang terkait dengan menyusun kurikulum adalah:

1. Standar kurikulum nasional.
2. Mengutamakan keharmonisan pertumbuhan jasmani dan rohani siswa.
3. Menyesuaikan dengan lingkungan sekitar.
4. Memperhatikan step perkembangan siswa.

5. Memperhatikan karakteristik course pendidikan/jurusan pada level SMA.

Jenis dan jenjang Pendidikan di Jepang dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Pendidikan Pra-sekolah
2. Sekolah Dasar
3. Sekolah Menengah Pertama
4. Sekolah Menengah Atas
5. Perguruan Tinggi

3. Problematika dan Kebijakan Pendidikan di Jepang

Sebelum Perang Dunia ke II diberlakukan kebijakan pendidikan yang terangkum dalam salinan Naskah Kekaisaran mengenai pendidikan atau yang disebut dengan Imperial Rescript on Education. Dimana pada zaman dahulu para kaisar telah dididik berbasis nilai yang luas dan kekal, serta menanam nilai-nilai positif secara mendalam dan kokoh dalam pribadi setiap kaisar. Materi yang diajarkan pada zaman dahulu lebih cenderung mengarah pada kesetiaan dan kepatuhan dari generasi ke generasi dengan tetap menerapkan estetika.

Setelah berakhirnya Perang Dunia ke II yaitu pada tanggal 3 November 1946, kebijakan pendidikan Jepang mulai dirubah berbasis Hak Asasi Manusia, kebebasan hati nurani, jaminan setiap individu untuk mengembangkan kebebasan berfikir, kebebasan akademik di mana setiap individu memperoleh hak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kemampuannya.



BAB VIII

LATAR BELAKANG, KONSEP PENDIDIKAN, PROBLEMATIKA DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI NEGARA EROPA

A. Pendidikan di Inggris

1. Latar Belakang Pendidikan di Inggris

SEJARAH BERDIRINYA lembaga pendidikan di United Kingdom atau Kerajaan Inggris (selanjutnya disebut Inggris) sudah mulai tercatat sejak akhir abad ke-6, yaitu dalam periode sejarah Inggris Anglo-Saxon sekolah yang diperkirakan pertama berdiri di Inggris adalah sebuah grammar school yang didirikan pada tahun 598 di Canterbury, England.

Inggris merupakan rumah bagi beberapa universitas tertua di dunia. Universitas Oxford merupakan universitas pertama yang tercatat berdiri dalam sejarah Inggris. Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa universitas tertua di negara berbahasa Inggris ini telah memulai pengajaran sejak tahun 1096 dan berkembang pesat sejak tahun 1167. Pada tahun 1209, beberapa orang cendekia dari Universitas Oxford memutuskan hengkang dan pindah ke Cambridge yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Universitas Cambridge. Di bagian utara Universitas St. Andrews didirikan pada tahun 1413 menjadikannya universitas paling tua di Skotlandia.

Salah satu tonggak penting dalam sejarah program wajib belajar diberlakukan, yaitu pada tahun 1880 wajib belajar diberlakukan saat itu hanya untuk anak berusia 5 sampai dengan 10 tahun batas akhir usia wajib belajar kemudian bertambah secara bertahap dan mencapai usia 14 tahun pada tahun 1918. Tahun 1947 dan tahun 1973, batas akhir usia tersebut kembali masing masing meningkat menjadi 15 dan 16 tahun. Dengan diberlakukannya undang undang *Education and Skills Act 2008*, mulai tahun 2013 sampai dengan 2015 batas akhir usia wajib belajar tersebut akan bertahap meningkat menjadi 18 tahun.

2. Konsep Pendidikan di Inggris

Pendidikan wajib belajar dimulai sejak pendidikan primer saat anak-anak menginjak usia 5 tahun dan berakhir sampai dengan usia 16 tahun. Batas akhir usia wajib belajar ini akan berubah secara bertahap mulai tahun 2013 menjadi 18 tahun pada tahun 2015. Umumnya siswa setelah menyelesaikan pendidikan sekunder (usia 16 tahun), lalu mengambil ujian *General Certificate of Secondary Education (GCSE)*, untuk kemudian melanjutkan ke pendidikan lanjutan (further education) selama 2 tahun. Umumnya setelah mendapatkan nilai GCSE siswa di Inggris mengambil kualifikasi AS (*Advanced Subsidiary*) level yang kemudian dilanjutkan dengan A-Level, yang dapat diambil di sekolah yang sama, sixth form college atau further education college. A-Level biasanya dipakai sebagai syarat melanjutkan pendidikan ke universitas. Selain A-Level terdapat beberapa pilihan lain seperti kualifikasi *Business and Technology Education Council (BTEC)*, *International Baccalaureate (IB)*, *Cambridge Pre-U* dan sebagainya, termasuk pilihan melanjutkan ke berbagai sekolah tinggi kejuruan.

Bagi yang memilih sekolah kejuruan dan ingin memasuki lapangan kerja dengan lebih cepat mereka dapat mengambil pendidikan kejuruan (vocational), sebagai contoh, pendidikan untuk mendapatkan sertifikat *National Vocational Qualification* (NVQ). Pemegang kualifikasi pendidikan kejuruan NVQ tetap mempunyai peluang untuk dapat meneruskan pendidikan mereka ke tingkat perguruan tinggi atau universitas, setelah memenuhi beberapa ketentuan akademis.

Pendidikan tinggi (*higher education*) umumnya dimulai dengan tiga tahun pendidikan setingkat sarjana atau bachelor's degree. Kemudian, pendidikan pascasarjana dimulai dengan pendidikan tingkat master yang biasanya dapat ditempuh dalam waktu satu tahun. Tingkat pendidikan tertinggi di tahapan ini adalah pendidikan tingkat doktor yang setidaknya ditempuh selama tiga tahun.

Di tingkat nasional, pendidikan di England diawasi pemerintah pusat yaitu oleh Departemen Pendidikan (Department for Education - DfE) dan Departemen Bisnis, Inovasi dan Keterampilan (Department for Business, Innovation and Skills - BIS). Namun untuk pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat daerah, masing-masing pemerintah daerah diberi tanggung jawab dalam pengelolaannya. Bagian selanjutnya akan menjelaskan keterangan singkat di atas lebih mendalam.

Adapun pendidikan formal di Inggris yaitu bagi anak-anak yang berusia antara 5 dan 16 tahun, pendidikan wajib di UK. Pendidikan yang dibiayai pemerintah bagi anak-anak pada usia ini terstruktur dalam dua atau tiga jalur (*tier*). Sistem dua jalur (*two-tier-system*) terdiri dari sekolah dasar (*Primary school*) dan sekolah menengah pilihan atau tanpa pilihan (*selective/non selective secondary school*). sekolah dasar adalah sekolah untuk

anak-anak yang berusia antara 5-11 tahun, Adakalanya terbagi lagi dalam kelompok 5-7 tahun (*infant school*) dan kelompok 7-11 tahun (*junior school*). Sekolah menengah adalah untuk anak-anak yang berusia antara 11 dan 16 atau 18 tahun. Sistem tiga jalur (*three-tier system*) terdiri sekolah pertama (*first school*) adalah bagi anak-anak yang berusia 5-8 atau 9 tahun, sekolah menengah (*middle school*) bagi anak berusia antara 8-12 atau 9-13 tahun, dan sekolah tingkat atas (*upper school*) biasanya non selektif, bagi anak-anak berusia antara 12 atau 13-16 atau 18 tahun. Sistem sekolah dengan dua jalur adalah yang banyak dilaksanakan di UK. sistem tiga jalur dijumpai hanya di England yang menampung kurang 15% dari seluruh murid. Sampai tahun 1965 kebanyakan anak-anak di England dan Wales di tes pada usia 11 tahun untuk mengetahui kecocokannya memasuki sekolah yang berorientasi akademik yaitu sekolah menengah yang dikenal dengan "*grammar school*". Kurang lebih 25% anak-anak pada usia ini memasuki "*grammar school*". Anak-anak yang lain memasuki sekolah yang dikenal dengan nama sekolah menengah modern (*secondary-modern school*) yang kurikulumnya kurang berorientasi pada akademik. Tentu saja bagi mereka yang menamatkan pendidikannya disekolah ini lebih kecil peluang untuk bisa mengikuti ujian negara pada usia 16 tahun dan juga mereka kurang memperoleh fasilitas apabila berkeinginan melanjutkan pendidikan setelah usia 16 tahun. Semenjak tahun 1965, didorong terutama oleh pemerintah partai buruh, hampir semua "I.e.a.s" lebih mengakui dan menyukai sistem sekolah menengah yang dapat menampung berbagai kemampuan, dan ini dikenal dengan sebagai sekolah komprehensif (*Comprehensive school*). Sebagian besar anak-anak berusia 11-16 tahun saat ini mendapat pendidikan di sekolah jenis ini.

Anak-anak yang melampaui usia wajib belajar (16 tahun) dapat juga meneruskan pendidikannya di sekolah sendiri dalam program yang dinamakan “*sixth from*” dengan tambahan waktu dua tahun lagi atau mereka juga boleh pindah ke lembaga lain seperti “*Sixth-from collage*” yang menampung secara penuh anak-anak usia 16 -18 tahun, ke “*Tertiary Collage*”.

Selain itu, adapun pendidikan formal di Inggris yaitu berbagai program untuk orang dewasa dan *Cuntinuing Education* disenggarakan oleh “I.e.a.s, jurusan-jurusan ekstra universitas, dan badan-badan tertentu seperti Asosiasi Pendidikan para pegawai. Pada umumnya kuliah-kuliah diselenggarakan “part-time” (siang atau malam), tetapi ada sebagian yang mengharuskan tinggal dikampus dalam waktu pendek, dan sebagian kecil sekali ada yang harus tinggal di kampus dalam jangka waktu panjang pada perguruan tinggi negeri. Mata kuliah yang ditawarkan bervariasi besar sekali, mulai dari pendidikan paling dasar seperti tulis baca sampai pada mata kuliah untuk mengambil ujian program akademik atau mata-mata kuliah vokasional. Biaya pendidikan umumnya ditanggung oleh mahasiswa.

Universitas Terbuka (Open University, OU) tergolong pendidikan non formal yang mampu menawarkan berbagai program akademik dengan berbagai gelar. Perkuliahan sebagian besar dilakukan di rumah melalui korespondensi, televisi dan radio. Tidak diperlukan kualifikasi akademik formal untuk mendaftar di Universitas Terbuka ini, dan gelar di berikan atas dasar jumlah kredit yang diperoleh dengan sukses pada setiap fase perkuliahan.

Pelayanan terhadap generasi muda diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan pendidikan sosial secara informal

pada waktu-waktu senggang sambil membina pengembangan bakat mereka. pelayanan ini diselenggarakan oleh beberapa klanb bekerja sama dengan pejabat-pejabat setempat termasuk “I.e.a.s” dan macam-macam organisasi sukarela, tetapi itu bukanlah gerakan sukarela kaum muda secara nasional.

3. Problematika dan Kebijakan Pendidikan di Inggris

Berikut problematika Pendidikan di Inggris:

1. Bagaimana hubungan antara pendidikan dan pekerjaan sebagaimana menyiapkan peralihan dari sekolah ke dunia kerja. Orang Inggris masih merasa belum puas tentang keharusan adanya hubungan antara sekolah dengan kebutuhan praktis bagi siswa–siswanya dalam memasuki dunia kerja. Oleh karena itu hendaknya hubungan antara dunia kerja lebih dipererat. Meskipun tugas pokok sekolah (menurut pandangan mereka) bukanlah memberikan pendidikan kekaryaan yang berkaitan dengan lapangan kerja di perusahaan-perusahaan semata.
2. Rasa keterikatan dengan pendidikan sepanjang hayat masalah yang harus harus dipecahkan adalah bagaimana cara pendidikan sepanjang hayat dapat dilaksanakan secara merata sampai kepada orang-orang yang berusia lanjut atau dewasa yang pada masa kanak-kanak tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan. Saat ini di Inggris, digalakkan penyelenggaraan pendidikan bagi orang tua atau dengan memanfaatkan ruang-ruang kelas yang ada. Dan konsekuensinya adalah gurunya harus dipersiapkan secara khusus melalui pelatihan dan penataran yang memakan biaya yang cukup besar dalam waktu yang relative singkat.
3. Pengembangan fasilitas atau sarana kependidikan ini akan memakan banyak biaya terutama jika disejalankan dengan

pesatnya kemajuan ilmu dan teknologi dalam segala bidang pendidikan. Pesatnya kemajuan teknologi tersebut di satu pihak akan mengurangi tenaga guru itu sendiri, yakni banyak guru yang menganggur. Dan di lain pihak bila fasilitas itu dikurangi, maka akan menimbulkan hambatan belajar dari siswa juga akan membatasi pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang.

4. Pendidikan guru harus lebih ditingkatkan lagi mutunya, hal ini menyangkut sistem dan metodenya, sehingga harapan masyarakat luas untuk mendapatkan hasil kependidikan anaknya semakin dapat terpenuhi. Profesi keguruan harus dipersiapkan secara matang melalui sistem pendidikan tinggi yang lamanya 4 tahun. Guru untuk hari esok harus mampu menjabarkan pengertian bagi siswanya tentang dan kenyataan kenyataan yang ada dalam masyarakat bahwa di sana terdapat berbagai kepentingan yang berlatar belakang multi rasial dan multi kultural. Siswa harus menjadi orang dewasa yang benar-benar matang pandangannya berfikirnya tentang masalah hak asasi manusia dan sebagainya.

Selama periode pasca perang telah banyak upaya untuk mereformasi sistem pendidikan Inggris, seringkali dengan tujuan eksplisit untuk mencoba dan membuatnya lebih produktif. Daftar reformasi kebijakan pendidikan yang telah dicoba selama 50 tahun terakhir cukup luas, dan baru-baru ini Inggris (dan khususnya Inggris dan Wales) telah memperkenalkan banyak reformasi berorientasi pasar yang inovatif pada sistem pendidikannya, dalam upaya untuk meningkatkan standar. Berikut kebijakan-kebijakan yang terjadi:

1. Reformasi Pasar

Paket reformasi berorientasi pasar bertujuan untuk meningkatkan pilihan orang tua dan dengan demikian

meningkatkan akuntabilitas sekolah yang didanai negara. Orang tua setidaknya bisa secara teoritis, memilih sekolah mana yang dihadiri anak mereka dan juga dapat memiliki perwakilan di badan pengelola sekolah. Pendanaan sekolah menjadi lebih terkait erat dengan jumlah pendaftaran siswa, memberikan insentif kepada sekolah untuk menarik dan menerima lebih banyak siswa. Beberapa sekolah juga diizinkan untuk mengendalikan anggaran mereka sendiri dan dibiayai langsung dari pemerintah pusat (berlawanan dengan berada di bawah kendali pemerintah daerah). Ini memberi mereka otonomi yang lebih besar dalam operasi mereka dan khususnya siswa mana yang mereka terima di sekolah.

2. Kurikulum

Inggris memperkenalkan dua kebijakan nasional penting lainnya Pertama, pada akhir 1980-an, kurikulum nasional standar diperkenalkan untuk siswa berusia antara 5 dan 16 tahun. Tujuan kurikulum nasional adalah untuk meningkatkan standar dengan memastikan bahwa semua siswa mempelajari standar yang ditentukan. Mengatur mata pelajaran sampai tingkat minimum sampai usia 16. Reformasi kebijakan kedua, pada tahun 1998, adalah pengenalan Strategi Literasi dan Numerasi Nasional. Strategi-strategi ini melibatkan semua sekolah dasar yang mengalokasikan sebagian dari kurikulum harian untuk jam baca tulis dan berhitung, dengan tujuan khusus untuk mengembangkan keterampilan dasar murid. Isi dari pelajaran literasi dan numerasi harian ini, dan bagaimana seharusnya diajarkan, ditentukan dengan ketat oleh pemerintah pusat. Pemahaman siswa tentang kurikulum juga mulai diuji, melalui penggunaan ujian nasional yang diambil pada usia 7, 11, 14 dan 16.

3. Meningkatkan Partisipasi dalam Sekolah Pasca-Wajib

Ada dua kebijakan utama yang layak disebutkan dalam kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan partisipasi dalam sekolah pasca-wajib di Inggris. Yang pertama adalah upaya abadi (dan seringkali tidak efektif) pada reformasi kualifikasi, yang dirancang untuk meningkatkan daya tarik dan nilai pasar tenaga kerja kualifikasi kejuruan. Kebijakan kedua adalah pengenalan Tunjangan Pemeliharaan Pendidikan, yang membayar individu dari latar belakang yang kurang beruntung tunjangan kecil yang teruji jika mereka tetap mengikuti pendidikan penuh waktu di luar usia 16.

4. Reformasi Pendidikan Tinggi

Tujuan reformasi adalah untuk memungkinkan universitas meningkatkan pendanaan mereka, dengan mengenakan biaya kuliah yang lebih tinggi pada siswa, dan agar institusi membedakan diri mereka dengan membebaskan biaya yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada institusi lain. Oleh karena itu, universitas dapat mengenakan biaya yang lebih tinggi, hingga £ 3.000 per tahun. Biaya tidak dibayarkan di muka namun sebaliknya hutang biaya akan dibayarkan setelah kelulusan dan berdasarkan pendapatan kontingen. Dengan kata lain, lulusan dari pada siswa akan membayar kembali pinjaman biaya kuliah dan jika tingkat pendapatan mereka cukup rendah mereka tidak harus memenuhi pembayaran hutang pinjaman.

B. Pendidikan Di Finlandia

1. Latar Belakang Pendidikan di Finlandia

Revolusi sistem pendidikan Finlandia dimulai sejak tahun 1968, ketika pemerintah memutuskan untuk menghapus

sistem pendidikan berjenjang (*Parallel School System/PSS*) dan menggantikannya dengan sistem pendidikan wajib dasar nasional 9 tahun. PSS merupakan sistem pendidikan yang mengutamakan pendidikan berjenjang bagi seluruh siswa. Sistem ini dinilai tidak efektif karena pada kenyataannya terdapat perbedaan kemampuan murid dalam menerima dan mencerna ilmu yang diberikan. Hal tersebut menimbulkan fenomena pemberian peringkat dan labelisasi “siswa berprestasi” dan “siswa tidak berprestasi”, serta “sekolah favorit” dan “sekolah tidak favorit”. Kedua fenomena tersebut menimbulkan dampak buruk terhadap mentalitas murid, guru dan institusi pendidikan. Dengan fenomena tersebut, setiap murid tidak menerima kualitas pendidikan yang merata. Ada murid yang dapat mengikuti pendidikan percepatan, dan ada murid yang kerap kali terpaksa mengulang kelas. Oleh karena itu, pemerintah Finlandia beralih menggunakan sistem pendidikan wajib dasar nasional 9 tahun, di mana seluruh anak pada usia 7-15 tahun menerima materi dan kualitas pendidikan yang sama dan seragam.

Siswa tidak lagi mengejar angka dan peringkat selama menjalani pendidikan wajib dasar 9 tahun, namun mengejar pemahaman dan penerapan ilmu yang diberikan sesuai dengan kurikulum pendidikan dasar nasional. Sistem peringkat (ranking), baik peringkat siswa maupun peringkat sekolah (sekolah favorit atau non-favorit), serta sistem evaluasi ujian nasional untuk kenaikan kelas di tiap jenjang pendidikan wajib dasar nasional 9 tahun dihapus. Pendidikan dasar difokuskan pada upaya pembentukan karakter dan kapasitas dari setiap murid.

Upaya ini ditempuh pemerintah Finlandia untuk pemeratakan kemampuan seluruh murid tingkat pendidikan

wajib dasar. Sudah tentu, hal ini menuntut kerja sama lebih erat antara pemerintah, pihak penyelenggara pendidikan, khususnya para guru, masyarakat, dan orang tua dalam memantau perkembangan pendidikan dan pembelajaran anak murid guna memastikan bahwa tiap-tiap murid tersebut dapat mengikuti dan memahami materi pelajaran yang diberikan di jenjang pendidikan dasar.

“Rahasia Pendidikan di Finlandia satu diantaranya justru anti-full day school”. Michael yang lahir 23 April 1954 ini adalah seorang penulis buku dan sutradara film AS. Kali ini Michael membuat sebuah film yang menjawab kenapa pendidikan di Finlandia lebih baik dari Amerika bahkan melesat menjadi ranking 1 dunia. Michael menemui pejabat pengambil kebijakan pendidikan di Finlandia, kumpulkan pada guru serta mewawancarai para murid. Ternyata di luar bayangan. Fakta-fakta mengejutkan terungkap pada video pendek tersebut berdasarkan wawancara Michael Moore dengan berbagai pihak. Finlandia tidak menjadikan para murid sebagai orang yang tiap saat berkutat dengan soal-soal mata pelajaran. Justru sebaliknya, para guru menekankan pada siswa untuk lebih banyak memiliki waktu luang untuk bermain, bersosialisasi dengan teman-temannya, membaca buku serta menekuni semua minat serta bakatnya (Asmadi, 2017).

Sejak pertengahan tahun 1990, Badan Nasional Pendidikan Finlandia telah melakukan berbagai penilaian nasional (national assessments) dari hasil pembelajaran yang dilakukan terhadap seluruh murid sekolah dasar kelas 9 di seluruh sekolah di Finlandia. Penilaian rutin dilakukan terhadap mata pelajaran matematika, bahasa ibu (baik bahasa Finlandia, maupun Swedia), sastra, dan beberapa mata pelajaran pilihan lainnya.

Penilaian nasional tersebut menyediakan informasi tentang kualitas dan hasil pendidikan dan pelatihan yang dicapai untuk kemudian dipadankan dengan tujuan pendidikan yang tertuang dalam kurikulum dasar nasional.

Badan Nasional Pendidikan Finlandia, secara reguler, setiap tahun, melakukan penilaian nasional pendidikan, dengan mengambil sample nilai dari sekolah yang mewakili daerahnya secara acak. Nilai sample yang diperoleh kemudian diolah untuk menghasilkan suatu laporan evaluasi pendidikan nasional (national evaluation report) dan laporan dan masukan individual sekolah (individual feedback report). Laporan dan masukan individual sekolah tidak diterbitkan secara umum. Badan Pendidikan Nasional Finlandia tidak akan menampilkan data performa pendidikan yang dihasilkan tiap-tiap pemerintah daerah, atau sekolah per sekolah. Hal ini diterapkan guna menghindari fenomena stratanisasi peringkat sekolah dan siswa yang hanya akan menimbulkan dampak negatif naming and shaming.

2. Konsep Pendidikan di Finlandia

Pemerintah memberikan perhatian terhadap pendidikan lebih besar dari sektor lainnya, karena dengan cara seperti ini secara otomatis sektor lain juga akan berkembang dengan sendirinya. Jika di negaranegara maju memberlakukan “standardized test” untuk mengukur kemajuan siswa di sekolah, Finlandia tidak melakukan hal ini (Goodlad, 2013). Sistem pendidikan Finlandia berkeyakinan kemampuan murid tidaklah sama, jadi melakukan tes baku untuk semua murid sama sekali tidak menghasilkan mutu pendidikan yang baik. Di samping itu pendidikan di Finlandia tidak memotivasi siswa untuk menjadi siapa yang terpandai di sekolahnya (no competition),

namun lebih menekankan bagaimana membentuk “learning community” yaitu menggabungkan guru sebagai pendidik, siswa sebagai anak didik, dan masyarakat sebagai bagian dari pendidikan, sehingga kolaborasi ini yang membuat pendidikan lebih unggul karena semua merasa bertanggung jawab akan proses pendidikan (Kristiantari, 2015). Sekolah tingkat dasar dan menengah digabung, sehingga murid tidak perlu berganti sekolah pada usia 13 tahun. Dengan cara ini mereka terhindar dari masa peralihan yang bisa mengganggu dari satu sekolah ke sekolah lain.

Guru di Finlandia harus memiliki gelar master dan mengajar dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran kooperatif. Peserta didik di Finlandia memiliki jam belajar yang relatif singkat di sekolah. Pembiayaan pendidikan di Finlandia dari jenjang sekolah dasar hingga pendidikan tinggi dan pendidikan orang dewasa, hampir sepenuhnya dengan sumber publik.

Negara Finlandia memiliki kurikulum yang tidak pernah berubah, hal ini menyesuaikan dengan kultur yang ada di negara tersebut. Kementerian Pendidikan di Finlandia menyatakan bahwa pendidikan merupakan sektor pembangunan yang paling berpengaruh dalam perekonomian Negara. Pendidikan di Finlandia dikenal sebagai sistem pendidikan terbaik di seluruh dunia. Pada hasil tersebut, Finlandia menempati peringkat pertama di Literasi Membaca, keempat di Matematika, dan ketiga di Ilmu Alam. Pendidikan berkualitas tersebut bergantung banyak pada kualitas jajaran pendidiknya yang diberikan kebebasan penuh dalam meramu kurikulum dan menentukan metode dan materi belajar-mengajar. Keberhasilan tersebut telah menarik sekitar 100 delegasi dari 40-45 negara di seluruh dunia untuk mengunjungi Kementerian.

Pendidikan Finlandia pada masa 2005-2011 dan mempelajari kunci sukses sistem pendidikan disana. Sistem pendidikan di Finlandia tidak memberlakukan pemingkatan institusi pendidikan dan merupakan sistem inklusif dimana semua siswa dianggap setara dalam haknya untuk mendapatkan pendidikan. Terdapat pula tingkat pendidikan di Negara Finlandia, pada tingkat ini terbagi menjadi 6 bagian yaitu sebagai berikut

1. Pendidikan Pra Sekolah

Pendidikan prasekolah di Finlandia terdiri dari dua jenis. Pendidikan Usia Dini (usia 0-5) yang bersifat pilihan dan Pendidikan Pradasar (usia 6 tahun) yang bersifat wajib Pendidikan Usia Dini merupakan pendidikan menyeluruh yang terdiri dari pengasuhan, pendidikan, dan pengajaran kepada balita dengan tujuan mendidik mereka untuk memiliki keterampilan hidup dan dasar akademis (berhitung dan membaca) serta memastikan perkembangan sesuai dengan standar usia masing-masing. Pendidikan Pradasar berlaku wajib untuk semua anak berusia enam tahun. Siswa belajar keterampilan dasar dan pengetahuan umum berbagai bidang yang disesuaikan dengan usia dan kemampuan mereka.

2. Pendidikan Dasar

Pendidikan Dasar di Finlandia merupakan fase wajib belajar sembilan tahun bagi setiap anak berusia 7 hingga 15 tahun. Baru di tiga tahun terakhir terdapat guru-guru khusus untuk hampir setiap mata pelajaran. Tidak ada Ujian Nasional untuk tingkat pendidikan dasar. Evaluasi belajar siswa dilakukan secara berkelanjutan oleh guru terkait, dan laporan hasil belajar diberikan setidaknya sekali dalam satu tahun akademis. Hasil evaluasi inilah yang digunakan untuk

menentukan arah pembelajaran masing-masing siswa untuk memahami area-area pengembangan dirinya ke depannya dan menumbuhkan minat pembelajaran mandiri.

3. Pendidikan Menengah Atas

Pendidikan Menengah Atas di Finlandia terdiri dari dua jenis: Pendidikan Umum dan Pendidikan Vokasi Fasilitas umum (sekolah dan makan) disediakan gratis oleh pemerintah, namun murid mungkin harus membeli bukunya sendiri-sendiri. Pendidikan vokasi biasanya juga melihat pengalaman kerja dan faktor pendukung lainnya, seperti hasil ujian masuk dan tes bakat. Lulusan pendidikan umum maupun vokasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi (universitas).

4. Pendidikan Umum

Agensi Kependidikan Nasional Finlandia menentukan sasaran dan target pembelajaran serta modul pembelajaran masing-masing mata pelajaran. Pembelajaran bersifat modular tanpa tingkat kelas sehingga memungkinkan siswa untuk mencampur mata pelajaran dari pendidikan umum dan mata pelajaran dari pendidikan vokasi. Mata pelajaran yang diuji di ujian matrikulasi nasional adalah empat mata pelajaran wajib yang terdiri dari bahasa ibu dan pilihan dari tiga mata pelajaran ini: bahasa nasional kedua, bahasa asing, matematika, dan salah satu mata pelajaran umum (humaniora atau ilmu alam).

5. Pendidikan Vokasi

Kerangka kualifikasi pendidikan vokasi di Finlandia berdasarkan pada kerangka yang telah ada sejak awal tahun 1990-an yang bergantung banyak pada kerjasama dari pihak industri. Rencana pembelajaran bersifat unik dimana setiap siswa memiliki rencana pembelajarannya masing-masing

yang terdiri dari modul wajib dan modul pilihan. Evaluasi utama dari para siswa pendidikan vokasi adalah keterampilan praktek vokasi mereka.

6. Pendidikan Tinggi

Finlandia memiliki dua jenis universitas, yaitu umum dan ilmu terapan. Universitas umum mengedepankan riset dan intruksi ilmiah, sedangkan universitas terapan memprioritaskan penerapan ilmu secara praktis.

Universitas di Finlandia merupakan organisasi mandiri yang diatur oleh hukum. Setiap universitas bekerja sama dengan kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk menentukan target operasional dan kualitatif kebutuhan sumber daya setiap tiga tahun.

3. Problematika dan Kebijakan Pendidikan di Finlandia

Pada awal 1990-an, ekonomi finlandia mengalami penurunan secara drastis. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, pecahnya Negara Uni Soviet yang berdampak pada nilai ekspor dan liberalisasi pasar modal yang telah menyebabkan tingginya nilai inflasi.

Resesi dunia berdampak negatif bagi Finlandia, setelah mengalami pertumbuhan nol pada tahun 1990, PDB Finlandia menyusut 12% dari tahun 1991 sampai 1993 Tingkat pengangguran melonjak Meskipun pemerintah telah meluncurkan langkah-langkah penghematan yang keras pada tahun 1991, utang nasional melonjak 7 kali lipat dari tahun 1989, mencapai 67% dari PDB pada tahun 1995.

Setelah Finlandia pulih dari resesi, krisis ekonomi meninggalkan jejak dalam ekonomi dan masyarakat. Tingkat pengangguran yang melonjak dari 3% menjadi 18% di tahun 1990-an, tetap tinggi untuk hingga akhir dekade. Tingkat

pengangguran masih sekitar 7%, dan terus menciptakan masalah bagi masyarakat. Selain itu, pertumbuhan utang publik yang tinggi menyebabkan kewajiban pemerintah harus membayar pengembalian pinjaman yang besar pula, yang pada gilirannya menyebabkan penghematan anggaran terus berjalan termasuk anggaran pendidikan.

Adapun kunci keberhasilan Finlandia mengatasi resesi ekonomi yaitu dengan mengadakan kerja sama yang solid antara sektor swasta dan pemerintah. Konsekuensi dari resesi ekonomi adalah penyesuaian struktural termasuk pengangguran yang relatif tinggi dan keengganan perusahaan dan lembaga lembaga publik untuk memperkerjakan staf baru. Sistem subsidi Negara mengalami perombakan total pada awal 1990-an. Pemberian subsidi didasarkan pada jumlah siswa, bukan kebutuhan sekolah. Instusi pendidikan kejuruan sebelumnya telah melakukan antisipasi dengan meningkatkan jumlah siswa dan untuk menggunakan kelas secara efisien. Dengan demikian, sistem pendidikan kejuruan mampu mengakomodasikan peningkatan jumlah siswa tanpa harus meningkatkan total belanja. Biaya pendidikan didasarkan pada rata-rata pengeluaran riil siswa sesuai jenjang pendidikan.

Tujuan utama dari kebijakan pendidikan Finlandia adalah semua warga mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal menerima pendidikan, tanpa memperhitungkan usia, tempat tinggal, situasi keuangan, jenis kelamin atau orang tua. Pendidikan dianggap sebagai salah satu hak-hak dasar semua warga negara. Pertama, ketentuan tentang pendidikan dasar menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan dasar secara gratis, yang juga merupakan ketentuan wajib belajar. Kedua, pejabat publik juga berkewajiban untuk menjamin setiap

orang berkesempatan sama dalam memperoleh pendidikan lainnya selain pendidikan dasar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan khusus, dan untuk mengembangkan diri File_ Perbandingan Kurikulum 2017 agar terhindar dari kesulitan ekonomi. Pejabat publik wajib menyediakan untuk kebutuhan pendidikan di Finlandia.

1. Pekerjaan Rumah (PR) diberikan sesedikit mungkin. Maksimum hanya menghabiskan waktu setengah jam untuk belajar di rumah.
2. Guru yang mengajar di sekolah dasar semuanya harus tamatan S2 dan itupun harus sepuluh besar dari fakultas keguruan.
3. Di Finlandia guru bebas memilih Rancangan pembelajaran (RPP) dan buku pelajaran yang sesuai dengan pertimbangannya.
4. Dalam proses pembelajaran hampir semua guru menciptakan metode mengajar yang menyenangkan (learning is fun) motivasi intrinsik adalah kata kunci keberhasilan siswa.
5. Dalam pengaturan kelas di Finlandia tidak ada pengkastaan kelas (kelas khusus atau plus dan kelas biasa, kelas reguler dan non-reguler atau sekolah bilingual). Sekolah swasta mendapat besaran dana yang sama dengan sekolah negeri.
6. Bahasa Inggris mulai diajarkan di kelas III sekolah dasar.
7. Jumlah hari bersekolah di Finlandia hanya 190 hari per tahun (Indonesia 220 hari per tahun. Jumlah hari libur 30 kali lebih banyak dibandingkan dengan Indonesia). Mereka berpandangan semakin banyak hari libur anak semakin pintar, dan selama masa libur tidak boleh ada PR. Hal ini akan membuat libur sekolah tidak menyenangkan. Suasana belajar sangat santai, karena banyak instruksi akan membuat anak tertekan.

BAB IX

KONSEP PENDIDIKAN, PROBLEMATIKA DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI AMERIKA

A. Politik Pendidikan Amerika Serikat

PADA UMUMNYA kebijakan pendidikan yang diambil di suatu Negara cenderung dijadikan alat intervensi negara kepada warga negaranya. Bentuk intervensi itu dapat berupa justifikasi (diakui/tidaknya) ilmu pengetahuan tertentu, pengaturan kelembagaan sekolah, lama pendidikan dan gelar, serta kualifikasi pendidikan yang dikaitkan dengan posisi pekerjaan (jabatan). Pada tataran pendidikan tertentu biasanya akan lebih mudah untuk dilaksanakan intervensi tersebut. Di antara jenjang pendidikan sekolah (mulai dari tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi) yang ada, umumnya Negara lebih memilih mengkonsentrasikan kekuasaannya untuk mengintervensi pendidikan sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak, remaja dan kaum muda. Hampir tidak ada negara yang menaruh perhatian cukup besar pada pendidikan untuk orang-orang dewasa. Pertanyaannya adalah; mengapa negara lebih memilih memusatkan perhatiannya kepada pendidikan anak-anak (muda) dibandingkan dengan pendidikan orang dewasa?. Sebenarnya jawabannya sepele saja, karena anak-anak muda adalah generasi penerus bangsa.

Pada tingkat anak-anak (muda) sangat mudah untuk dipengaruhi pola berpikirnya. Dengan demikian masa-masa itu harus dijadikan timing yang tepat untuk membentuknya. Sebagian negara yang lain memiliki alasan bahwa sekolah cukup menarik untuk dikuasai, dimana di dalamnya terdapat generasi yang sangat mudah untuk dipengaruhi.

Ada juga sebagian negara beralasan karena hak suara untuk pemilihan politik di masa yang akan datang perlu proses sosialisasi, dan itu cocok dilakukan untuk anak-anak melalui sekolah-sekolahnya. Pendidikan bagi sebagian masyarakat sudah dianggap sebagai kebutuhan dasar dan bukan lagi menjadi kebutuhan sekunder. Karena itu para orang tua berbondong-bondong memasukkan anaknya di berbagai lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan formal yang diselenggarakan atau diakreditasi oleh negara. Campur tangan dan intervensi negara pada pendidikan sekolah formal tampaknya sering diabaikan oleh para orang tua. Oleh sebab itu perlu adanya mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang dewasa (masyarakat) setempat terhadap penyelenggaraan pendidikan sekolah-sekolah formal agar intervensi (kebijakan) negara dalam sektor pendidikan bermakna positif bagi generasi berikutnya yang lebih handal, sekaligus untuk mengurangi terjadinya peluang penyimpangan yang mungkin dilakukan negara dalam kegiatan intervensinya itu.

Di negara-negara demokrasi, kesadaran untuk mengawasi dan membatasi intervensi pemerintah pada sektor pendidikan itu ditandai dengan dipilihnya asas desentralisasi dalam pengambilan kebijakan (pengaturan) sektor pendidikan. Amerika Serikat adalah salah satu Negara pelopor demokrasi.

Sudah sejak lama kebijakan pendidikan di Amerika Serikat menjadi tanggung jawab Pemerintah Negara Bagian (State) dan Pemerintah Daerah (Distrik).

Sebelumnya, Pemerintah Pusat memang mengintervensi kebijakan pendidikan, sebagaimana yang terjadi sejak tahun 1872, dimana Pemerintah Pusat AS mengintervensi kebijakan pendidikan dengan cara memberikan tanah negara kepada Negara Bagian untuk pembangunan fakultas-fakultas pertanian dan teknik, membantu sekolah dengan program makan siang, menyediakan pendidikan bagi orang-orang Indian, menyediakan dana pendidikan bagi para veteran yang kembali ke kampus untuk menempuh pendidikan lanjutan, menyediakan pinjaman bagi mahasiswa, menyediakan anggaran untuk keperluan penelitian, pertukaran mahasiswa asing dan bantuan berbagai kebutuhan mahasiswa lainnya, serta memberikan bantuan tidak langsung (karena menurut ketentuan Undang-Undang Amerika Serikat pemerintah dilarang memberikan bantuan langsung) kepada sekolah-sekolah agama dalam bentuk buku-buku teks dan laboratorium.

Namun semenjak masa Pemerintahan Presiden Ronald Reagan, intervensi Pemerintah Pusat AS terhadap pendidikan mulai dikurangi. Hal ini terungkap dalam kepercayaan Reagan bahwa pemerintah terlalu mencampuri kehidupan masyarakat. Ia ingin mengurangi program-program yang menurutnya tidak dibutuhkan rakyat dengan menghapus “pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan.” Selanjutnya tanggung jawab dan inisiatif kebijakan pendidikan diserahkan kepada Negara Bagian (setingkat Propinsi) dan Pemerintah Daerah/Distrik (setingkat Kabupaten/Kota). Di Amerika Serikat terdapat 50 negara bagian dan 15.358 distrik. Jadi sebanyak itu lembaga

yang diberi kewenangan dan otonomi untuk mengelola pendidikan.

B. Tujuan Pendidikan Amerika

Sistem pendidikan di Amerika Serikat (AS) mencerminkan ciri dari sistem pemerintahan di sana yaitu federal dengan desentralisasi melalui pemerintahan negara-negara bagian (states). Penanggung jawab utama sistem pendidikan di sana adalah departemen pendidikan pemerintah federal di Washington D.C, namun kegiatan sehari-hari didelegasikan penuh kepada pemerintah setiap Negara bagian yang kemudian mendelegasikannya lagi kepada Kantor Pendidikan Distrik (Public School District), dan kepada badan-badan penyantun college dan universitas.

Sebagaimana dideskripsikan di atas bahwa karakteristik utama politik sistem pendidikan Amerika Serikat adalah menonjolnya desentralisasi. Pemerintah Pusat sangat memberi otonomi seluas-luasnya kepada Pemerintah di bawahnya, yaitu Negara Bagian dan Pemerintah Daerah (Distrik). Meskipun Amerika Serikat tidak mempunyai sistem pendidikan yang terpusat atau yang bersifat nasional, akan tetapi bukan berarti tidak ada rumusan tentang tujuan pendidikan yang berlaku secara nasional. Tujuan sistem pendidikan Amerika secara umum dirumuskan dalam 5 poin sebagai berikut:

1. Untuk mencapai kesatuan dalam keragaman;
2. Untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi;
3. Untuk membantu pengembangan individu;
4. Untuk memperbaiki kondisi social masyarakat; dan
5. Untuk mempercepat kemajuan nasional.

Di luar 5 tujuan tersebut, Amerika Serikat mengembangkan visi dan misi pendidikan gratis bagi anak usia sekolah untuk masa 12 tahun pendidikan awal, dan biaya pendidikan relatif murah untuk tingkat pendidikan tinggi.

C. Manajemen Pendidikan Amerika

Manajemen pendidikan di AS dikembangkan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Negara Bagian dan Pemerintah Daerah setempat. Hal ini dilakukan mengingat AS adalah Negara dengan system desentralisasi. Di tingkat nasional (federal/pusat) dibentuk satu departemen, yaitu Departemen Pendidikan Federal. Jadi meski dalam sistem pendidikan di Amerika, sekolah adalah tanggung jawab pemerintah lokal, Departemen Pendidikan menyediakan kepemimpinan nasional untuk menjawab isu-isu penting dalam pendidikan Amerika.

Departemen ini dipimpin oleh seorang setaraf Sekretaris Kabinet. Tugas departemen ini adalah melaksanakan semua kebijakan pemerintah federal dalam sektor pendidikan di semua tingkatan pemerintahan dan untuk semua jenjang pendidikan. Tetapi, karena sebagian besar kewenangan dan tanggung jawab pendidikan sudah diserahkan kepada Negara Bagian dan Pemerintah Daerah, maka Departemen Pendidikan Federal hanya menjalankan monitoring dan pengawasan saja.

Di tingkat Negara Bagian dibentuk sebuah badan yang diberi nama Board of Education. Badan ini bertugas dan berfungsi membuat kebijakan-kebijakan serta menentukan anggaran pendidikan untuk masing-masing wilayah (Negara Bagian) nya, khususnya berkenaan dengan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Selanjutnya, untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan hal-hal yang lebih teknis

(yaitu; tentang kurikulum sekolah, penentuan persyaratan sertifikasi, guru-guru, dan pembiayaan sekolah) dibentuk sebuah bagian pendidikan yang disebut sebagai commissioner, sering juga disebut sebagai superintendent Bagian ini dipimpin oleh seorang yang ditunjuk oleh Board of Education atau oleh Gubernur.

Untuk beberapa Negara Bagian, pimpinan Bagian Pendidikan ini dipilih oleh masyarakat. Sementara itu pada level operasional, pelaksanaan manajemen pendidikan dijalankan oleh unit-unit yang lebih rendah, bahkan banyak secara langsung dilaksanakan oleh masing-masing sekolah yang bersangkutan. Para pimpinan atau Kepala Sekolah pada prinsipnya memiliki kebebasan dan otonomi yang luas untuk menjalankan manajemen operasional pendidikan. Khusus untuk menangani kebijakan Pendidikan Tinggi, manajemen pendidikan Amerika Serikat yang dikembangkan oleh Negara-Negara Bagian memisahkan antara Badan yang memberi izin pendirian Perguruan Tinggi (Negeri dan Swasta) dengan Badan yang merumuskan kebijakan akademik serta keuangan. Badan yang menangani kebijakan akademik dan keuangan untuk pendidikan Tinggi adalah board of trustees. Untuk Perguruan Tinggi Negeri anggota badan tersebut ditunjuk oleh Gubernur Negara Bagian. Ada juga yang dipilih dari dan oleh kelompok yang akan diwakili. Sedangkan untuk Perguruan Tinggi Swasta anggota badan tersebut dipilih dari perguruan tinggi masing-masing.

D. Pendanaan Pendidikan Amerika

Sumber pendanaan pendidikan di Amerika, khususnya pendidikan dasar dan menengah, yang lebih dikenal dengan public schools, berasal dari Anggaran Pemerintah Pusat

(*Federal*), Anggaran Pemerintah Negara Bagian dan Anggaran Pemerintah Daerah.

E. Isu-isu Pendidikan Amerika

Pada dekade 1990-an, Departemen Pendidikan memfokuskan pada isu-isu berikut: meningkatkan standar seluruh siswa, memajukan pengajaran, melibatkan orangtua dan keluarga dalam pendidikan anak, penciptaan sekolah yang aman, disiplin dan bebas narkoba, mempererat hubungan antara sekolah dan dunia kerja, meningkatkan akses bantuan financial untuk para siswa agar dapat kuliah dan menerima pelatihan, serta membantu seluruh siswa agar melek teknologi.

Menurut hasil studi perbandingan yang dilakukan oleh Agustiar Syah Nur (2001), seperti dikutip oleh Ulul Albab; ada beberapa isu dan masalah pendidikan yang dialami pemerintah dan masyarakat Amerika Serikat, antara lain:

1. Banyaknya anak usia sekolah yang tidak diasuh langsung oleh orang tua mereka, karena adanya dinamika perubahan social masyarakat AS yang umumnya baik sang ibu atau sang ayah memiliki kesibukan yang sangat tinggi di luar rumah. Hal ini akan a. menjadi permasalahan yang serius bagi perkembangan social anak dilihat dari aspek psikis dan emosional.
2. Tingginya tingkat perceraian, yang mengakibatkan banyaknya anak-anak usia sekolah yang hanya diasuh oleh sang ibu sebagai single-parent dalam rumah tangga. Tidak sedikit janda cerei di AS yang terpaksa harus berporfesi rendah dan kasar. Hal ini jugamempengaruhi perkembangan social anak-anak mereka.
3. Tingginya tingkat imigrasi yang umumnya berasal dari kalangan tidak mampu dan tidak terdidik, yang karenanya

banyak diantara mereka yang tidak memperoleh pekerjaan yang layak. Hal ini menyebabkan masalah pendidikan anak-anak dari keluarga imigran tidak dapat teratasi. Ditambah lagi faktor bahasa dari kalangan imigran yang menyulitkan bagi anak-anak imigran itu sendiri jika mereka mendapat akses pendidikan.

4. Dari berbagai monitoring dan evaluasi pendidikan yang dilakukan oleh berbagai badan resmi AS sendiri, ternyata kualitas pendidikan dan lulusan sekolah di AS masih kalah dibandingkan dengan negara-negara lain dalam standar internasional. Banyak anak-anak yang drop-outs dan tingginya kekerasan oleh anak-anak.

F. Reformasi Pendidikan Amerika

Karena adanya berbagai permasalahan tersebut, pemerintah AS sejak tahun 1990 mencanangkan reformasi pendidikan. Nampaknya George Bush masih melanjutkan kebijakan Reagan bahwa terdapat industri swasta serta pemerintah local dan Negara bagian turut menanggung biaya kebijakan pemerintah. Pada tahun tersebut Presiden AS George H. B. Bush beserta seluruh Gubernur Negara Bagian (saat itu Bill Clinton termasuk menjadi salah satu Gubernur Negara Bagian) menyetujui reformasi pendidikan dengan mencanangkan 6 tujuan nasional pendidikan AS yang baru. Yaitu:

1. Pada tahun 2000, seluruh anak di AS di waktu mulai masuk sekolah dasar sudah siap untuk belajar.
2. Pada tahun 2000, tamatan sekolah menengah naik sekurang-kurangnya 90%.
3. Pada tahun 2000, murid-murid di AS yang menyelesaikan pendidikannya pada “grade 4, 8 dan 12” mampu menunjukkan kemampuannya dalam mata pelajaran yang menantang,

yaitu bahasa Inggris, matematika, sains, sejarah, dan geografi. Setiap sekolah di AS harus mampu menunjukkan bahwa anak-anak dapat menggunakan pikirannya dengan baik, sehingga mereka siap menjadi warga negara yang baik, siap untuk memasuki pendidikan yang lebih tinggi, serta siap pula untuk pekerjaan yang produktif dalam perekonomian modern.

4. Pada tahun 2000, siswa-siswa AS adalah yang terbaik di dunia dalam bidang sains dan matematika.
5. Pada tahun 2000, setiap orang dewasa AS dapat membaca dan menulis, memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bersaing dalam ekonomi global, serta dapat melaksanakan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.
6. Pada tahun 2000, setiap sekolah di AS harus bebas dari obat-obat terlarang dan kekerasan, serta dapat menciptakan suasana lingkungan yang mantap dan aman sehingga kondusif untuk belajar. Pokok-pokok reformasi tersebut dimaksudkan sebagai pegangan dalam membuat kebijakan-kebijakan pendidikan yang sudah harus segera diimplementasikan dan hasilnya sudah harus kelihatan pada tahun 2000. Dan memang itulah yang terjadi di AS. Pokok-pokok reformasi pendidikan itu akhirnya ditindak lanjuti dengan berbagai kreasi kebijakan pendidikan di tingkat negara bagian dan pemerintah daerah. Gerakan reformasi pendidikan di kalangan Gubernur itu dipelopori oleh Gubernur Bill Clinton dan Lamar Alexander di masing-masing negara bagiannya. Gebrakan yang dilakukan adalah:
 - a. Meningkatkan persyaratan untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan

- b. Melaksanakan test standar untuk mengukur keberhasilan siswa
- c. Menjalankan sistem penilaian yang ketat terhadap guru sejalan dengan pembenahan jenjang karir bagi guru-guru
- d. Memperbesar tambahan dana dari negara bagian bagi sekolah sekolah. Tambahan dana baru ini pada umumnya dipakai untuk meningkatkan gaji guru yang kala itu masih berada pada taraf sangat rendah. Akhirnya AS benar-benar memperoleh kemajuan di bidang pendidikan, sehingga ketika Bill Clinton menjadi Presiden AS, keberhasilan AS dalam mengembangkan kebijakan pendidikan mendapat perhatian khusus.

BAB X

LATAR BELAKANG, KONSEP PENDIDIKAN, PROBLEMATIKA DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI NEGARA AFRIKA UTARA

A. Pendidikan di Sudan

1. Latar Belakang Pendidikan di Sudan

NAMA "SUDAN" berasal dari bahasa Arab "Bilad as Sudan" yang berarti "Tanah Hitam". Sejarah panjang Sudan terjadi karena kontak pertama antara penduduk AfrikaUtara/Mesir dengan penduduk kulit hitam di sepanjang sungai Nil pada abad ke-3 SM yang kemudian dikenal sebagai Nubia. Pada abad ke-6 misionaris Kristen memasuki Sudan dari Mesir, tetapi penyebaran agama ini dipaksakan oleh Muslim Nubian-Arab. Agama Kristen tumbuh dan berkembang pada abad ke-18 hingga abad ke-19 dan dapat bertahan di wilayah Sudan Selatan hingga sekarang. Pada abad ke-18 Mesir adalah wilayah Kekaisaran Ottoman Turki dan Sudan termasuk di dalamnya. Setelah penurunan kekuasaan Turki, Inggris muncul sebagai penguasa baru di Mesir dan Sudan.

Sudan memiliki nama resmi Republik Sudan, merupakan salah satu negara yang berada di Afrika Utara (Afrika Timur Laut). Negara ini merdeka dari jajahan Inggris pada 1 Januari 1956. Sudan merupakan sebuah Negara yang beradadi benua

Afrika di bagian utara. Secara letak geografisnya. Negara ini berbatasan dengan Mesir disebelah utara, di bagian Selatan berbatasan dengan Sudan Selatan, di sebelah barat daya berbatasan dengan Afrika Tengah dan Kongo serta sebelah Barat berbatasan dengan Chad dan di bagian barat lautnya berbatasan dengan Libya. Bagian timur laut benua Afrika, terbentang antara 4° dan 23° lintang utara, serta 22° dan 38° bujur timur merupakan letak dan luas wilayah Sudan. Negara terluas di benua Afrika adalah Sudan dimana sekitar 1,25% lebih besar dari wilayah Amerika Serikat. Untuk total wilayah Sudan mencakup 2.505.810 km² (+1 juta mil²) dan 8,3% dari seluruh luas benua Afrika. Luas daratannya mencapai 2.376.000 km² wilayah laut dan luas sungainya mencapai 129.810 km².

2. Konsep Pendidikan di Sudan

Pemerintah Sudan Selatan berjuang untuk mengatur sistem pendidikan yang ada dinegara ini selama perang yang berakhir dengan penandatanganan perjanjian damai pada tahun 2005. Memulai kebijakan pendidikan, memperkuat administrasi pendidikan, membuat kurikulum praktis dan melatih guru adalah dasar masalah yang perlu dipecahkan untuk memastikan masa depan pembelajaran yang baik bagi semua. Tetapi ketika mencari solusi untuk masalah-masalah krusial ini, pemberontakan lain pecah dari pembagian kekuasaan antara presiden dan wakil presiden sejak 2013 merusak rencana keberhasilan menurut rencana pendidikan internasional untuk pendidikan untuk semua, EFA.

Pendidikan di Sudan gratis dan wajib untuk semua anak berusia 6 hingga 13 tahun. Pendidikan dimulai dengan pendidikan dasar selama delapan tahun, kemudian pendidikan

menengah selama tiga tahun. Tingkat pendidikan diubah menjadi format 6 + 3 + 3 pada tahun 1990. Bahasa pengantar yang digunakan di semua tingkatan adalah bahasa Arab. Lokasi sekolah terkonsentrasi di sejumlah wilayah perkotaan, di mana sejumlah sekolah yang terletak di selatan dan barat telah rusak atau bahkan hancur akibat konflik di tanah air.

Pada tahun 2001, Bank Dunia memperkirakan bahwa partisipasi murni siswa sekolah dasar adalah 46% dan bahwa 21 persen siswa sekolah menengah yang memenuhi persyaratan tertentu. Keberlangsungan pendidikan di Sudan sangat bervariasi, di beberapa provinsi bahkan di bawah 20%. Negara Sudan memiliki 19 universitas yang berbahasa Arab. Pendidikan menengah dan pendidikan tinggi di universitas sangat terhambat oleh kenyataan bahwa sebagian besar penduduk laki-laki menjalani wajib militer sebelum menyelesaikan pendidikan mereka. Menurut perkiraan Bank Dunia, pada tahun 2000 tingkat melek huruf untuk orang dewasa berusia 15 tahun ke atas hampir 58% (69% untuk pria, 46% untuk wanita). Sementara itu, pada tahun 2002, angka melek huruf untuk orang dewasa berusia 15 tahun ke atas mencapai 60 persen dan angka buta huruf untuk remaja (usia 15-24) diperkirakan mencapai 23%.

Sudan memiliki banyak universitas ternama yang berusia puluhan bahkan ratusan tahun di bidang pendidikan formal. Diantara universitas itu diantaranya, Universitas Islam Omdurman, Universitas el-Nilein, Institut Bahasa Arab Internasional Khartoum, Universitas Khartoum, Universitas Al-Quran al-Karim dan yang termuda adalah Universitas Internasional Afrika. Jumlah mahasiswa dan pelajar Indonesia di Sudan hingga saat ini tercatat sekitar 175 orang yang terbagi

dalam tujuh universitas besar di Sudan, dengan program yang berbeda mulai dari program sarjana hingga program doktor, dimana 35% di antaranya adalah mahasiswa pascasarjana. Dari seluruh mahasiswa yang ada, 40% diantaranya melaksanakan perkuliahan dengan biaya sendiri tanpa bantuan dari instansi atau sponsor lain, dan hanya mengandalkan bantuan dari keluarga yang tidak mereka terima secara berkala. Kondisi kehidupan di Sudan sementara itu cukup sulit dengan perbandingan harga barang yang lumayan jauh melebihi standar harga barang yang ada di Negara di Indonesia (mencapai 1:3).

Negara Sudan dalam bidang pendidikan non-formal, banyak majelis ilmiah yang menggunakan sistem talaqqi melalui para masyakh yang tersebar hampir di seluruh Negara Sudan, dan di antara jamaah yang paling banyak eksis di bidang ini yaitu Jamaah Ansar Sunnah Al Muhammadiyah yang menyebarkan Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dengan pemahaman Salaf as-Salih.

Banyak diantara majelis ilmiah dinegara Sudan, yang menggunakan sistem talaqqi melalui para masyakh yang menyebar hampir di seluruh pelosok Negara Sudan. Karena memiliki stabilitas politik yang baik maka Sudan dan Mesir memiliki pendidikan yang maju. Gejala politik politik Mesir dan Sudan al-Azhar masih bertahan karena memiliki akar pendidikan yang kuat. pada tahun 1990 dimana tingkat pendidikan dirubah menjadi format 6 + 3 + 3. Bahasa Arab adalah bahasa pengantar yang digunakan disemua tingkatan. Lokasi sekolah terkonsentrasi di sejumlah wilayah perkotaan, untuk sejumlah sekolah yang berada di Selatan dan Barat telah rusak dan bahkan hancur diakibatkan oleh konflik di tanah air Sudan sendiri.

Pada umumnya, Kuliah di Sudan cukup terprogram. Maksudnya perguruan tinggi mempunyaiperencanaan strategis yang matang dan lumayan lengkap di mulai dari awal mahasiswa mendaftar sebagai mahasiswa, awal perkuliahan, libur semester I, ujian semester I, perkuliahan awal semester II, dan seterusnya. Penyimpangan dari satu titik program yang direncanakan tentu akan mengakibatkan gangguan yang signifikan terhadap program secara keseluruhan. Secara umum sistem dua semester yang diterapkan oleh universitas di Sudan. Barangkali salah satu universitas di Sudan yang masih menggunakan sistem 1semester yaitu Universitas Islam Pascasarjana Omdurman.

Untuk sistem dua semester ini banyak keutamaan yang diperoleh, diantaranya materi yang akan diujikan belum sempat menumpuk dan masih berada di dalam ingatan, sehingga dalam menjawab soal dalam ujian, tingkat akurasi relative lebih tinggi dari sistem satu semester per tahun. Sedangkan bahasa Arab Fusha adalah bahasa perkuliahan yang di pakai di semua perguruan tinggi di Sudan. Meskipun di Negara Sudan juga di temukan bahasa pasaran juga, akan tetapi mereka senantiasa melayani orang-orang Asing dengan menggunakan bahasa Arab Fusha. Barangkali ini mungkin tidak ditemukan di Negara Arab lain. Disamping itu, sebagian besarperguruan tinggi di Sudan menerapkan sistem hafalan. Bahkan di sejumlah perguruan terutama perguruan Islam, mewajibkan hafalan sejumlah juz al-Qur'an atau sejumlah hadits, baik untuk tingkat S1 maupun tingkat S2 dan S3.

Banyak mahasiswa yang diharuskan hadir di kelas pada sistem pengajaran di ruang kampus,karena sistem absensi yang ketat. Hal ini bertujuanagar mahasiswa dapat mendengar

informasi langsung dari dosen yang bersangkutan. Bahasa fushah (bahasa Arab resmi) adalah bahasa yang digunakan di kampus, hal inilah yang menjadikan mahasiswa tidak cepat bosan dalam mendengarkan penjelasan dosen. Jika mahasiswa kurang paham dalam memahami materi yang disampaikan, bisa langsung menemui dosen tersebut baik di ruang dosen, masjid, rumah atau di mana saja.

Mahasiswa bahkan dapat menghubungi dosen dengan telepon dan membuat janji untuk pertemuan, terlebih bagi program magister dan doktor yang tengah menyusun skripsi atau disertasi tentunya. Hal ini tentu sangat membantu siswa dalam proses pembelajaran. Terkadang beberapa dosen memberikan tugas kertas (baht) kepada mahasiswa. Jangka waktu yang ditempuh selama menempuh pendidikan di masing-masing perguruan tinggi, untuk jenjang S-1 minimal 4 tahun dan untuk jenjang S-2 dan jenjang S-3 antara 2 tahun sampai 4 tahun.

Dari kenyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan di Sudan dimulai dari sekolah dasar, kemudian sekolah menengah. Jenjang di atasnya adalah Pendidikan dan Pelatihan Vokasi/Teknik atau Pendidikan Universitas/Perguruan Tinggi. Selain itu, ada Diklat Guru Prajabatan dan Diklat Guru Jabatan. Pendidikan nonformal, di sudan banyak majelis ilmiah yang menggunakan sistem talaqqi melalui masyaikh yang tersebar hampir di seluruh sudan, dan diantara jamaah yang ada paling banyak di bidang ini adalah jamaah ansar sunnah al muhammadiyah yang menyebarkan da' wah jamaah ahlus sunnah wal dengan pemahaman salaf sebagai orang yang bertaqwa.

3. Problematika dan Kebijakan Pendidikan di Inggris

Sebelum tahun 2009, kebijakan diberlakukan untuk memberikan pertimbangan khusus kepada pelamar siswa dari negara bagian yang kurang berkembang. Di bawah kebijakan ini, pelamar negara bagian yang berbeda memiliki kompetisi terpisah untuk masuk. Selain itu, persentase khusus dialokasikan untuk siswa dari daerah pedesaan dan terpencil dan daerah yang dilanda perang. Langkah-langkah tambahan diambil untuk mempromosikan keragaman geografis dalam pendidikan tinggi, di mana universitas-universitas baru didirikan di seluruh Sudan, untuk melayani siswa regional dengan lebih baik (Amin, 2010). Sayangnya, menyediakannya yang cukup untuk universitas-universitas ini menjadi tantangan, mengingat keadaan ekonomi Sudan yang genting dan pengeluaran besar pemerintah untuk militer (pada tahun 2018, 70% dari anggaran digunakan untuk pengeluaran militer, dan total 3% untuk semua tingkatan Pendidikan).

Selain penjelesan di atas terkait pembiayaan pendidikan di Sudan juga terlihat dari eksperimen manajemen wakaf di Sudan dimulai pada tahun 1987 dengan kembali mengatur manajemen wakaf dengan nama Badan Wakaf Islam untuk bekerja tanpa ada keterikatan secara birokratis dengan kementerian wakaf. Badan wakaf ini telah diberi wewenang yang luas dalam mengatur dan melaksanakan semua tugas yang berhubungan dengan wakaf yang tidak diketahui akte dan syarat-syarat wakifnya. Pembaruan dilakukan pada sistem pengaturan program penggalangan wakaf dan sistem pengaturan pada manajemen dan investasi harta wakaf yang ada.

Kemudian kondisi terkini di Sudan Selatan mengalami krisis yang telah menghambat pendidikan bagi sebagian

besar anak-anak negara itu. Sekolah di seluruh negeri sering ditutup karena pertempuran dan ancaman kekerasan, dan ratusan sekolah dan aset sipil lainnya dijarah dan dihancurkan. Diperkirakan 72% anak putus sekolah di tingkat dasar dan 76% anak perempuan putus sekolah – angka tertinggi secara global. Di tingkat sekolah menengah pertama, dilaporkan bahwa 60% anak-anak ditolak aksesnya ke pendidikan yang merupakan tingkat tertinggi kedua di Dunia. Sejak awal konflik hingga saat ini, 293 insiden serangan terhadap sekolah atau orang yang dilindungi atau penggunaan sekolah oleh militer dilaporkan di seluruh negeri. Insiden ini secara kumulatif mempengaruhi lebih dari 90,000 anak.

Adapun Solusi untuk masalah ini diantaranya, Deklarasi Sekolah Aman merupakan komitmen politik antar pemerintah yang memberikan negara kesempatan untuk menyatakan dukungan untuk melindungi siswa, guru, sekolah, dan universitas dari serangan selama masa konflik bersenjata. pentingnya kelanjutan pendidikan selama konflik bersenjata dan penerapan langkah-langkah konkrit untuk mencegah penggunaan sekolah oleh militer. Kementerian Pendidikan dan Pengajaran Umum, dan Yayasan Amal dan Pemberdayaan (CEF), dengan dukungan dari Save the Children International mengembangkan pedoman untuk memfasilitasi penyebaran pedoman Deklarasi yang dimasukkan ke dalam kode Pasukan Pertahanan Rakyat Sudan Selatan (SSPDF) mengadakan Badan Kerjasama Pembangunan Norwegia (NORAD) menyediakan dana tersebut.

B. Pendidikan Di Mesir

1. Latar Belakang Pendidikan di Mesir

Dalam Bahasa Indonesia, kata Mesir berasal dari istilah Arab Misr atau [mis'r] pengucapannya dalam bahasa Arab Mesir: [mes'r]; dalam Arab klasik disebut dengan مصر demikian juga dalam Al Quran serta menjadi nama resmi Negara Mesir atau Egypt dalam Bahasa Inggris (PBB). Mesir juga merupakan negara terbesar ke-30 dunia. Republik Arab Mesir dengan luas sekitar 1 juta km persegi berpenduduk sekitar 67.273.906 jiwa pada tahun 1997. Pertumbuhan penduduk termasuk tertinggi di dunia yaitu 2,75% pertahun 1970.

Menurut Ananda, pesatnya pertumbuhan penduduk berdampak pada masyarakat Mesir terutama pada struktur sosialnya. Secara geografis, Republik Arab Mesir adalah negara yang terdapat pada benua Afrika bagian timur laut di sebelah Libya dan bagian selatan bersebelahan dengan Sudan. Negara tersebut terletak pada garis lintang 22 ° dan 32 ° N, dan garis bujur 25 ° dan 35 °.Selanjutnya daratan Mesir dilalui oleh sungai nil yang membelah negeri tersebut dari utara sampai ke selatan, sehingga membagi Negara menjadi dua daerah Mesir atas dan Mesir bawah. Terdapat 26 provinsi yang membagi pada kedua daerah tersebut menjadi kegubernuran. Selanjutnya terbagi menjadi 150 kabupaten, 808 buah kecamatan dengan luas daerah yang berbeda. Desentralisasi menjadi sistem pemerintahan semenjak tahun 1979. Menurut Nursistem tersebut yang memberikan ruang kekuasaan gubernur sebagai wakil presiden di daerah, sehingga keterlibatan masyarakat dalam kebijakan serta keputusan pemerintah dalam kaitan dengan kebutuhan masyarakat lapisan bawah terutama masalah sosio-ekonomi.

Dalam hal peradaban, Mesir dikenal dengan peninggalan budaya kuno dan monumen kuno yang terkenal megah di dunia dan mendapat pengakuan luas sebagai pusat utama budaya dan politik di wilayah Timur Tengah terutamanya Arab. Dikenal juga sebagai pusat kebudayaan dunia zaman purba, terbukti dengan banyaknya peninggalan- peninggalan kebudayaan kuno seperti sphinx, obelisk, piramida, dan hieroglif. Giza dan Sakara menjadi daerah yang terdapat banyak piramida. Sementara di Sakara Sphinx bisa banyak terlihat yang dibangun pada 5000 tahun yang silam. Piramida sendiri sebenarnya adalah kuburan para raja sementara Sphinx adalah patung berbadan singa dan berkepala manusia yang dimaksudkan untuk melindungi makam raja. Sementara itu obelisk yang terbuat dari batu merupakan tugu berbentuk segi empat. tulisan dan lukisan pada peninggalan-peninggalan kuno tersebut disebut dengan hieroglif.

Agama sangat identik dalam kehidupan di Mesir. Dapat dilihat dari beberapa hal yang menjadi keseharian di masyarakat seperti azan yang dijadikan sebagai patokan waktu kegiatan dikumandangkan lima kali setiap harinya. Kota Kairo dikenal juga dengan menara-menara masjid dan beberapa gereja. Pada era kekinian terjadi transformasi kehidupan masyarakat yang mengamalkan ajaran Islam yang penuh dengan rahmat, kasih sayang serta pemaaf. Hal tersebut dikarenakan ajaran Islam berhasil menanamkan nilai-nilai sosial budaya dan bahasa mereka yang berkeadaban. Dalam konstitusi atau perundang-undangan, semuanya diharuskan sejalan dengan hukum Islam. Melalui penetapan Kementerian Agama, mazhab yang diakui negara secara resmi adalah mazhab Hanafi. Pelatihan-pelatihan keahlian untuk menjadi imam banyak dilakukan oleh Universitas Al-Azhar. Komite Al-Azhar memiliki kewenangan

untuk berfatwa terhadap masalah-masalah agama.

Komposisi penduduk Mesir 90 % beragama Islam dan didominasi Sunni sementara sebagian lain menganut paham Sufi lokal. Agama Kristen dianut sekitar 10% dan penganut Kristen 78% di dominasi Koptik (Protestan Koptik, Ortodoks dan Katolik Koptik). Dalam bidang pendidikan modernisasi diawali dengan pengenalan kemajuan Iptek yang dibawa oleh Napoleon Bonaparte dari Perancis di saat melakukan invasi ke Mesir. Pencapaian Napoleon Bonaparte dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, belakangan menjadi inspirasi para pembaharu dan pemimpin Mesir guna melakukan terobosan-terobosan sistem pendidikan di Mesir di mana sebelumnya sempat mengalami stagnasi. Pada sisi ekonomi Mesir menggantungkan pada hasil pada pertanian, pertambangan, peternakan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan.

Setelah kemerdekaan negara Mesir dari penjajahan Perancis (28 Februari 1922), berbagai kekacauan politik yang tak berujung terjadi dalam politik negara Mesir, dan hal ini tentu saja mempengaruhi politik pendidikannya. Meskipun demikian, pendidikan tetap dapat dijalankan dengan cukup baik. Besarnya jumlah penduduk yang bermukim di daerah perkotaan menjadi karakteristik masyarakat di Mesir. Sehingga hal tersebut berakibat pada angka pengangguran meningkat, di mana tahun 1987 saja sudah mencapai 11% dari total tenaga kerja, hal tersebut salah satunya karena keterbatasan lahan pertanian di Mesir untuk menyerap tenaga kerja dan kapasitas produksi yang rendah.

Dengan dinamika tersebut, sistem pendidikan negara Mesir sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut guna melihat bagaimana gambaran sistem pendidikan Mesir tersebut dan

dilanjutkan dengan perbandingannya pada sistem pendidikan Indonesia. Kemudian best practice apa yang bisa diambil dari sistem pendidikan Mesir.

2. Konsep Pendidikan di Mesir

Sistem pendidikan negara Mesir sebagaimana di negara-negara lainnya di dunia, dipengaruhi oleh berbagai hal. Sebagai negara dengan peradaban tertua di dunia, pendidikan di Mesir telah mengalami berbagai revolusi dan reformasi. Faktor utama yang sangat berperan adalah faktor sejarah, faktor geografi, faktor demografi, dan faktor politik.

Pada sistem pendidikan Mesir pendidikan ditujukan untuk mendidik akal dan jiwa serta untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dengan cara mengembangkannya dalam proses yang diikuti anak didik sesuai batas-batas yang sesuai dengan perkembangan mereka. Diharapkan proses pendidikan tersebut mampu membentuk muslim dengan karakter yang seimbang dan tidak hanya mengedepankan ranah kognitif (inteligensi) namun diselaraskan dengan ranah afektif (emosional) dan psikomotorik (skill). Secara struktur, pendidikan Mesir terlihat sentralistis, di mana hal tersebut dapat dilihat dari tahapan jenjang sekolahnya sebagai berikut:

1. Pendidikan Dasar

Dalam pendidikan dasar, Mesir memberlakukan wajib belajar selama 9 tahun dengan rentang usia pendidikan antara usia 6 dan 14. Seluruh satuan pendidikan diberikan kebebasan dalam mengatur kebijakan sekolah masing-masing. Didasarkan pada data statistik tahun 1999/2000, persentase partisipasi pra-siswa SD sebesar 16% kemudian terjadi peningkatan 24% pada tahun 2009. Seluruh pelaksanaannya berada di bawah pengawasan Departemen Pendidikan baik

sekolah negeri maupun swasta. Departemen bertugas untuk memilihkan buku pelajaran dan mendistribusikannya ke sekolah. Departemen juga mendapat supportsistem dari badan keuangan internasional seperti Bank Dunia untuk peningkatan akses kesempatan bersekolah bagi anak-anak usia dini disertai dengan membangun kualitas dan kapasitas guru sebagai peningkatan kualitas pembelajarannya. Selanjutnya tahapan persiapan sekolah menengah pertama atau tiga tahun yang lama menjadi lapis kedua wajib belajar dalam pendidikan dasar. Urgensi penyelesaian tingkat pendidikan dasar adalah untuk mengantisipasi terjadinya buta huruf yang diidentifikasi sebagai persoalan berat pada siswa dalam pencapaian keahlian life skills yang pada gilirannya disinyalir bisa mempengaruhi meningkatnya angka kemiskinan.

2. Pendidikan Menengah

Jalur pendidikan menengah terdiri dari tiga yaitu: umum, kejuruan/ teknis dan dual sistem. Tahap pendidikan umum dijalankan selama 3 tahun. Sedangkan pendidikan menengah kejuruan berlangsung 3-5 tahun Kemudian untuk pendidikan kejuruan yang dimaksud mewakili sekolah yang dikenal dengan Kohli Mubarak. Selanjutnya untuk sistem ganda pendidikan kejuruan tingkat menengah diprogramkan selama 3 tahun. Untuk mendapatkan sertifikat lulus para siswa diharuskan mengikuti ujian nasional yang dilaksanakan pada akhir tahap sekunder.

Pada tahun 2004, jumlah siswa yang mampu melewati tahap persiapan sebesar 77,3% dan didaftarkan dalam tingkat sekunder. Untuk siswa juga dilakukan penilaian formatif dan sumatif pada tahun pertama dan untuk tahun kedua dan tiga kualifikasi para siswa untuk mendapatkan nilai rata-rata akhir tahun dengan ujian berstandar nasional dan diberikan

sertifikat Pendidikan Menengah Umum (Thanawiya Amma), sekaligus menjadi salah satu syarat untuk melanjutkan ke jenjang universitas.

3. Pendidikan Tinggi

Terkait sistem Pendidikan Tinggi di Mesir memiliki cakupan yang sangat luas. Di mana sebesar 30% dari populasi penduduk Mesir usia pelajar/mahasiswa melanjutkan pendidikan ke universitas. Dalam hal ini tingkat pendidikan tersier tersebut diawasi langsung oleh Departemen Pendidikan Tinggi. Lembaga pendidikan yang terdapat saat sekarang ini berupa 17 perguruan tinggi (universitas) umum dan 51 lembaga pendidikan masyarakat non-universitas, dan untuk perguruan tinggi swasta terdapat 89 lembaga.

Selanjutnya mengenai jenis-jenis pendidikan di Negara Mesir akan dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Pendidikan Formal

Secara umum terdapat dua penanggung jawab untuk sistem sekolah formal, yakni kementerian pendidikan untuk sekolah struktur sekuler, dan kementerian Al-Azhar untuk sistem sekolah Al-Azhar. Di samping kedua struktur tersebut, terdapat pula jenis sekolah yang diperuntukkan untuk sebagian anak-anak khusus misalnya, anak-anak disabilitas masuk ke sekolah berkebutuhan khusus. Sementara bagi yang memiliki minat militer dapat memasuki sekolah militer, serta terdapat pula anak-anak muda mendaftarkan dirinya untuk mengikuti program pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh lembaga atau badan tertentu setelah ia meninggalkan sekolah regulernya.

1. Sistem Sekolah Umum

Program wajib belajar di Mesir berlaku sampai dengan Grade 8 yang dikenal sebagai pendidikan dasar yang meliputi pendidikan TK dan play group sebelum memasuki

pendidikan dasar, namun jumlahnya minim dan hanya terdapat di daerah perkotaan. Pembagian jenjang pendidikan dasar yang dikenal dengan Sekolah Dasar mulai dari Grade 1 sampai Grade 5, kemudian jenjang kedua terdapat sekolah persiapan, mulai dari Grade 6 sampai Grade 8.

Setelah menjalani pendidikan dasar wajib 8 tahun, terdapat tiga pilihan bagi muridmurid yaitu: memasuki jalur sekolah menengah umum, masuk jalur sekolah teknik menengah 3 tahun, atau masuk ke sekolah teknik 5 tahun. Proses pendidikan di sekolah menengah umum yaitu tahun pertama (Grade 9) merupakan kelas gabungan (bersama). Sedangkan pada grade 10 dan grade 11 murid dapat memilih dan menentukan bidang sains dan non-sains (IPA vs Non-IPA) yang akan ditekuninya. Selanjutnya pendidikan universitas dan pendidikan tinggi dengan spesialisasi bidang mengikuti sistem akademik secara umum. Pada lembaga perguruan tinggi proses pendidikan berlangsung selama dua, empat atau lima tahun sesuai pilihan mahasiswa dengan bidang dan programnya. Pada tahun 1999, mulai dibuka bagi alumni sekolah teknik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dengan pertumbuhan penduduk Mesir yang begitu cepat, berdampak pula pada peningkatan kualifikasi pendidikan, sehingga berakibat pula pada peningkatan jumlah murid.

Upaya untuk mengembangkan pendidikan kejuruan (vokasional) dan pendidikan teknik supaya lebih berpengaruh luas diawali tahun 1950-an. Jumlah lembaga vokasional dan teknik meningkat dari 134 sekolah (dengan 31.800 siswa) pada tahun 1952 menjadi 460 sekolah (dengan 115.600 siswa) pada tahun 1960.

2. Pendidikan Nonformal

Definisi pendidikan non formal adalah rangkaian kegiatan pembelajaran di luar sistem formal yang terstruktur dan terencana yang dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kelompok-kelompok tertentu yang membutuhkan pendidikan. Pendidikan nonformal ditujukan kepada berbagai kalangan mulai dari anak-anak, orang dewasa, laki-laki, perempuan, petani atau pedagang, maupun pengrajin; termasuk apakah dari kalangan orang kaya atau miskin. Maka kebanyakan program yang dibuat lebih dikonsentrasikan pada pendidikan nonformal dalam aspek yang disesuaikan dengan objek peserta didik. Kementerian perburuhan pada tahun 1967, mulai menyelenggarakan program-program pendidikan dan penataran bagi yang telah menamatkan pendidikan tingkat dasar, remaja putus sekolah formal dalam rentang usia antara 12 dan 18 tahun. Program ini memberikan pelatihan vokasional yang cocok yaitu keterampilan yang dibutuhkan untuk lingkungan dan masyarakat. Pendidikan berlangsung biasanya selama sembilan bulan atau tujuh bulan dan dilakukan di pusat-pusat pelatihan vokasional. Kemudian dilanjutkan pada tempat (workshop) unit produksi. Selanjutnya peserta pelatihan akan ditempatkan pada sektor pemerintah atau swasta untuk bekerja secara profesional.

3. Problematika dan Kebijakan Pendidikan di Mesir

Kementerian negara bertanggung jawab terhadap sistem pendidikan di Mesir. Dalam aspek perencanaan pendidikan prasekolah sampai ke pendidikan tinggi menjadi tanggung jawab kementerian pendidikan. Kemudian pada tingkat provinsi tanggung jawab pemerintah adalah bagaimana

tahap implementasinya, di mana mereka bertanggungjawab melengkapi, membangun dan melakukan pengawasan terhadap proses pendidikan berlangsung di daerah teritorialnya.

Secara berkala menteri melakukan rapat dengan dewan-dewan kesekretariatan dan memimpin sidang dengan dewan universitas untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban atas perencanaan dan pembuatan kebijakan pendidikan. Sebagaimana struktur organisasi di pusat kementerian, struktur organisasi provinsi pada dasarnya juga mirip namun hanya lebih sederhana. Jaringan supervisor dan administrator di Mesir tersebar ke dalam 140 distrik pendidikan. Selanjutnya tanggung jawab kementerian Al-Azhar diarahkan bagaimana mengeluarkan kebijakan serta perencanaan pendidikan yang seimbang pada universitas Al-Azhar serta kebijakan dan perencanaan untuk perguruan tinggi dan sekolah lainnya dalam lingkup Al-Azhar.

Alokasi dana pendidikan setelah tahun 1970 mulai ditingkatkan jumlahnya dari tahun-tahun sebelumnya. Pengeluaran masyarakat tahun 1984 dalam membiayai pendidikan mencapai EL.186,5 juta pound. Mesir juga menerima hibah dari Bank dunia, UNICEF, UNESCO dan Negara lain seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris dan Negaranegara Arab lainnya.

Jumlah staf profesional dan staf pendukung di kementerian pendidikan terdapat hampir 2000 sorang. Pada tahun 1980 jumlah guru diperkirakan sebanyak 250.000 orang. Kemudian tahun 1990 hampir 390.000 guru yang mengajar di sekolah-sekolah Mesir. Selanjutnya sebanyak 55% menjadi tenaga pengajar di SD, 22% di Sekolah Menengah Pertama, dan 16% di Sekolah Menengah Atas. Namun hanya 17% menjadi tenaga

pengajar di sekolah Al-Azhar. Dari data tersebut maka terlihat jumlah guru di Mesir termasuk cukup banyak, di antaranya guru pengampu pelajaran agama Islam, pengampu bahasa arab, pertanian, dan teknik serta guru pengampu bidang seni.

Penyusunan kurikulum di Mesir dilakukan dengan tim. Tim tersebut terdiri dari konsultan, para ahli, para profesor pendidikan, supervisor, dan beberapa guru-guru yang berpengalaman. Sebuah komite atau grup panitia dibuat untuk setiap mata pelajaran atau kelompok pelajaran, selanjutnya ketua komite atau panitia tersebut diikutsertakan dalam rapat koordinasi dengan pihak kementerian. Hasil rumusan kurikulum tersebut diserahkan oleh kepada dewan pendidikan pra universitas yang bertugas mengesahkan dan meresmikannya untuk diterapkan dalam pembelajaran. Kemudian perubahan dan penyesuaian kurikulum tersebut dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan daerah dengan situasi dan kondisi yang memerlukan kebijakan khusus.

Kemudian juga dilakukan pembentukan sebuah tim kecil untuk menulis buku teks yang sesuai dengan garis besar kurikulum yang ditentukan. Dalam aturan kurikulum buku teks tidak persis harus sama dengan kurikulum yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang muncul di lapangan seperti kondisi kelas, keterbatasan alat peraga dan perlengkapan, bervariasinya kualitas guru terkadang bertolak belakang dengan garis besar kurikulum ditambah lagi pada umumnya pembelajaran masih banyak bermetode verbal.

Selanjutnya terdapat pula berbagai badan atau lembaga komite penyusunan kurikulum yang bertugas untuk menyusun materi pembelajaran bekerja sama dengan para akademisi dan guru-guru yang tergabung dalam asosiasi sesuai dengan jurusan

yang dipersiapkan. Dalam pelaksanaannya secara umum sekolah dan setiap guru mata pelajaran bebas menentukan materi yang diinginkannya.

Untuk sertifikasi Pendidikan Dasar, Murid yang dinyatakan lulus mendapat sertifikat bias menggunakannya sebagai syarat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mengenai jumlah skor sangat menentukan kualitas sekolah yang boleh dimasuki calon siswa, karena itu siswa Mesir sangat menginginkan perolehan skor yang tinggi dalam sertifikatnya untuk bisa memasuki sekolah atau perguruan tinggi dengan kualifikasi yang diinginkannya. Sehingga hal itu menyiratkan penentuan masa depan siswa atau anak-anak Mesir digantungkan pada perolehan nilai ujian negara. Dan selanjutnya sistem ini menimbulkan nuansa persaingan yang agak tinggi di kalangan siswa.

Dengan demikian sistem ujian di Mesir terasa sangat membebani pikiran murid, orang tua serta para pejabat pendidikan dikarenakan hasil ujian yang berdampak sangat penting tersebut. Demikian pula dengan penetapan ujian naik kelas dilakukan sewaktu Grade 2, 4, dan 5, sebelum dilakukannya ujian negara pada Grade 8.

Begitu juga halnya dengan siswa-siswa yang hendak menamatkan pendidikan menengah, dikarenakan perolehan jumlah menentukan jenis fakultas dan universitas yang bias mereka masuki. Implikasi dari sistem ujian yang penuh persaingan ini memaksa siswa untuk belajar keras, namun efek negatif yang ditimbulkan munculnya perilaku menyontek dengan berbagai rupa modus serta hal tersebut menyuburkan tumbuhnya kursus-kursus (les) privat yang dikelola perorangan atau masyarakat.

Dalam hubungan dengan lembaga PBB, Mesir membuka ruang bagi UNESCO (lembaga PBB bergerak dibidang pendidikan) untuk mengadakan pengembangan sistem pelatihan guru dalam rangka mendukung peningkatan SDM Mesir yang diinginkan. Untuk mendukung program sertifikasi keahlian guru pelatihan tersebut dilakukan dengan kerja sama dari perusahaan-perusahaan yang berperan dalam memberikan sertifikasi keahlian. Kejelasan lebih lanjut bagaimana impact program tersebut sebagaimana akan diutarakan berikut ini:

1. Pemenuhan standar kompetensi internasional di samping standar nasional menjadi tujuan pelatihan pengembangan dan peningkatan keterampilan guru yang diselenggarakan tersebut. Sehingga kebijakan tersebut memberikan nilai tambah yang strategis dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan pendidikan di masa mendatang. Dengan pola peningkatan kompetensi guru demikian sejatinya bisa sesuai dengan Indonesia yang sekarang tengah giat dalam mewujudkan peningkatan pendidikan bermutu yang tidak hanya untuk pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang telah dirumuskan namun juga untuk peningkatan kompetensi peserta didik sesuai standar internasional. Artinya, dalam hal ini arah kebijakan pendidikan di Mesir boleh dikatakan mirip dengan sistem pendidikan di Indonesia, terkhusus dalam penyiapan output pendidikan yang kompetitif secara global.
2. Dengan jumlah penduduk yang padat dan mempunyai banyak institusi pendidikan siswa dan guru, pengembangan sistem pelatihan jarak jauh untuk peningkatanketerampilan guru telah dilakukan dengan penggunaan teknologi informasi berbasis komputer atau jaringan jarak jauh. Model serupa juga bisa menjadi alternatif untuk dikembangkan di

Indonesia yang juga memiliki luas dan kepadatan jumlah penduduk agar proses pelatihan guru dapat terlaksana dengan meluas serta efisien.

3. Secara fungsional, dalam penjenjangan karier guru di Mesir dilakukan lebih bertahap dan dapat menciptakan semangat profesionalisme guru. Urutan sistem karier guru mulai dari assistant teacher, teacher, senior teacher, sampai master teacher.

PENUTUP

SOSIOLOG EMILE Durkheim, dalam karyanya *Education and Sosiology* menyatakan bahwa pendidikan merupakan produk masyarakat itu sendiri, yaitu mampu hidup konsisten mengatasi ancaman dan tantangan masa depan. Nabi SAW bersabda: “Didiklah anak-anak kamu, sesungguhnya mereka diciptakan untuk zaman yang bukan zamanmu”. Jadi, pendidikan harus berorientasi masa depan, harus futuristik.

Pendidikan Islam kontemporer ialah bahwa belajar sebagai proses untuk mengembangkan berbagai kompetensi peserta didik, mensinergikan berbagai ilmu, kesehatan mental juga aspek yang penting untuk dikembangkan dalam pendidikan Islam selain aspek spiritual, pengetahuan dan sosial. Pendidikan Islam harus mencetak manusia yang sesuai fitrahnya yakni sebagai Abdullah dan Khalifah Allah, mensinergikan aspek intelektual dan spiritual serta moral.

Pendidikan Islam mempunyai sejarah yang panjang. Dalam pengertian seluas-luasnya, pendidikan Islam berkembang seiring dengan munculnya Islam itu sendiri. Islam, dalam perkembangannya mengalami kemajuan yang signifikan, meskipun pada beberapa negara tertentu mengalami fluktuatif, bahkan ada juga yang hampir punah. Penyebaran Islam terjadi dengan berbagai cara, diantaranya adalah orang-orang Islam

pergi ke suatu daerah/negara dengan tujuan dakwah. Selain itu, ada juga dengan tujuan berdagang tetapi mendakwah dan berdagang mereka juga melakukan perkawinan, dan yang lebih menarik karena mereka mengawini anak bangsawan, penguasa dan sebagainya.

Perbandingan pendidikan sebagai ilmu dalam dunia pendidikan pada khususnya dan dunia ilmu pengetahuan pada umumnya mempunyai kedudukan yang sangat penting. Perkembangan pendidikan yang berjalan dalam suatu bangsa mengandung aspirasi-aspirasi dan ide-ide yang mendorong berkembangnya sebuah peradaban. Peradaban akan menjadi lebih kuat dengan berkembangnya pendidikan. Perbandingan pendidikan bertujuan menganalisis berbagai metode, pendekatan dan proses pendidikan yang dialami oleh berbagai bangsa di belahan dunia. Hal ini menjadi referensi yang sangat baik bagi kita untuk membangun pendidikan yang komprehensif di negara Indonesia. Semoga dengan kehadiran buku ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam memahami materi perbandingan pendidikan dan perkembangan pendidikan di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abou-Warda, S. H. (2015). Entrepreneurial orientation in business schools: A comparative study of higher education systems in Egypt. *International Journal of Educational Management*, 29(2), 192–212.
- Absawati, H. (2020). Telaah Sistem Pendidikan Finlandia: Penerapan Sistem Pendidikan Terbaik Dunia Jenjang Sekolah Dasar. *Jurnal Elementary: Kajian Teori Dan Hasil Penelitian Pendidikan Sekolah Dasar*, 3(2), 64-70.
- Agustiar, N. (2001). *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*. Bandung: Lubuk Agung.
- Ahmad, F., & Samsudin, D. (2017). Kebergantungan media sosial terhadap isu Arab Spring dalam kalangan khalayak di Malaysia. *Jurnal Komunikasi*, 33(1), 423-437.
- Ali, A. J. (1999). *Perbandingan Pendidikan Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anzizhan, S. (2004). *Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Arcaro, J. S. (1995). *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arifin, H. M. (2003). *Ilmu Perbandingan Pendidikan*. Jakarta: Golden Terayon Press.
- Arnove, R. F., Torres, C. A., & Franz, S. (1982). *Comparative Education*. New York: Macmillan Publishing Co. Inc.

- Aslan, A. (2019). Sejarah Perjalanan Kurikulum Pendidikan Islam di Malaysia. *TaLimuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 8 (1), 29-45.
- Aslindah, A. (2015). Pendidikan Islam di Malaysia: Jenis, Jenjang, Kebijakan, dan Tujuan Pendidikan. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 18 (1), 16-26.
- Assegaf, A. R. (2013). *Internasionalisasi Pendidikan Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-negara Islam dan Barat*. Yogyakarta: Gama Media.
- Aud, S., Wilkinson-Flicker, S., Kristapovich, P., Rathbun, A., Wang, X., & Zhang, J. (2013). The Condition of Education 2013. NCES 2013-037. *National Center for Education Statistics*.
- Aziz, M. F. A. (2020). Manajemen Pendidikan Di Negara Cina. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, 17(02), 51-60.
- Barnadib, I. (1984). *Dasar-dasar Pendidikan Perbandingan*. Yogyakarta: Institut Press IKIP Yogyakarta.
- Barnadib, I. (1988). *Pendidikan Perbandingan Buku 1 Dasar-Dasar*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Barnadib, I. (1990). *Pendidikan Perbandingan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Bautty, S. N. (2016). Telaah Sistem Pendidikan di Finlandia dan Relevansinya dengan Sistem Pendidikan Islam di Indonesia (Kajian Terhadap Buku Finnish Lessons: Mengajar Lebih Sedikit, Belajar Lebih Banyak Ala Finlandia Karya Pasi Sahlberg). *UIN Sunan Kalijaga*.
- Bereday, G. Z. F. (1964). *Comparatif Method in Education*. New York : Holt, Rinchart and Winstone Inc.
- Buchori, M. (1995). *Transformasi Pendidikan*. Jakarta: IKIP Muhammadiyah Jakarta Press.

- Buhendwa, J. K., & Masungu, K. A. (2018). Education Policy in South Sudan: Between the Peace Agreement, the Armed Conflict, the Villages and the Camps for the Internally Displaced People. *American Journal of Educational Research and Reviews*, 3, 35-35.
- Burg, K. (1966). *Languaeas Symbolic Action: Essays on Life, Literature and Method*. Berkeley: University Of Califprnia.
- Dardjowidjojo, S. (1991). *Pedoman Pendidikan Tinggi*. Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia.
- Dardjowidjojo, S. (1992). *PTS dan Potensinya di Hari Depan: Memoir Seorang Purek I*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Daud, R. M. (2020). Sistem Pendidikan Finlandia Suatu Alternatif Sistem Pendidikan Aceh. *PIONIR: Jurnal Pendidikan*, 8(2).
- Durhan, D. (2019). Internalisasi Konsep Demokrasi dalam Pendidikan Islam (Belajar dari Praktik Demokrasi dalam Pendidikan Islam di Pakistan, Mesir dan Turki). *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, 5(1), 50-59.
- El Nagdi, M., & Roehrig, G. (2020). Identity evolution of STEM teachers in Egyptian STEM schools in a time of transition: A case study. *International Journal of STEM Education*, 7(1), 1-16.
- Fattah, N. (2012). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Getteng, A. R. (2011). *Menuju Guru Profesional Dan Ber-Etika*. Yogyakarta: Graha Guru.
- Hadisusanto, D. (1995). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: FIP IKIP Yogyakarta.

- Hamid, M., Thron, C., & Fageeri, S. (2021). Demographics of Sudanese University Students in Relation to Regional Conflict and Underdevelopment. *Social Sciences*, 10 (3), 89.
- Hasan, C. (1995). *Kajian Pendidikan Perbandingan*. Surabaya: Al Ikhlas.
- Hasbullah. (2007). *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hidayat, R., & Abdillah. (2019). *Ilmu Pendidikan “Konsep, Teori dan Aplikasinya”*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia.
- Imam, B. (1982). *Dasar-dasar Pendidikan Perbandingan*. Yogyakarta: Institute Press IKIP.
- Imam, B. (1991). *Pendidikan Perbandingan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Inge, T. (1984). *Huck Fin Among The Critics, a Centennial Selection 1884*. Wasington DC: Information Agency.
- Isri, S. (2015). Konsep Pendidikan Jerman dan Australia; Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 25-47.
- Jones, J., & Walters, D. L. (2008). *Human Resource management in Education*. Depok: Q-Media.
- Kandel, L. I. (1965). *Sejarah Pendidikan, Pendidikan Komparatif dan Internasional, Teori Pendidikan*. Jakarta: Nasional Press.
- Klein, J. T. (1990). *Interdiciplnaty History Theory and Practice*. Michigan: Wayne State University Press.
- Kochmans, J. J. (1979). *Interdiciplnaty and Higther Education*. Pennsylvania: Penn State University Press.
- Kwiat, J. (1980). *Studies In American Culture*. Minneapolis: University Of Mannisota Press.

- Maman, Y., & Falah, J. F. (2018). "Education Ltd."—The Influence of British Earl of Cromer on the Education System in Egypt (1883-1907). *Advances in Historical Studies*, 7(2), 79-96.
- Mastuhu. (1999). *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos.
- Merryfield., Elaine, M. M. J., & Sarah, P. (1997) *Preparing teachers To Teach Global Perspective: A Handbook for Teacher Educator*. Callifornia; A. Sage Publicationa Company.
- Michie, M. (2019). Perbandingan kurikulum 2013 Indonesia dengan kurikulum Australia dengan fokus pada ilmu pengetahuan alam. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 19(2), 257-268.
- Mior, J. M. K. A. (2011). Sistem pendidikan di Malaysia: Dasar, cabaran, dan pelaksanaan ke arah perpaduan nasional. *Sosiohumanika*, 4(1).
- Moss, J., Godinho, S., & Chao, E. (2019). Enacting the Australian curriculum: Primary and secondary teachers' approaches to integrating the curriculum. *Australian Journal of Teacher Education*, 44(3), 24-41.
- Muchsin, B., & Wahid, A. (2009). *Pendidikan Islam Kontemporer*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Muchtar, O. (1976). *Pendidikan Nasional Indonesia, Pengertian dan Sejarah Perkembangan*. Bandung: Balai Penelitian Pendidikan IKIP Bandung.
- Mudyahardjo, R. (2008). *Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mulyasa, E. (2013). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Rosdakarya

- Munandar, Y. (2014). *Menemukan Arah Kerja Sama Ekonomi Indonesia dengan Negara Mitra: Malaysia, Singapura, Bosnia Herzegovina, Moldova, dan Solomon Islands*. Yogyakarta: Deepublish.
- Munir, Y. (2018). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.
- Murjani, M. (2022). Pendidikan Islam di Sudan. *Adiba: Journal Of Education*, 2(1), 40-50.
- Murtadlo, M. (2018). Hubungan Mesir-Indonesia dalam Modernisasi Pendidikan Islam. *Al-Qalam*, 24(2), 297-306.
- Nasution, S. (2008). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nor, M. R. M. (2011). Sejarah dan perkembangan pendidikan Islam di Malaysia. *At-Ta'dib*, 6(1).
- Nur, A. S. (2001). *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*. Bandung: Lubuk Agung.
- Ornstein, et al. (2011). *Foundations of Education*. Canada : Wadsworth.
- Partanto, P. A., & Barry, M. D. A. (1994). *Kamus Ilmiah Populer* Surabaya: Arloka,
- Pidarta, M. (2007). *Landasan Pendidikan: Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Poerbakawatja, S. (1970). *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*. Jakarta: Gunung Agung.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1993). *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka.
- Putra, A. (2017). Mengkaji dan Membandingkan Kurikulum 7 Negara (Malaysia, Singapura, Cina, Korea, Jepang, Amerika dan Finlandia).

- Raharjo, R. (2012). *Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka.
- Rembangy, M. (2008). *Pendidikan Transformatif: Pergulatan Kritis Merumuskan Pendidikan di Tengah Pusaran Arus Globalisasi*. Yogyakarta: Teras.
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Rohman, A. (2013). *Pendidikan Komparatif Dasar-Dasar Teori Perbandingan Pendidikan Antar Bangsa*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Rohman, A. (2013). *Pendidikan Komparatif*. Yogyakarta: Laks Bang Mediatama.
- Roqib, M. (2009). *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Rosidin, R., & Aeni, N. (2017). Pemahaman Agama dalam Bingkai Kebangsaan: Studi Kasus pada Organisasi Rohis SMA Negeri 1 Sragen. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 2(2), 135-149.
- Saifuddin, A. F. (2011). *Catatan Reflektif Antropologi Sosial Budaya*. Jakarta: All Rihgts Reserved.
- Saleh, M. N. I. (2015). Perbandingan Sistem Pendidikan di Tiga Negara; Mesir, Iran dan Turki. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 49-70.
- Sidharto, S. (1989). *Pendidikan di Negara Berkembang Suatu Tinjauan Komparatif*. Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Ditjend Dikti.
- Sigit, S. (1992). *Peranan dan Partisipasi Perguruan Swasta di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Siswoyo, D. (2007). *Membangkitkan Kembali Jati Diri Bangsa: Implikasi Terhadap Pendidikan Guru dan Dosen*. Yogyakarta: FIP Yogyakarta.

- Soejono. (1979). Aliran-Aliran Baru dalam Pendidikan: Bagian ke-2. Bandung: CV. Ilmu.
- Soelaiman, A. T. F. (2012). *Sistem Pendidikan di Inggris*. London: KBRI London.
- Stopikowska, M., & El-Deabes, Y. M. (2012). The education system of Egypt: Contexts, frames and structures. *Problems of Education in the 21st Century*, 40, 129.
- Suardipa, I. P. (2020). Diversitas Sistem Pendidikan di Finlandia dan Relevansinya dengan Sistem Pendidikan Di Indonesia. *Maha Widya Bhuwana: Jurnal Pendidikan, Agama dan Budaya*, 2(2), 68-77.
- Suastika, I. N. (2021). Analisis komparasi social studies di China dan Korea Selatan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 60-69.
- Sudiyono. (2009). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhendi, I. (1997). Dasar-Dasar Historis dan Sosiologis Pendidikan, dalam Dasar-dasar Kependidikan. Bandung: IKIP Bandung.
- Sukino, A. (2016). Dinamika Pendidikan Islam Di Mesir Dan Implikasinya Terhadap Transformasi Keilmuan Ulama Nusantara. *Studia Didaktika*, 10(01), 28-39.
- Sumintono, B., Tahir, L. M., & Rahman, M. A. A. (2012). Pendidikan Moral di Malaysia: Tantangan dan Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 3(1).
- Suparlan. (2004). *Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dari Konsepsi Sampai dengan Impementasi*. Yogyakarta: Hikayat Publishing.
- Tilaar, H. (1995). 50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Tilaar, H. (2000). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rinneka Cipta.
- Tilaar, H. (2006). *Standar Pendidikan Nasional Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tirraharja, U., & Sulo, L. (1994). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta : Dikti Pendidikan Tinggi Depdikbud
- Tirtarahardja, U., & Sula, L. (1995). *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Wiiliams, G. (1977). *Towards Lifelong Education: A New Role for Higher Education Institutions*. Paris: UNESCO.
- Zulfa, U. (2012). Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat Analisis School Levy. *Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati*, 27(2), 239-254.

TENTANG PENULIS



Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag. lahir di Palembang pada tanggal 03 November 1976. Berprofesi sebagai ASN Dosen di UIN Raden Fatah Palembang, dengan tugas tambahan saat ini sebagai Wakil Dekan II FITK UIN Palembang.

Menempuh pendidikan S1 Program Studi Pendidikan Agama Islam di IAIN Raden Fatah Palembang, S2 Program Studi Pendidikan Islam di IAIN Imam Bonjol Padang, S3 Program Studi Pendidikan Agama Islam di UIN Raden Fatah Palembang.

Beberapa artikel dan buku yang pernah ditulis dan telah dipublikasikan: *Sex Education For Millennial in Islamic Perspective* (2022) terbit di *PALAPA*. Dampak Penggunaan Gadget di Masa Pandemi Covid-19 pada Kemampuan Sosial Anak di Desa Sugih Waras Jalur 16 Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin (2022) terbit di *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. Pengaruh Belajar Daring pada Pendidikan Anak Usia Dini Selama Masa Pandemi Covid-19 di Desa Tegal Rejo Kota Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul (2022) terbit di *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. Kompetensi Pedagogik dengan Kemampuan Asesmen Perkembangan Anak Usia Dini (2022) terbit di *Tumbuh Kembang: Kajian Teori dan Pembelajaran PAUD*. Upaya Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus Anak melalui Teknik Finger Painting di Kelompok Bermain Tunas Harapan Desa Pelajau Kecamatan Banyuasin III (2022) terbit di *JIIP-Jurnal Ilmiah*

Ilmu Pendidikan. Strategi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nurul Huda dalam Meningkatkan Daya Saing (2022) terbit di *Tadrib*. Analisis Profesionalisme Guru PAI Pasca Pelaksanaan Pengawasan di Sekolah Dasar Negeri Gugus Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin (2022) terbit di *Studia Manageria*. Disharmony of Parents and Children in an Online Learning during the Covid-19 Pandemic in Indonesia (2021) terbit di *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*. Hubungan Antara Kegiatan Ekstrakurikuler dengan Keaktifan Siswa dalam Berdiskusi di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 4 Palembang (2021) terbit di *Jurnal PAI Raden Fatah*. Persepsi Mahasiswa Mengenai Layanan Bimbingan Skripsi Online (2021) terbit di *Jurnal Komunikasi Islam dan Kehumasan (JKPI)*. Strategi Meningkatkan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Melalui Program Guru Penggerak: Strategi Meningkatkan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam (2021) terbit di *AL-WIJDÁN: Journal of Islamic Education Studies*. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Gangguan Kesehatan Mental Mahasiswa dalam Perkuliahan Online (2021) terbit di *Proceedings of International Education Conference*. The variousity of happiness perspective and its implementation in learning process (2020) terbit di *Psikis: Jurnal Psikologi Islami*. The Evaluation of National Qualification Framework Curriculum (KKNI) at UIN Raden Fatah Palembang (2020) terbit di *Ta'dib*. Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan di Smp Syabab Al-Fatih Sri Mulya Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir (2020) terbit di *Jurnal PAI Raden Fatah*. Pola Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan Intrakampus dalam Mengembangkan Karakter Mahasiswa (Studi UIN Raden Fatah Palembang) (2020) terbit di *Rafah Press*.



Dr. Maryamah, M.Pd.I lahir di Palembang, pada tanggal 18 November 1976. Berprofesi sebagai ASN Dosen di UIN Raden Fatah Palembang (2007-sekarang), dengan tugas tambahan saat ini sebagai Sekretaris Program Studi Magister PAI UIN Palembang. Menempuh pendidikan S1 Program Studi Pendidikan Agama Islam di IAIN Raden Fatah Palembang (1996-2000), S2 Program Studi Ilmu Pendidikan Islam di IAIN Raden Fatah Palembang (2008-2012), S3 Program Studi Peradaban Islam di UIN Raden Fatah Palembang (2017-2020).

Beberapa artikel dan buku yang pernah ditulis dan telah dipublikasikan: Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Suscatin (Kursus Calon Pengantin) di Lembaga Kua Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir (2022) terbit di *Jurnal PAI Raden Fatah*. Peran Kepala Sekolah Sebagai Educator dalam Meningkatkan Kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (2021) terbit di *Studia Manageria*. Teori Humanistik Kebutuhan Maslow dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar (Analisis Artikel Jurnal Sinta 2-6) (2021) terbit di *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Tingkat Sekolah Menengah Atas di Sekayu Tahun Pelajaran 2021/2022 (2021) terbit di *JIEMAN: Journal of Islamic Educational Management*. Peran Budaya Sekolah Dalam Pembentukan Sikap Disiplin Siswa Kelas X MAN 3 Kota Palembang (2021) terbit di *Jurnal Sikola: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pembelajaran*. Analisis Perilaku Organisasi dalam Melaksanakan Kegiatan Akreditasi Secara Daring di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Palembang (2021) terbit di *Islamic*

Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. Penanaman Nilai-Nilai Akhlak dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Menghadapi Era Milenialdi SMA Negeri 2 Rejang Lebong (2020) terbit di *Tadrib*. Fenomena Ziarah Masyarakat di Sumatera Selatan: Studi Etnografi pada Makam Kiai Muara Ogan (2020) terbit di *Kontekstualita*.

PERBANDINGAN PENDIDIKAN ISLAM KONTEMPORER

Buku Perbandingan Pendidikan ini merupakan kumpulan dari makalah mahasiswa S2 Prgram Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang yang telah didiskusikan dalam kegiatan perkuliahan selama satu semester. Makalah-makalah tersebut lalu diberi saran dan masukan oleh sesama rekan mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah, juga diperkaya analisis dan referensinya. Selanjutnya diedit dan dijadikan buku referensi. Kehadiran buku ini bertujuan untuk memperkaya khazanah keilmuan mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan Perbandingan Pendidikan serta para pembaca dalam memahami perkembangan Pendidikan di dunia.

Buku ini membahas tentang azas komparasi Pendidikan, metodologi komparasi Pendidikan, kebijakan Pendidikan di beberapa negara, Pendidikan internasional dan global, histori Pendidikan di Indonesia, serta perbandingan Pendidikan Islam kontemporer. Semoga buku ini dapat menginspirasi para pembaca untuk membangun Pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik, sehingga bangsa aini dapat menjadi bangsa yang maju dengan tetap tidak meninggalkan ciri khasnya sebagai bangsa yang beradab.